



BIOGRAFI PAHLAWAN NASIONAL SULTAN HAMENGKU BUWANA IX

DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN RI
JAKARTA
1998



BIOGRAFI PAHLAWAN NASIONAL SULTAN HAMENGKU BUWANA IX

**DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN RI
JAKARTA
1998**

BIOGRAFI PAHLAWAN NASIONAL SULTAN HAMENGKU BUWANA IX

Tim Penulis : Ahmad Adaby Darban
Sri Sutjiatiningsih
Andry L. Nurcahyo
Nurlaini Setyawati
Nurdiyanto

Penyunting : Ahmad Adaby Darban

Hak Cipta dilindungi oleh Undang-undang

Diterbitkan oleh : Proyek Inventarisasi dan Dokumentasi Sejarah
Nasional Direktorat Sejarah dan Nilai Tradisional Direktorat
Jenderal Kebudayaan Departemen Pendidikan dan
Kebudayaan

Edisi I 1998

Dicetak oleh : CV. EKA DHARMA

SAMBUTAN DIREKTUR JENDERAL KEBUDAYAAN

Karya-karya sejarah dengan pelbagai aspek yang dikaji dan ditulis melalui Projek Inventarisasi dan Dokumentasi Sejarah Nasional (Projek IDSN) dimaksudkan untuk disebarluaskan ke tengah-tengah masyarakat. Adapun tujuannya ialah untuk memberikan bahan informasi kesejarahan kepada masyarakat. Dengan demikian diharapkan banyak pihak akan dapat menambah pengetahuannya tentang sejarah, baik yang menyangkut akumulasi fakta maupun proses peristiwa. Di samping itu para pembaca juga akan memperoleh nilai-nilai kesejarahan, baik yang mengenai kepahlawanan, kejuangan, maupun perkembangan budaya yang terungkap dari paparan yang terdapat dalam karya-karya sejarah itu.

Kami menyadari bahwa buku-buku karya Projek IDSN ini tentu tidak luput dari pelbagai kelemahan bahkan mungkin kesalahan-kesalahan. Namun demikian kami ingin meyakinkan kepada pembaca bahwa kelemahan atau kesalahan itu pastilah tidak disengaja.

Berdasarkan keterangan di atas, kami sangat berterima kasih kepada pembaca jika sekiranya bersedia untuk memberikan kritik-kritik terhadap karya-karya Projek IDSN ini. Kritik-kritik itu pasti akan sangat berguna bagi perbaikan karya-karya projek ini di kemudian hari.

Kepada penulis yang telah menyelesaikan tugasnya dan kepada semua pihak yang ikut serta, baik langsung maupun tidak langsung dalam mewujudkan karya-karya Proyek IDSN ini sebagaimana adanya di tangan pembaca, kami sampaikan terima kasih.

Direktur Jenderal Kebudayaan



Prof. Dr. Edi Sedyawati

NIP. 130 202 962

PENGANTAR

Biografi *Pahlawan Nasional Sultan Hamengku Buwono IX* satu hasil pelaksanaan kegiatan penelitian/penulisan Proyek Inventarisasi dan Dokumentasi Sejarah Nasional Direktorat Jenderal Kebudayaan Departemen Pendidikan dan Kebudayaan pada tahun 1996/1997.

Penulisan Biografi Pahlawan Nasional ini merupakan salah satu upaya untuk menyampaikan gambaran mengenai pahlawan-pahlawan nasional yang berasal dari Kesultanan Yogyakarta yang meliputi sosok perjuangan serta sumbangan maupun peran mereka dalam mempertahankan kemerdekaan tanah air Indonesia.

Dasar pemikiran penulisan biografi pahlawan ini ialah untuk membina persatuan dan kesatuan bangsa, membangkitkan patriotisme kebangsaan, serta melestarikan jiwa dan semangat kepahlawanan dalam kehidupan bangsa dan negara.

Penulisan ini diharapkan akan menjadi semacam jembatan untuk memahami kehidupan kebudayaan di suatu lingkungan masyarakat budaya, serta dapat membangkitkan kesadaran sejarah bagi generasi penerus terhadap gagasan-gagasan dan karya-karya yang pernah diciptakan oleh para pendahulunya.

Dengan diterbitkannya buku biografi pahlawan ini diharapkan dapat memperkaya khasanah kesejarahan dan memberi gambaran yang

memadai bagi masyarakat serta memberi petunjuk bagi kajian selanjutnya. Kepada berbagai pihak yang telah membantu terlaksananya penerbitan buku ini kami sampaikan terima kasih.

Jakarta, September 1998

**Pemimpin Proyek Inventarisasi dan
Dokumentasi sejarah Nasional**

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'G.A. Ohorella', with a large, stylized flourish above the name.

G.A. Ohorella

NIP. 130 370 094

DAFTAR ISI

	Halaman
Sambutan Direktur Jenderal Kebudayaan	v
Kata Pengantar	vii
Daftar Isi	ix
Bab I Pendahuluan	1
Bab II Kehidupan Sri Sultan Hamengku Buwana IX pada Masa Kolonial Belanda Sampai Masa Pendudukan Jepang	
2.1 Masa Kanak-kanak	5
2.2 Masa Remaja dan Pendidikannya	7
2.3 Suksesi di Kraton Ngayogyakarta, Dorojatun Diangkat Menjadi Sultan Hamengku Buwana IX	10
2.4 Sultan Hamengku Buwana IX pada Masa Pendudukan Jepang	18
Bab III Kehidupan Sri Sultan Hamengku Buwana IX Pada Awal Kemerdekaan dan Revolusi Indonesia	
3.1 Peranan Sultan Menjadikan Kerajaan Ngayogyakarta Hadiningrat Menjadi Bagian dari RI	31
3.2 Peranan Sultan pada Waktu Yogya Sebagai Ibu Kota RI	38
3.3 Peranan Sultan pada Waktu Perang Kemerdekaan	42
3.4 Peranan Sultan dalam Bidang Sosial dan Ekonomi ..	49

Bab IV	Peranan Kehidupan Sultan Pada Tahun 1950-an Sampai Tahun 1965	
4.1	Peranan Sultan Dalam Bidang Kemiliteran dan Pemerintahan RI	57
4.2	Peranan Sultan Dalam Bidang Sosial dan Ekonomi ..	60
4.3	Peranan Sultan Dalam Bidang Agama dan Budaya ..	62
Bab V	Peranan Sri Sultan Hamengku Buwana IX Pada Masa Orde Baru	
5.1	Lahirnya Orde Baru	67
5.2	Peranan Dalam Bidang Politik dan Ekonomi	69
5.3	Peranan Dalam Bidang Sosial, Budaya dan Agama ..	76
5.3.1	Peranan Dalam Bidang Sosial : Olah Raga	76
5.3.2	Peranan Dalam Bidang Sosial : Kepramukaan	78
5.3.3	Peranan Dalam Bidang Pengembangan Budaya	80
5.3.4	Peranan Dalam Bidang Pengembangan Keagamaan ..	83
Bab VI	Falsafah Hidup dan Sumbangan Pemikiran Sri Sultan Hamengku Buwana IX	
6.1	Kehidupan Sebagai Seorang Raja	87
6.2	Kehidupan Sebagai Negarawan	90
6.3	Kehidupan Kemanusiaan.....	94
6.3.1	Falsafah Satria Pandita	94
6.3.2	Sikap Rendah Hati (Andhap Asor).....	95
6.3.3	Pejuang Perdamaian	96
Bab VII	Penutup	103
	Daftar Pustaka	105
Lampiran :		
	Keputusan Presiden Republik Indonesia	
	No : 053/TK/Tahun 1990	
	Tentang Penganugerahan Pahlawan Nasional Bagi	
	Sri Sultan Hamengku Buwono IX.	107

BAB I

PENDAHULUAN

Tulisan ini adalah salah satu naskah Biografi Pahlawan Nasional yang diterbitkan oleh Proyek Inventarisasi dan Dokumentasi Sejarah Nasional (IDSN). Sesuai dengan tujuan proyek, maka penulisan naskah ini akan digunakan untuk :

Pertama, mengungkapkan kisah kehidupan Pahlawan Nasional Sri Sultan Hamengku Buwana IX, agar dapat dijadikan suri tauladan; Kedua, dapat mewariskan, nilai-nilai yang luhur dari perbuatan, amalan dan tingkah laku kehidupan Pahlawan Nasional Sri Sultan Hamengku Buwana IX; Ketiga, memelihara kenangan tentang para pahlawan, termasuk pahlawan Sri Sultan Hamengku Buwana IX yang telah memberikan dharma bhaktinya kepada negara, nusa, dan bangsa Indonesia.

Mengingat waktu yang sangat terbatas untuk menulis naskah ini, maka penulis naskah ini tidak dapat menyajikan sebuah kisah kehidupan Sri Sultan Hamengku Buwana IX dalam arti yang sempurna dan selengkap-lengkapnyanya. Menulis biografi tokoh yang memiliki pengalaman hidup yang luar biasa seperti Sri Sultan Hamengku Buwana IX, membutuhkan waktu yang panjang. Dengan waktu yang panjang itu penulis dapat leluasa mengumpulkan sumber tertulis, audio visual, media elektronika, atau pun sumber lisan, sehingga dapat mengungkapkan kisah biografi mendekati realitasnya.

Meskipun proses penulisan biografi kepahlawanan Sri Sultan Hamengku Buwana IX ini hanya diberi waktu yang amat singkat, namun tim peneliti dan penulisan ini berusaha untuk bekerja keras berjalan di atas metode penulisan sejarah. Dengan kemampuan yang ada, mengumpulkan sumber primer dan sekunder, mengadakan wawancara, sehingga dari bahan-bahan itu direkonstruksi menjadi sebuah tulisan biografi ini. Tim penulisan ini berusaha mengumpulkan sumber sebanyak mungkin, melalui seleksi awal berdasarkan relevansinya, kemudian diadakan kritik sumber yaitu pada kritik ekstern untuk mendapatkan sumber yang autentik dan pada kritik intern untuk mendapatkan sumber yang kredibel. Dengan demikian, penulisan ini dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah.

Dalam penyajian ini, di samping inti penyorotan adalah kehidupan pribadi Sri Sultan Hamengku Buwana IX, disinggung juga keadaan lingkungan keluarga dan lingkungan masyarakat serta budayanya, semangat zaman, atau tanda zaman pada waktu itu. Lingkungan keluarga dalam hal ini punya arti penting, karena Sri Sultan Hamengku Buwana IX adalah raja, yang waktu kecil hingga pertumbuhannya tidak terlepas dari tradisi kraton. Dari suasana kehidupan zamannya, Sri Sultan Hamengku Buwana IX hidup pada zaman Belanda, Pendudukan Jepang, Kemerdekaan, dan zaman Pembangunan. Di tengah zaman-zaman itulah Sri Sutan Hamengku Buwana IX hidup dan menjadi pemuka di dalamnya. Ia menjadi orang penting yang sangat diperhatikan oleh kawan maupun lawan, dan ia pun menjadi tumpuan hati nurani rakyat.

Sri Sultan Hemengku Buwana IX sebagai pewaris kerajaan Mataram Islam, ia mempunyai jiwa pejuang untuk melawan setiap bentuk penjajahan, dan membela masyarakat yang tertindas. Meskipun pada mulanya ia sekolah di lingkungan pendidikan Belanda, namun jiwa patriotismenya tetap kokoh. Oleh karena itu, ketika Republik Indonesia Merdeka, Sri Sultan Hamengku Buwana IX beserta seluruh jajaran kerajaan dan rakyat Ngayogyakarta hadiningrat, menyatakan diri mendukung negara RI dan berdiri dalam lingkungan Negara Republik Indonesia. Keputusan semacam juga dinyatakan oleh Sri Paku Alam VIII. Oleh karena itulah, Wilayah Daerah Yogyakarta,

kemudian dinyatakan sebagai Daerah Istimewa Yogyakarta, disebut dalam UUD 1945 pasal 18.

Dalam situasi negara RI yang baru merdeka, Sri Sultan Hamengku Buwana IX banyak memberikan bantuan, baik tenaga, pikiran, bahkan sampai ikut mengorbankan hartanya untuk kepentingan Negara dan Bangsa Indonesia. Sri Sultan Hamengku Buwana IX aktif dalam perjuangan baik di tingkat daerah maupun pusat, di berbagai bidang, antara lain menjadi Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta dan sebagai Menteri Pertahanan Sri Sultan Hamengku Buwana membantu pendidikan, sehingga Pagelaran Kraton Ngayogyakarta Hadiningrat dipinjamkan untuk kampus Universitas Gadjah Mada Yogyakarta, yang berdiri tahun 1949.

Sri Sultan Hamengku Buwana IX memiliki jasa-jasa yang banyak, memiliki peran yang menentukan bagi Bangsa dan Negara Indonesia, dan memiliki jiwa patriotik, sabar, serta mengayomi rakyat. Hal ini tidaklah dapat diuraikan satu persatu dalam pendahuluan ini. Oleh karena itu akan diuraikan satu persatu dalam beberapa bagian atau bab dalam tulisan ini. Agar susunan biografi ini runtut, maka dalam penguraianannya dibagi dalam beberapa bagian, yaitu :

- Bab I : Pendahuluan, memuat hal-hal yang menjadi tujuan penulisan dan diuraikan pula sistematika penulisan.
- Bab II : Membicarakan kehidupan Sri Sultan Hamengku Buwana IX dari masa kanak-kanak sampai dengan masa penjajahan Jepang. Di dalamnya memuat keadaan lingkungan keluarga dan masyarakat, serta zamannya. Dimuat juga tentang proses kenaikan tahta Sri Sultan Hamengku Buwana IX.
- Bab III : Membahas kehidupan Sri Sultan Hamengku Buwana IX pada awal Kemerdekaan Republik Indonesia sampai tahun 1965. Di dalamnya menggambarkan kehidupan dan peranan Sri Sultan Hamengku Buwana IX menghadapi gejolak politik era Demokrasi Terpimpin.
- Bab IV : Mengisahkan kehidupan Sri Sultan Hamengku Buwana IX pada era Orde Baru sampai akhir hayatnya. Di

dalamnya ditampilkan peranan Sri Sultan Hamengku Buwana IX dalam bidang Sosial, Ekonomi, Keagamaan, sampai dengan Olah Raga.

Bab V : Penutup, di dalamnya memuat simpulan dari Peranan Kepahlawanan Sri Sultan Hamengku Buwana IX, sebagai suri tauladan yang amat berharga bagi generasi penerus.

BAB II

KEHIDUPAN SULTAN HAMENGKU BUWONO IX PADA MASA KOLONIAL BELANDA SAMPAI MASA PENDUDUKAN JEPANG

2.1 Masa Kanak-Kanak

Pada hari Sabtu Paing, tanggal 12 April 1912 atau menurut perhitungan Jawa tanggal 25 Rabinulakir tahun Jimakir 1842 di kampung Sompilan, jalan Ngasem 13 Yogyakarta, lahir seorang putra dari seorang wanita yang bernama R.A. Kustilah, seorang putri Pangeran Mangkubumi.¹ Selanjutnya wanita ini menyandang gelar Kanjeng Raden Ayu Adipati Anom yang merupakan garwopadmi dari Gusti Pangeran Haryo Puruboyo. Seorang putra yang lahir pada malam hari itu setelah "sepasar" (lima hari) diberi nama Dorojatun. Pemberian nama itu oleh orang tuanya diharapkan agar dikemudian hari Dorojatun memiliki derajat yang tinggi, dapat mengemban kedudukan yang luhur, dan selalu memiliki budi pekerti yang baik, walau memegang kekuasaan yang besar. Nama ini ternyata memenuhi harapan orang tuanya karena ternyata sebelum Dorojatun berusia 3 tahun ayahnya diangkat menjadi Kanjeng Gusti Pangeran Adipati Anom untuk kemudian dinobatkan menjadi Sultan Hamengku Buwono VIII.²

Demikian pula, pada gilirannya Dorojatun diangkat menjadi "Pangeran Adipati Anom Hamengku Negara Sudibya Raja Putra

Nirendra ing Mataram" dan dinobatkan menjadi "Sampeyan Dalem Ingkang Sinuwun Kanjeng Sultan Hamengku Buwono Senopati Ingalogo Ngabdurrahman Sayidin Panatagama Kalifatullah IX". Gelar ini memiliki arti bahwa Sultan adalah penguasa di dunia, dan juga Senopati Ing Ngalogo yang memiliki arti bahwa Sultan mempunyai kekuasaan dalam menentukan perdamaian atau peperangan dan panglima angkatan perang pada saat terjadi peperangan. Di samping itu, Sultan adalah Abdurrahman Sayidin Panatagama yang berarti penata agama sebab Sultan diakui sebagai Kalifatullah yang menjadi pengganti Nabi Muhammad SAW.³ Dengan demikian, Sultan memiliki anugerah dari Tuhan untuk memegang kerajaan dan memiliki kekuasaan militer, politik, dan agama yang absolut.

Demikian pula, nama ini sesuai dengan pelakunya karena Dorojatun yang mungil dengan senyuman yang lucu dikemudian hari ternyata menjadi seorang pahlawan yang berjiwa besar dalam perjuangan melawan penjajah.

Pada masa kecil, Dorojatun hidup bersama-sama Ayah, Ibu dan saudara-saudaranya di Purubayan dalam suasana yang bahagia, tetapi tidak lama sebelum Dorojatun melampaui usia balita, kedua orang tuanya berpisah. Ibu Dorojatun, Raden Ayu Adipati Anom dipulangkan kembali ke rumah, orang tuanya K.G.P.A. Mangkubumi. Dengan demikian, putri yang malang ini berpisah dari suami dan putranya, meskipun tetap memegang kedudukan sebagai garwo padmi hingga akhir hidupnya.⁴

Sebelum cukup umur untuk mengikuti sekolah Dorojatun belajar pada Juffrouw Willer memasuki sekolah *frobel* (Taman Kanak-Kanak) di Bintaran Kidul. Setelah Dorojatun berumur empat tahun, oleh ayahnya dipindahkan untuk dipondokkan pada keluarga Mulder, seorang kepala sekolah pada *Neutrale Hollands Javaanse Jongens School*. Selanjutnya masuk sekolah *1 Ste Europeesche Lagene School B* terletak di sebelah selatan Loji, di *Kampementstraat* (sekarang bernama Jalan P. Senopati). Di sekolahan ini Dorojatun tidak menyelesaikan sekolahnya dan pindah di sekolah *Neutrale Hollands Javaanse Jongens School*.⁵ Dengan demikian, Dorojatun sekecil itu

sudah harus berpisah dari ayahnya, belaian kasih ibunya, dan perawatan dari keluarga dekatnya. Sudah sewajarnya kalau ia terkadang menangis, terutama sepulang dari rumah dan harus pulang sehingga para kerabat Keraton menuduh Hamengku Buwono VIII bersifat kejam. Di sinilah nampak pilihan Sultan dalam memberikan pendidikan kepada putra-putranya yang didasarkan pada pertimbangan pikiran yang progresif untuk memajukan pendidikan putra-putranya.

Keputusan Hamengku Buwono VIII ini sungguh mencengangkan baik para kerabat Keraton maupun masyarakat feodal yang masih memegang tradisi kuat dalam berinteraksi dengan masyarakat. Mengapa putra-putranya harus hidup di luar Keraton dan diasuh oleh orang Belanda? Apakah hal ini tidak akan menciptakan sikap putra-putranya menjadi "kebelanda-belandaan".

Pilihan Hamengku Buwono VIII dalam memberikan pendidikan putra-putranya hidup penuh dengan sanjungan dan pemanjaan di dalam keraton itu dipandang akan tidak menguntungkan bagi kemajuan putra-putranya. Adapun pilihan Hamengku Buwono VIII mengenai pemberian pendidikan putera-puteranya di luar keraton diharapkan putra-putranya dididik secara sederhana, tidak diistimewakan, hidup secara disiplin, dan agar berani menghadapi tantangan hidup yang membutuhkan banyak perjuangan. Oleh karena itu, putera-puteranya dititipkan pada kenalannya dari keluarga Belanda.⁶

Dengan dititipkannya pada keluarga Mulder, Dorojatun menjadi anggota keluarga Mulder. Selanjutnya ia diberi nama panggilan Henkie yang berarti Henk yang kecil. Nama ini diambil dari nama Hendrik yaitu nama Pangeran Hendrik suami Ratu Wilhelmina dari Negeri Belanda. Selanjutnya nama ini dipakai pada waktu sekolah dan ketika kuliah di perguruan tinggi bahkan setelah selesai kuliah khususnya bagi teman-teman dekatnya.⁷

2.2 Masa Remaja dan Pendidikannya

Dorojaton mengenal pendidikan yang pertama kali ketika dimasukinya sekolah *frobel* (taman kanak-kanak) di Bintaran Kidul. Sekolah frobel ini milik Juffrouw Willer. Dorojatun berangkat dan pulang sekolah dari rumah pondokannya pada keluarga Mulder di

Gondokusumah ke sekolahannya di Bintaran Kidul diantar dan dijemput kereta berkuda milik Keraton.

Setelah Dorojatun berumur enam tahun, disekolahkan dasar "*Eerste Europeese Lagere School B*" atau dikenal dengan nama "*Eerste School B*" atau "*Een B*" yang dalam Bahasa Jawanya dikenal dengan "Sekolah Kidul Ngloji". Sekolah dasar itu terletak di Kampementstraat atau Jalan Panambahan Senopati. Sekolah "*Een B*" dianggap sekolahan terbaik nomor satu pada waktu itu karena sebenarnya didirikan untuk anak-anak orang Eropa yang tidak boleh dimasuki oleh anak-anak bumi putra. Bagi bangsa Indonesia untuk memasuki sekolahan "*Een B*" ada persyaratan tertentu yang harus dipenuhi seperti adanya ketentuan asal usul jabatan, dan kekayaan orang tuanya. Oleh karena, Dorojatun adalah putera seorang Sultan yang memiliki kekuasaan yang tinggi di Yogyakarta, sehingga ia diterima di sekolahan "*Een B*". Dengan demikian, kondisi semacam ini menunjukkan adanya diskriminasi dalam masyarakat antara orang-orang Eropa dengan masyarakat pribumi, sehingga menyebabkan timbulnya kesadaran akan ketidaksetaraan hal-hal yang dimiliki dan keadaannya yang terjajah. Untuk selanjutnya muncul keinginan untuk maju dan kebutuhan akan pendidikan, bahkan muncul kesadaran untuk menentang penjajah.⁸

Di sekolah "*Een B*" ini terdapat perbedaan perlakuan antara anak golongan kulit putih dan anak orang pribumi. Perbedaan dalam bidang keadilan atau peraturan-peraturan sering terjadi sebagaimana misalnya perlakuan terhadap anak golongan kulit putih lebih diistimewakan dari pada terhadap anak orang pribumi : Dengan demikian, disekolahan ini perlakuan antara anak golongan kulit putih dan anak orang pribumi didasarkan pada diskriminasi ras. Situasi demikian itu, disadari oleh Dorojatun yang kelak berhasil menerobos diskriminasi tersebut melalui perjuangan-perjuangannya dalam memerdekakan bangsa Indonesia.

Sebelum menyelesaikan pendidikan dasarnya disekolahan "*Een B*", Dorojatun pindah ke *Neutrale Eurppeese Lagere School* di jalan Pakem yang selanjutnya disebut jalan Kaliurang. Oleh karena itu, ia pindah tempat kostnya dari keluarga Mulder ke rumah keluarga Cook. Di sekolahan ini, Dorojatun sejak kelas 3 ikut dalam klub kepanduan *Nederland Indische Padvindes Club* (NIPV).⁹

Sebagaimana anak-anak sekolah pada umumnya, kenakalan juga ada dalam dirinya. Oleh karena kenakalannya itu, ia sering distrap (dihukum) oleh gurunya. Sebagaimana anak-anak pada umumnya ia memperlihatkan keberanian dengan sikapnya yang suka berkelahi dengan teman-temannya. Rupanya sifat-sifat pada masa kanak-kanaknya yang bandel dan petualang ini terbawa hingga dewasa. Sifat-sifat pembawaan masa kanak-kanak itu nampak pada sikap Dorojatun yang berani menghadapi penjajah.

Pada masa mengenyam pendidikan dasar, Dorojatun selain memiliki hobi ikut dalam klub kepanduan juga senang sepeda dan sepakbola. Kesenangan pada cabang olah raga ini tetap melekat, meskipun telah menjadi mahasiswa di negeri Belanda, bahkan setelah pulang ke Indonesia tetap memiliki perhatian pada cabang olah raga, sehingga pernah diangkat menjadi ketua KONI.

Umur 13 tahun Dorojatun lulus dari *Neutrale Europese Lagere School* di Jalan Pakem dan kemudian melanjutkan sekolah ke sebuah HBS di Semarang. Ia di pondokkan pada keluarga Tj Voskuil di Karrenweg 64, Semarang. Akan tetapi, iklim yang terlalu panas dan tidak memungkinkan bagi kesehatan Dorojatun, maka ayahnya memutuskan untuk mengambil anaknya dan pada 28 September 1927 mengirim surat kepada Tj. Voskuil seorang kepala penjara Mlaten untuk mengucapkan terima kasihnya atas perawatan puteranya dengan baik.¹⁰

Selanjutnya Dorojatun dikirim ke Bandung dan dititipkan pada keluarga De Boer dan sekolah di *Hogere Burger School* (HBS). Setelah menyelesaikan studinya di HBS, ayahnya memerintahkan agar melanjutkan studinya di negeri Belanda dan pada bulan Maret 1930 Dorojatun bersama kakaknya yang bernama B.R.M. Tinggarto dan ditemani keluarga Hofland seorang administrateur pabrik gula Gesikan di Yogyakarta menuju Holland. Di Belanda ia memasuki sekolah gymnasium di Haarlem. Ia bertempat tinggal pada keluarga Ir. W.C.G.H Van Mourik Broekman seorang direktur sekolah HBS itu. Di sekolah ini Dorojatun menamatkan pendidikannya pada tahun 1934.¹¹

Setelah menamatkan pendidikannya untuk tingkat Sekolah Menengah Atas Dorojatun alias Henkie melanjutkan kuliah di *Rijksuniversiteit* yaitu suatu universitas yang terkemuka dan berdiri pertama kali di kota Leiden. Ia mengambil jurusan Indologi yaitu jurusan yang merupakan gabungan dari bidang ekonomi dan hukum.

Selama di negeri Belanda Dorojatun selain studi di jurusan Indologi, ia juga menjadi anggota *Leidee Studentencorps* yang masuknya diseleksi dan harus memenuhi syarat yang ketat serta lebih dulu harus mengikuti *ontgroening* atau perpeloncoan. Di samping itu, ia juga menjadi anggota organisasi *Vepeenigde Faculteiten* dan pernah menjabat sebagai ketua organisasi. Adapun di organisasi mahasiswa yang terkenal dengan nama organisasi *Minerva* ia juga pernah menjabat sebagai *Commissaris Studenten Societelt* (komisaris) pada organisasi itu. Ia mengikuti berbagai organisasi kemahasiswaan ini dengan tujuan agar memiliki wawasan yang luas mengenai ilmu pengetahuan dan aplikasinya.¹²

Selama menjadi mahasiswa di Rijksuniversiteit di Kota Leiden, Dorojatun aktif mengikuti diskusi yang dipimpin oleh Prof. Schrieke. Kondisi ini membuat kehidupannya sebagai mahasiswa yang lebih maju di Negara Barat, memiliki pengalaman yang dapat memperluas cakrawala berpikirnya. Keaktifannya dalam menempuh studi dan mengikuti diskusi-diskusi mengantarkan Dorojatun meraih gelar dalam *Candidaats-examen* pada tahun 1937, dan selanjutnya ia dapat melanjutkan studinya pada tingkat doktoral.

2.3 Suksesi di Kraton Ngayogyakarta, Dorojatun Diangkat Menjadi Sultan Hamengku Buwono IX

Sejak Hitler menyerbu Polandia, maka situasi dunia memburuk hingga pecahlah Perang Dunia II. Kondisi seperti ini menyebabkan peperangan yang terjadi dimana-mana. Oleh karena itu, pada bulan Oktober 1939 Sultan Hamengku Buwono VIII yang akhir-akhir ini kesehatannya terganggu memerintahkan Dorojatun yang sedang menempuh pendidikan doktoralnya di Holland agar segera pulang.¹³

Pada 18 Oktober 1939, Dorojatun pulang ke Tanah Air sebelum menyelesaikan studinya yang hanya tinggal menyusun skripsinya

dengan menumpang kapal "Dempo" yaitu sebuah kapal pengangkut barang yang menempuh perjalanan beberapa minggu dari negeri Belanda ke Tanjung Priok di Jakarta. Keadaan ini disebabkan adanya Perang Dunia II, sehingga kapal harus berlayar melalui pantai Barat Afrika dan Tanjung Harapan di Ujung Selatan benua, yang semestinya kapal melewati L. Tengah dan Terusan Suez.¹⁴

Setelah tiba di Tanjung Priok, Dorojatun dijemput oleh keluarganya dengan penuh hormat dan formal. Penggunaan bahasa Jawa "Krama Inggil" antara Dorojatun dengan sambutan keluarganya membuat suasana nampak kaku. Demikian Pula, sikap adik-adiknya dan saudara-saudaranya yang penuh hormat dan menyembah membuat Dorojatun terkejut karena nampak ada perubahan. Sebelum kepergiannya ke negeri Belanda, ia bersama adik-adik dan saudara-saudaranya suka bercanda dan bermain dengan akrab, tetapi sepulang dari Belanda suasana berubah menjadi sangat formal. Semua ini karena atas keinginan Sultan Hamengku Buwono VIII, maka saudara dan adik-adiknya hanya mengikuti perintah.¹⁵

Mereka selanjutnya menuju ke Hotel "*Dex Index*" (yang sekarang tempat ini menjadi pusat pertokoan Duta Merlin). Di hotel ini tidak ada perbincangan yang penting antara Sultan Hamengku Buwono VIII dengan Dorojatun karena kesibukan Sultan menghadiri beberapa acara resmi yang harus dipenuhi di pusat pemerintahan kolonial khususnya. Oleh karena kesibukan yang melelahkan itu menyebabkan kesehatannya semakin terganggu. Meskipun pertemuan antara Sultan dengan Dorojatun tidak ada pembicaraan penting karena tidak adanya kesempatan, tetapi di hotel ini ada peristiwa penting yang sangat diingat Dorojatun yaitu penyerahan Keris Pusaka Keraton "Kyai Jaka Piturun" oleh Sultan Hamengku Buwono VIII kepada Dorojatun yaitu puteranya dari permaisuri. Peristiwa yang bersejarah ini menunjukkan keinginan Sultan agar Dorojatun menjadi Putera Mahkota.¹⁶

Demikian awal sebuah suksesi di keraton Yogyakarta karena sebuah keris pusaka keraton "Kiai Jaka Piturun" yang selalu diberikan oleh Sultan kepada seseorang yang diinginkan sebagai penggantinya. Pada saat itu, Hamengku Buwono VIII telah memiliki

intuisi bahwa waktunya sudah dekat dan penyakit diabetesnya telah menjadi akut.

Hari ketiga setelah kedatangan Dorojatun, keluarga Sultan Hamengku Buwono VIII beserta pengiringnya pulang ke Yogyakarta dengan menumpang kereta api *Eenadagze* yaitu kereta api cepat pada saat itu yang berangkat dari stasiun Gambir. Di perjalanan Sultan jatuh pingsan sebelum kereta mencapai kota Cirebon. Setelah tiba di kota Kerawang melalui telpon memanggil dokter pribadi Sultan yang bernama Dokter Royen. Di kota Kroya Dokter Royen baru dapat melakukan pengobatan darurat dan setelah tiba di Yogyakarta mendapat pertolongan dari Dokter Westerkamp, kemudian Sultan di bawa ke rumah sakit "*Onder de Bogen*" yang sekarang dikenal dengan nama R.S. Panti Rapih di Jl. Cik Di Tiro. Akan tetapi, para dokter tidak dapat menolong karena Sultan sudah sangat parah penyakitnya, dan esok harinya pada hari Minggu Kliwon 22 Oktober 1939 telah meninggal dunia.¹⁷

Sepeninggal Sultan Hamengku Buwono VIII, kekuasaan Keraton Yogyakarta diambil alih oleh Gubernur Dr. Lucien Adam agar tidak terjadi kevakuman kekuasaan. Selanjutnya Gubernur Adam membentuk panitia yang memiliki tugas mengorganisasi pemerintahan Keraton. Panitia itu memiliki 5 anggota yang diketuai Dorojatun. Pada saat itu Dorojatun berusia 27 tahun yaitu usia yang paling muda di antara paman dan saudara-saudaranya, dan ia belum memiliki gelar pangeran sebagaimana lainnya. Kelima anggota tersebut adalah G.R.M. Dorojatun yang menjabat sebagai ketua, sedangkan anggotanya terdiri dari : G.P.H. Mangkukusumo (paman HB IX), G.P.H. Tejukusumo (paman HB IX), Pangeran Hangabehi dan Puruboyo (kakak HB IX). Dorojatun dipilih sebagai ketua panitia karena sesuai dengan keinginan Hamengku Buwono VIII agar Dorojatun menggantikan kedudukannya sebagai Sultan. Hal ini tercermin melalui penyerahan keris pusaka "Kiai Jaka Piturun" oleh Hamengku Buwono VIII kepada Dorojatun.¹⁸

Meskipun Hamengku Buwono VIII menghendaki agar Dorojatun yang menggantikan kelak, tetapi suksesi untuk tampil menjadi raja menemui beberapa hambatan. Hambatan itu bukan berasal dari

kalangan internal kerabat keraton, tetapi hambatan yang muncul merupakan hambatan eksternal yaitu dari pemerintah Kolonial Hindia Belanda. Hambatan eksternal itu disebabkan adanya latar belakang sejarah sejak jaman kerajaan Mataram.

Pada masa Kerajaan Mataram ada di bawah Sultan Agung wilayah kekuasaan diperluas hingga ke Jawa Timur dan Jawa Barat, tetapi usahanya untuk menundukkan kompeni (VOC) tidak berhasil. Bahkan pada masa pemerintahan pengganti-pengganti Sultan Agung, Kompeni berhasil menguasai wilayah Mataram yang semua disewa, tetapi selanjutnya diserahkan pada Kompeni oleh Sultan karena bantuannya dalam menghapuskan pemberontakan atau memenangkan dalam memperebutkan tahta. Oleh karena itu, kedudukan kompeni di Batavia memiliki kekuasaan yang sejajar dengan Mataram, sehingga dalam menghadapi masalah Raja Mataram meminta bantuan Kompeni. Keterlibatan Mataram dalam berbagai konflik intern menjadikan Sunan Paku Buwono semakin tergantung kepada Pemerintah Hindia Belanda. Demikian pula, pemberontakan orang Cina di Batavia hingga ke Kartasura diatasi dengan meminta bantuan Kompeni, sehingga pemberontakan itu dapat diatasi dan kedudukan Sunan Paku Buwono dipulihkan kembali. Adapun Kerajaan dipindahkan dari Kartasura ke Surakarta. Permintaan bantuan dalam mengatasi pemberontakan dan perang saudara yang terjadi secara terus-menerus itu memberi kesempatan kepada Kompeni untuk meminta hak-hak politiknya melalui kontrak politik yang dibuat oleh mereka.¹⁹

Adanya perang saudara yang terjadi itu menyebabkan diadakan Perjanjian Ganti pada 15 Pebruari 1755 yang membagi Mataram menjadi dua yaitu Kasultanan Yogyakarta dan Daerah Swapraja Mangkunegaran pada tahun 1757. Perjanjian ini muncul karena pada tahun 1749 telah ada perjanjian yang memiliki akibat buruk bagi Mataram, ketika Paku Buwono II dalam kondisi tidak sehat menyerahkan kerajaan Mataram dan mempercayakan putera mahkotanya kepada VOC. Sejak itu kerajaan Mataram tergantung pada Pemerintah Hindia Belanda dalam urusan suksesi kepemimpinan.²⁰

Meskipun Kerajaan Mataram dalam urusan suksesi kepemimpinan tergantung pada Pemerintah Hindia Belanda, tetapi sejak Hamengku

Buwono I naik tahta, dia berusaha menghindari campur tangan dari Pemerintah Hindia Belanda, sehingga menimbulkan konflik dengan pejabat-pejabat Belanda yang berkedudukan di Yogyakarta. Hal ini dimaksudkan agar segala urusan keraton tidak dicampuri oleh Pemerintah Hindia Belanda, sehingga kontrak politik yang selalu diadakan ketika suksesi kepemimpinan Sultan dan Sunan dihapus. Pada dasarnya kontrak politik yang selama ini dilakukan antara Raja Mataram dan Pemerintah Hindia Belanda telah dimanfaatkan oleh Pemerintah Hindia Belanda untuk memperluas kekuasaannya.²¹

Sebelum diadakan penobatan Sultan yang baru, Gubernur L. Adam atas perintah Gubernur Jendral Hindia Belanda melakukan pendekatan terhadap Dorojatun. Pendekatan itu dimaksudkan untuk menyelidiki watak, cara berpikir, dan perilaku Dorojatun, sehingga akan memudahkan untuk berkomunikasi dan mengadakan kontrak politik. Pendekatan yang dilakukan oleh Gubernur itu kadangkala menggunakan cara penekanan, dengan harapan agar Dorojatun segera menyetujui rencana dan peraturan-peraturan Pemerintah Hindia Belanda dalam penyusunan kontrak politik yang baru.²²

Meskipun Pemerintah Hindia Belanda telah mengadakan pendekatan terhadap Dorojatun, tetapi Gubernur L. Adam menemui kesulitan dalam memutuskan kontrak politik yang diadakan dengan Dorojatun. Perundingan untuk memutuskan kontrak politik yang diadakan Dorojatun dengan Gubernur Lucien Adam mengalami jalan buntu hingga empat bulan berjalan tidak ada hasilnya. Kematangan cara berpikir Dorojatun dalam memperhitungkan kontrak politik ternyata tidak dapat dianggap ringan oleh Gubernur Lucien Adam. Oleh karena itu, Pemerintah Hindia Belanda mempengaruhi K.P.A.A Danurejo VIII yang pada saat itu menjabat sebagai "Pepatih Dalem" untuk menundukkan Dorojatun agar perundingan segera dapat diselesaikan. Akan tetapi, keteguhan hati dan kegigihan Dorojatun yang tidak menginginkan campur tangan Pemerintah Hindia Belanda dalam masalah-masalah yang berkaitan dengan keraton membuat pengaruh pepatih dalem tidak berhasil dan perundingan masih tetap berjalan dengan berlarut-larut.²³

Kematangan berpikir Dorojatun dalam memutuskan kontrak politik dan usaha untuk mengubah struktur sosial yang terjadi di

Yogyakarta khususnya, tidak lepas dari pengaruh pendidikannya dalam tradisi Ilmu-ilmu Sosial yang dipelajarinya di Universitas Leiden pada tahun 1934-1939. Dorojatun tentu mengenal teori-teori perubahan sosial yang memiliki kerangka berpikir sesuai dengan kasus di Negara Barat. Di samping itu, Dorojatun mempelajari pula mengenai teori-teori kekuasaan yang melihat hubungan antara penguasa dan yang dikuasai. Selain itu, Dorojatun mempelajari masalah Antropologi yang mempelajari budaya masyarakat di tanah jajahan untuk kepentingan kekuasaan kolonial, sehingga dengan politik "*divide et impera*"nya berhasil menguasai tanah jajahan. Di Fakultas Indologi, Dorojatun belajar mengenai Administrasi Pemerintahan yang berwawasan keadilan hukum dan masalah ekonomi yang berwawasan mengenai perbaikan kemakmuran masyarakat.

Berangkat dari ilmu yang dimilikinya yang ditempuh selama di negeri Belanda, Dorojatun berusaha untuk menata masyarakat melalui pranata sosial yang ada, khususnya sistem administrasi pemerintahan yang mengatur hubungan antara negara dan rakyatnya. Keinginan untuk menata masyarakat Yogyakarta itu juga disebabkan oleh adanya semangat nasional (*national spirit*) yang dimilikinya dan juga karena adanya dukungan baik dari masyarakat Yogyakarta maupun dari keluarga keraton. Oleh karena itu, dapat dipahami mengapa perundingan antara Dorojatun yang akan naik tahta dengan Gubernur Lucien Adam berjalan dengan berlarut-larut yang seharusnya ditandatangani pada bulan November 1939, baru ditandatangani bulan Februari 1940.²⁴

Perundingan antara Dorojatun yang akan naik tahta dengan Gubernur Lucien Adam yang berlarut-larut itu disebabkan oleh tiga hal yaitu : pertama, masalah kedudukan dan peranan Papatih Dalem yang memiliki dwifungsi dan dwiloyalitas terhadap Pemerintah Hindia Belanda dan pegawai kasultanan oleh Dorojatun ingin dirubah keduduknya dan peranannya menjadi pegawai kesultanan yang memiliki monofungsi dan monoloyalitas hanya kepada Sultan. Kedua, masalah Dewan Penasehat Kesultanan yang selama ini separuh anggotanya diusulkan oleh Pemerintah Hindia Belanda dan separuhnya lagi oleh Sultan, sedangkan pengangkatannya harus disetujui oleh Pemerintah Hindia Belanda, ditolak oleh Dorojatun. Menurut

Dorojaton prosedur pemilihan semacam itu membatasi kebebasan suara Dewan Penasehat sehingga tidak akan mewakili kepentingan rakyat. Ketiga, masalah prajurit keraton yang diinginkan Pemerintah Hindia Belanda menjadi satu legiun yang secara hirarkis-struktural berada dibawah komando KNIL, tetapi Dorojaton tidak memiliki wewenang untuk memerintah, sedangkan Dorojaton harus menggaji dan melatihnya. Hal ini jelas ditolak karena Dorojaton menginginkan prajurit keraton yang digaji dan dilatihnya berada di bawah komando Sultan.²⁵

Perundingan antara Gubernur L. Adam dan Dorojaton menjelang suksesi untuk tampil menjadi Raja yang berlarut-larut itu ternyata disadari oleh Dorojaton bahwa Pemerintah Hindia Belanda akan terus menjajah Sultan dan rakyatnya. Sultan hanya memiliki peran di dalam birokrasi pemerintahan Keraton dan tidak memiliki peranan penting dalam pemerintahan di seluruh wilayah kekuasaannya yang selalu diawasi oleh Gubernur Belanda melalui Papatih Dalem. Kesadaran inilah yang memunculkan semangat perjuangan menentang penjajah dan tujuan agar Sultan dapat mengambil peran dalam mengadakan transformasi birokrasi pemerintahan di Yogyakarta demi kepentingan rakyatnya dan dapat memegang kewibawaan dan kekuasaan yang utuh.²⁶

Keinginan Sultan untuk merombak birokrasi kesultanan dan keinginannya untuk mengubah struktur masyarakat Yogyakarta mendapat hambatan dari Pemerintah Hindia Belanda. Gubernur Lucien Adam yang memiliki perbedaan pendapat dengan Dorojaton tidak menghasilkan kesepakatan dalam memutuskan kontrak politik, sehingga menghambat rencana Dorojaton untuk merombak masyarakat. Pada Februari 1940 kontrak politik yang dibuat oleh pemerintah Hindia Belanda ditandatangani, karena Sultan berpendapat bahwa Pemerintah Hindia Belanda akan segera berakhir.²⁷

Kontrak politik yang berlangsung secara berlarut-larut antara Pemerintah Hindia Belanda dengan Sultan menunjukkan kemampuan Sultan mengadakan perundingan dengan Gubernur Hindia Belanda untuk yang pertama kali. Penguasaan terhadap Bahasa Belanda dan latar belakang pendidikannya menyebabkan Sultan mengetahui dengan

sebenarnya apa isi kontrak politik yang dibuat oleh Pemerintah Hindia Belanda. Meskipun Sultan pada akhirnya menandatangani kontrak politik itu, tetapi pada dasarnya Sultan tidak menyetujui isi kontrak itu.

Pada 12 Maret 1940 setelah kontrak politik ditandatangani Dorojatun, maka pada 18 Maret 1940 bertepatan dengan tanggal Jawa 8 Sapar tahun Dal 1871 pemerintah Hindia Belanda yang diwakili Gubernur L. Adam menobatkan G.R.M. Dorojatun menjadi putera mahkota dengan gelar "Pangerah Adipati Anom Hamengku Negara Sudibja Radya Putera Narendra Mataram" dan selanjutnya pada hari yang sama putera mahkota baru itu dinobatkan sebagai Sultan Yogyakarta dengan gelar "Sampeyan Dalem Ingkang Sinuwun Kandjeng Sultan Hamengku Buwono Senopati Ingalaga Ngabdurrakhman Sayidin Panatagama Kalifatullah Kaping IX". Di bangsal Manguntur Tangkil inilah suksesi kesultanan Yogyakarta beralangsung.²⁸

Pada pidato penobatan itu, Sultan Hamengku Buwono IX mengatakan bahwa :²⁹

"...Sepenuhnya saya menyadari bahwa tugas yang ada dipundak saya adalah sulit dan berat, terlebih-lebih karena ini menyangkut mempertemukan jiwa Barat dan Timur agar dapat bekerja sama dalam suasana harmonis, tanpa yang Timur harus kehilangan kepribadiannya. Walaupun saya telah mengenyam pendidikan Barat yang sebenarnya, pertama-tama saya adalah dan tetap orang Jawa. Maka selama tak menghambat kemajuan, adat akan tetap menduduki tempat yang utama dalam Kraton yang kaya akan tradisi ini Izinkanlah saya mengakhiri pidato saya ini dengan berjanji, semoga saya dapat bekerja untuk memenuhi kepentingan Nusa dan Bangsa, sebatas pengetahuan dan kemampuan yang ada pada saya".

Isi pidato ini menunjukkan Sultan tetap memegang Budaya Jawa, meskipun Sultan telah lama mengenyam studi di Negara Barat. Budaya Jawa yang dimaksud adalah Budaya Indonesia dan bukan memiliki arti watak Jawa atau sistem Feodal. Sultan tetap memiliki sifat yang demokratis dan berpikiran maju, tetapi ia tetap menghormati tradisi para leluhurnya meskipun beberapa kebiasaan lama yang tidak pantas dihapus atau diluruskan.

Sebagai pewaris Budaya Jawa, Sultan tidak ingin menghapuskan kepercayaan masyarakat yang memiliki daya magis, meskipun pengertian kepercayaan itu yang telah menjadi tradisi masyarakat mengalami perubahan. Tradisi Labuhan yang selalu diselenggarakan pada waktu upacara memperingati hari penobatan Sultan masih tetap berlangsung. Tradisi Labuhan dilakukan dengan membuang sesaji untuk Nyi Roro Kidul yang menurut kepercayaan sebagai istri para Raja Jawa masih tetap berjalan, hanya saja pengertian dari tradisi labuhan telah mengalami transformasi yaitu setelah Sultan Hamengku Buwono IX naik tahta, pengertian membuang sesaji dimaksudkan untuk memperingati naik tahtanya Sultan dan mengucapkan rasa Syukur atas kenikmatan dan karunia yang diberikan kepada Allah SWT.³⁰

Selain dalam pidato itu tercermin sikap Sultan yang tetap akan memegang Budaya Jawa, juga tercermin pula sikap Sultan yang memiliki jiwa yang kuat untuk membaktikan dirinya demi kepentingan nusa dan bangsa.

2.4 Sultan Hamengku Buwono IX Pada Masa Pendudukan Jepang

Sultan Hamengku Buwono IX sebagai seorang Raja Jawa, ia dapat bersikap tanggap terhadap situasi yang terjadi di sekitarnya. Ketika Perang Dunia kedua semakin berkecamuk dan pada 10 Mei 1940 tentara Nazi menduduki seluruh wilayah Negeri Belanda, orang-orang Belanda yang bertempat tinggal di Yogyakarta berusaha mempengaruhi Sultan dan penduduk pribumi agar membantu jika perang melanda Hindia Belanda. Kondisi ini disusul dengan serangan Jepang terhadap Amerika Serikat melalui pemboman Pearl Harbour yaitu pangkalan Angkatan Laut Amerika Serikat yang terbesar di Pasifik yang selanjutnya Gubernur Jendral Tjarda Van Starkenborgh Stachouwer menyatakan perang terhadap Jepang. Menghadapi kondisi semacam ini, Sultan Hamengku Buwono IX bertindak secara kritis dalam menentukan ajakan pemerintah Hindia Belanda untuk menyingkir ke Australia dan ketika pemerintah militer Jepang menduduki Yogyakarta, Sultan Hamengku Buwono IX memanfaatkan

kesempatan ini untuk mengadakan perombakan masyarakat baik di bidang sosial, politik, ekonomi, dan budaya.

Bersama dengan Gubernur Jendral Tjarda van Starkenborgh, Gubernur Yogyakarta yang bernama L. Adam dan Ch.O.van der Plas seorang anggota Raad van Indie merundingkan tindakan yang perlu dilakukan jika Pemerintahan Militer Jepang memasuki wilayah Hindia Belanda. Dalam pertemuan ini mereka memutuskan pertama, mengajak empat kepala kerajaan di Jawa Tengah yaitu Paku Alam, Mangkunegoro dan terutama Sultan Hamengku Buwono IX serta Susuhunan dari Surakarta agar ikut dengan Belanda menyingkir ke Australia jika Pemerintahan Militer Jepang menyerang Hindia Belanda. Ajakan Pemerintah Hindia Belanda terhadap keempat Raja di Jawa Tengah ini sebenarnya hanya merupakan siasat mereka untuk menahan mereka dalam usahanya untuk mempertahankan Wilayah Hindia Belanda. Kedua, mereka memutuskan bahwa Kota Bandung akan dijadikan sebagai benteng pertahanan.³¹

Sultan Hamengku Buwono IX sebagai seorang pemimpin lokal yang berwawasan nasional dan internasional menolak ajakan pemerintah Hindia Belanda agar menyingkir ke Australia, jika Pemerintahan Militer Jepang menyerang Hindia Belanda. Sultan tidak akan meninggalkan kota Yogyakarta meskipun dalam keadaan bahaya yang memuncak demi untuk mempertahankan keselamatan keraton dan rakyatnya. Dengan demikian, Pemerintah Hindia Belanda gagal untuk menarik Sultan dipihaknya, sehingga ketika komando Angkatan Perang Jepang menghancurkan benteng pertahanan Pemerintah Hindia Belanda di kota Bandung dan menyerang serta menduduki Hindia Belanda. Pemerintah Hindia Belanda menyerah tanpa syarat dan menarik Angkatan Bersenjataanya untuk menuju ke Pelabuhan Cilacap, kemudian meneruskan perjalanannya ke Australia.³²

Setelah Pemerintah Hindia Belanda menyerah pada Pemerintahan Militer Jepang, maka Jepang berusaha untuk menduduki dan menguasai Wilayah Indonesia. Sesuai dengan dekrit no. 1 tertanggal 7 Maret 1942 tentang berlangsungnya Pemerintahan Militer Jepang di daerah yang ditempatinya, menunjukkan adanya Pemerintahan Militer Jepang yang formal di P. Jawa. Selain itu, dalam dekrit memuat

peraturan bahwa bala tentara Jepang memegang kekuasaan pemerintah militer tertinggi yang juga meliputi segala kekuasaan yang dahulu berada di tangan Gubernur Jendral. Dengan demikian, Jabatan Gubernur Jendral pada masa pemerintahan Hindia Belanda dihapuskan dan segala kekuasaan yang dahulu di tangan Gubernur Jendral pada jaman pemerintahan militer Jepang dipegang oleh pembesar bala tentara Jepang.³³

Pada 8 Agustus 1942 pemerintah militer Jepang membentuk 17 daerah pemerintahan tertinggi di Pulau Jawa yaitu Syu yang merupakan pemerintahan daerah berotonomi di bawah pimpinan *Syucokan*. Kedudukan Syu sama dengan seorang Gubernur, meskipun daerah kekuasaannya sama luas dengan daerah kekuasaan residen. Tugas sehari-hari untuk Yogyakarta yang saat itu dinyatakan sebagai pusat dari organisasi pemerintahan militer di Jawa Tengah diserahkan kepada Dr. L. Adam. Di samping Syu, dibentuk dua daerah istimewa Yogyakarta dan Surakarta yang disebut dengan *Koci*.³⁴

Sultan telah mengetahui bahwa pemerintah militer Jepang tidak berbeda dengan pemerintah Kolonial Belanda yang tetap ingin menanamkan kekuasaannya di Indonesia. Kebijakan yang diterapkan Pemerintah Jepang tidak membawa perubahan-perubahan yang berarti baik dalam bidang politik, sosial, ekonomi maupun di bidang struktural lainnya. Kolonialisme Belanda semata-mata hanya digantikan oleh pemerintahan militer Jepang.³⁵ Akan tetapi, Sultan tetap menerima kekuasaan Jepang yang pada 5 Maret 1942 telah menduduki Yogyakarta. Dengan demikian, sebelum pemerintah Hindia Belanda menyerah kepada balatentara Jepang di Kalijati Jawa Barat pada 8 Maret 1942. Keputusan Sultan itu disebabkan Sultan merasa belum memiliki kekuatan untuk menolak kekuatan Jepang. Oleh karena itu, untuk mengimbangi kekuasaan pemerintah Militer Jepang, Sultan harus merumuskan strategi perjuangan kemerdekaan melalui manajemen politik perjuangan kemerdekaan secara terorganisir yang berorientasi pada kepentingan masyarakat. Langkah pertama yang dilakukan Sultan adalah memberitahu kepada tentara pendudukan Jepang Budaya segala sesuatu yang berkaitan dengan daerah kasultanan hendaknya dibicarakan dengan Sri Sultan terlebih dahulu. Selanjutnya Sultan memerintahkan kepada Papatih Dalem

supaya dalam menjalankan tugasnya hanya mendengarkan kepada perintah Sultan.³⁶

Pada masa pemerintahan militer Jepang, setelah pada 1 Agustus 1942 diangkat menjadi Sultan (Koo) Yogyakarta oleh Gunseikan Mayor Jendral Okasaki di Istana Gambir di Jakarta, Sultan mendapat perintah dari pemerintah Militer Jepang untuk mengurus pemerintah kasultanan yang diberi nama *Koti*. Untuk melaksanakan perintah itu, Pemerintah Tentara Pendudukan Jepang di Jawa memberikan petunjuk yang memuat peraturan dasar untuk menjalankan dan memimpin pemerintahan Kasultanan (Koti). Dengan diberikan petunjuk oleh pemerintah Militer Jepang itu, Sultan memiliki kesempatan untuk lebih aktif memerintah secara langsung di daerah wilayahnya. Selanjutnya Sultan memerintahkan kepada semua keluarga Sultan (Sentono Dalem), pegawai keraton (abdidalem) serta kawula dalem supaya meneruskan bekerja di bawah pengawasan dan pimpinan Balatentara Dai Nippon untuk membentuk masyarakat baru di tanah Jawa sebagai salah satu daerah di dalam lingkungan kemakmuran Asia Raya.³⁷

Kesempatan yang baik ini dipergunakan Sultan untuk merintis reorganisasi dan restrukturisasi birokrasi pemerintah daerah Yogyakarta. Dalam mengadakan perubahan birokrasi pemerintahan Yogyakarta, Sultan dijiwai oleh pemikiran yang masih mempertahankan tradisi dan sekaligus menggunakan pemikiran modern. Dengan demikian, Sultan Hamengku Buwono IX dalam menentukan langkah untuk mengadakan transformasi masyarakat Yogyakarta menggunakan pengetahuan modern untuk menyeleksi tradisi yang perlu dipertahankan, diluruskan dan bahkan tradisi yang harus dihilangkan.

Perubahan birokrasi pemerintahan itu dimulai dari dalam keraton sendiri yaitu dengan menggeser kedudukan "Pepatih Dalem" sebagai kepala pemerintahan umum yang berada di bawah koordinasi kasultanan. Selanjutnya Pepatih Dalem diberhentikan dengan hormat pada 1 Agustus 1945. Di samping itu, Sultan berusaha untuk meningkatkan kemampuan administratif tenaga kerja di birokrasi daerah dengan membuka kesempatan bagi mereka untuk mengajukan lamaran kerja di birokrasi kesultanan. Proses ini berlanjut dengan

memberikan latihan dan pendidikan sebelum menjadi pegawai birokrasi kesultanan, kemudian disempurnakan dengan kewajiban bagi pilmam untuk mengikuti ujian dan latihan prajabatan.³⁸

Di dalam menata kembali hubungan kerja antara birokrasi pusat kesultanan dengan pemerintahan di wilayah kekuasaannya, Sultan tidak hanya mengadakan perubahan struktur birokrasi di pusat kesultanan saja, tetapi juga di seluruh wilayah kekuasaannya. Sultan mengusulkan adanya empat lembaga negara dalam struktur organisasi pemerintahan yaitu *pertama*, Sri Maharaja yang memiliki kekuasaan tertinggi menurut Undang-undang Dasar. Sri Maharaja memiliki wewenang membuat peraturan yang telah dimusyawarahkan dengan Balai Perwakilan Negara dan selanjutnya mengesahkannya, memerintahkan untuk mengundang, dan menjalankan peraturan itu. Di samping itu, Sri Maharaja memiliki wewenang pula mengundang, membuka, menutup, dan menunda Balai Perwakilan Negara serta membubarkan Balai Rakyat. *Kedua*, Badan Menteri Negara yang dipimpin oleh Perdana Menteri, mereka diangkat oleh Sri Maharaja dan membantu Sri Maharaja dalam menjalankan pemerintahan, sehingga mereka memiliki tanggung jawab kepada Sri Maharaja. *Ketiga*, Badan Pertimbangan Negara yang memiliki tugas memberikan pertimbangan pada hal-hal penting yang berkaitan dengan kebutuhan negara. Anggotanya sebagian terdiri dari Bangsa Jepang yang diangkat oleh Sri Maharaja dengan persetujuan Pemerintahan Jepang. Keempat, Balai Perwakilan Negara yang terdiri dari Balai Mulia dan Balai Rakyat. Ketua dan anggota Balai Mulia diangkat oleh Sri Maharaja yang dipilih dari keluarganya, para bangsawan, dan mereka yang berjasa kepada negara serta terkenal karena kekayaan, kebijaksanaan, kehormatan, kecerdikan, dan pengalamannya. Adapun ketua Balai Rakyat diangkat Sri Maharaja dan anggotanya dipilih oleh rakyat yang didasarkan Undang-undang Pemilihan. Balai Perwakilan Negara memiliki wewenang mengajukan rencana peraturan, perasaan, keberatan, dan pandangan terhadap peraturan serta hal-hal lainnya. Di samping itu, mereka memiliki wewenang menyetujui semua peraturan yang telah dibuat dan mengajukan pertanyaan, meminta keterangan, memeriksa pemegang keuangan negara serta menerima keberatan-keberatan dari rakyat.³⁹

Sistem birokrasi pemerintahan yang diusulkan oleh Sultan ini menunjukkan adanya perpaduan antara sistem birokrasi pemerintahan yang didasarkan pada tradisi dan birokrasi modern yang didasarkan pada Undang-undang Dasar. Dengan adanya Balai Rakyat menunjukkan pula adanya suara rakyat yang mulai diperhitungkan.

Meskipun sistem birokrasi pemerintahan yang diusulkan oleh Sultan tidak diterima seluruhnya oleh pemerintah militer Jepang, tetapi usulan ini menjadi bahan pertimbangan dalam merumuskan undang-undang tata pemerintahan di Jawa. Piagam yang diberikan oleh pemerintah militer Jepang yang berisi perintah dan petunjuk untuk mengatur wilayah Yogyakarta mengacu pada usulan Sultan, sehingga isi piagam itu memberikan kelonggaran Sultan untuk berperan dalam birokrasi pemerintahan Yogyakarta. Adapun Jepang sendiri memberi kelonggaran Sultan itu agar tujuannya tercapai yaitu rakyat Yogyakarta agar mendukung Sultan untuk berpartisipasi dalam perang Asia Pasifik dan membentuk kemakmuran bersama di Asia Timur Raya.⁴⁰

Setelah Sultan diberi kekuasaan penuh untuk menjalankan birokrasi pemerintahan Yogyakarta oleh pemerintah militer Jepang dan diberi aturan serta petunjuk pelaksanaan, Sultan mulai menentukan langkah-langkah yang tegas. Sultan menghapus Dwikesetiaan Papatih Dalem dan menempatkan Papatih Dalem di bawah perintahnya secara langsung. Selanjutnya dengan surat keputusan Nomor 68 17 Agustus 1942 pegawai-pegawai yang berkebangsaan Belanda diberhentikan dan sebagian kecil masih dipertahankan sebagai penasihat bagi penggantinya, sehingga dengan sendirinya tugasnya dapat dialihkan. Sebagai contoh, J.J Dendulk yang berkedudukan sebagai kepala *Frastistarta* (Dinas Akuntan) diberhentikan dan kedudukannya digantikan B.P.H. Pakuningrat dan K.R.T. Sumodiningrat. Ir. E.G. van der Beek yang menduduki jabatan sebagai ketua *Radya Suyasa* (Pekerjaan Umum) dijadikan penasihat Radja Suyasa dan sebagainya.⁴¹

Sebagaimana ketika pada jaman Pemerintahan Hindia Belanda, dalam mengubah sistem birokrasi pemerintahan di Yogyakarta, Sultan selalu berusaha melepaskan diri dari penjajah. Sultan pertama kali mengambil langkah pada 22 Oktober 1942 menggabung

Parentah Luhur (Sekretaris Pribadi Sultan dalam urusan resmi) dan *Kawedanan Kori* (Penghubung Parentah Hageng Karaton dan Parentah Nagari) menjadi *Kawedanan Kori Baru* dengan ketua B.P.H. Puruboyo. Kawedanan Kori Baru ini mempunyai dua sub bagian yaitu pertama, *Kawedanan Kori* (dulu Parentah Luhur) yang memiliki tugas mengurus surat menyurat antara Sultan dan Nagari serta menyampaikan surat perintah kepada putera-putera Sultan. Selain itu, mereka memiliki tugas mengurus permintaan surat keputusan untuk gelar kebangsawanan. *Kawedanan Kori* ini memiliki fungsi sebagai jembatan untuk mengadakan perubahan birokrasi pemerintahan Kasultanan Yogyakarta. Kedua, *Kawedanan Punakawan Nori* yang memiliki tugas mengurus surat menyurat antara kantor-kantor di dalam karaton dan kantor-kantor nagari, mengembangkan kesusasteraan Jawa, mengurus Dinas Pekabaran Karaton, mengurus taman bacaan karaton dan melayani Pangeranan Lurah.⁴²

Langkah selanjutnya yang dilakukan Sultan pada akhir tahun 1942 adalah menyusun birokrasi pemerintahan dengan pembagian tugas secara horisontal dan vertikal yang kemungkinan dapat diterima oleh pemerintah militer Jepang. Dalam birokrasi pemerintahan itu, Sultan memiliki jabatan tertinggi yang bertanggung jawab kepada *Saiko Sikikan*. Di bawah Sultan terdapat *Nawedanan Kori* yang memiliki tugas menyampaikan perintah Sultan kepada *Pepatih Dalem* yang harus dilaksanakan.

Supaya perintah-perintah Sultan dapat dilaksanakan dengan baik, dibentuk struktur birokrasi pemerintahan yang dikoordinasi Papatih Dalem yang bernama Danureja VIII; Papatih Dalem dalam menjalankan tugasnya dibantu oleh *Agnya Praja* dengan Kepala I adalah K.R.T. Notonegoro dan Kepala II adalah K.R.T. Honggowongso. *Agnya Praja* ini memiliki 8 biro yaitu *Biro Sana Panitra* (Sekretariat), *Biro Bale Wisuck* (urusan Pegawai), *Biro Dhatu Mindawa* (Pemberian Gelar Bangsawan), *Biro Pembikinan Peraturan Negeri*, *Biro Radya Kintaka* (Arsip), *Biro Bumen Banikarti* (Alat-alat kantor), *Biro Sandhi Pura* (Perhubungan Karaton), dan *Biro Nundha Pustaka*.⁴³

Pembagian tugas secara horisontal memiliki 12 bagian yaitu bagian keuangan, bagian pengajaran, bagian pengadilan, bagian

pekerjaan teknik, bagian perusahaan, bagian kesehatan rakyat, bagian urusan tanah, bagian golongan yang berkantor di dalam karaton, bagian yayasan Purbakala, bagian penyuluh pertanian, bagian urusan peternakan, bagian berbagai keperluan sosial.

Adapun pembagian tugas secara vertikal membagi wilayah administratif dari atas ke bawah yaitu pertama, Daerah Istimewa Yogyakarta (Kooti) yang dikepalai oleh Sultan Hamengku Buwono IX membawahi empat kabupaten (Ken) yaitu Kabupaten Yogyakarta, Kabupaten Bantul, Kabupaten Gunungkidul, dan Kabupaten Kulonprogo. Adapun Kabupaten Yogyakarta membawahkan 3 kawedanan (Gun) yaitu Kawedanan Kota yang membawahi 2 asistenan (Son), dan terdiri dari 10 pangreh praja dan 3 kalurahan (AL); Kawedanan Sleman yang terdiri dari 104 kalurahan, dan Kawedanan Kalasan yang membawahkan 6 asistenan dan terdiri dari 84 kalurahan.⁴²

Kabupaten Bantul membawahi 4 kawedanan yaitu *pertama*, Kawedanan Bantul yang membawahi 6 asistenan dan terdiri dari 76 kalurahan, *Kedua*, Kawedanan Kotagede yang membawahi 5 asistenan dan terdiri dari 72 kalurahan, *Ketiga*, Kawedanan Godean membawahi 5 asistenan dan terdiri dari 72 kalurahan, *Keempat*, Kawedanan Pandak membawahi 5 asistenan dan terdiri dari 54 kalurahan. Kabupaten Gunungkidul membawahi 3 kawedanan yaitu *pertama*, Kawedanan Wonosari yang membawahi 4 asistenan dan terdiri dari 58 kalurahan, *Kedua*, Kawedanan Playen yang membawahi 4 asistenan dan terdiri dari 53 kalurahan, *Ketiga*, Kawedanan Semanu yang membawahi 4 asistenan dan terdiri dari 57 kalurahan. Kabupaten Kulonprogo membawahi 2 kawedanan yaitu Kawedanan Nanggulan yang membawahi 4 asistenan dan terdiri dari 62 kalurahan serta Kawedanan Sentolo yang membawahi 4 asistenan dan terdiri dari 57 kalurahan.⁴³

Setelah Sultan melakukan perubahan birokrasi pemerintahan dengan menggabungkan antara karaton dan nagari yang memberi kedudukan Papatih Dalem berada di bawah kekuasaan Sultan, maka langkah berikutnya adalah membenahi masyarakatnya. Dalam membina masyarakat, Sultan menghapus larangan memakai selop, sandal, tongkat, topi, dan payung di Pamengkang Sitihiinggil Selatan.

Selain itu, Sultan menghapus pemberian hormat dengan jongkok kepada Sultan di luar karaton.⁴⁶

Dalam membina masyarakat, Sultan juga memajukan pendidikan baik untuk anak-anak *abdidalem* maupun untuk anak-anak *kauladalem*. Pada mulanya hanya ada Sekolah Rakyat Keputran, kemudian Sultan pada Agustus mendirikan Sekolah Menengah Pertama (SMP), dan Sekolah Menengah Tinggi (SMT). Selain itu, Sultan mengadakan pendekatan pula dengan tokoh-tokoh pejuang nasionalis seperti Ki Hajar Dewantara seorang tokoh pejuang nasionalis dan Ki Bagus Hadikusumo seorang tokoh organisasi sosial Muhammadiyah agar mereka memberi dukungan pada Sultan dalam mengadakan perombakan birokrasi pemerintahan Yogyakarta. Di samping membina masyarakat pada bidang sosial, Sultan juga membina pada pembangunan ekonomi. Sultan mengadakan pembangunan di bidang kehutanan, pertanian, dan industri di wilayah Yogyakarta.

Peranan Sultan dalam membenahi masyarakatnya muncul karena melihat adanya penderitaan masyarakat akibat penindasan pemerintah militer Jepang. Blokade ekonomi dan perampasan barang-barang milik rakyat yang dilakukan oleh pemerintah militer Jepang dengan tujuan untuk memenangkan perang Asia Timur, menyebabkan penderitaan seluruh lapisan rakyat Indonesia. Demikian pula, pengerahan tenaga paksa yang dikenal dengan romusa dilakukan melalui instansi-instansi pamong praja menimbulkan tekanan-tekanan pada rakyat.⁴⁷

Di Yogyakarta penindasan pemerintah militer Jepang terhadap rakyat dapat dihindari oleh Sultan Hamengku Buwono IX. Sultan membuat angka statistik mengenai jumlah penduduk dan hasil pertanian atau peternakan yang tidak sesuai dengan kenyataan yang ada, bahkan Sultan berhasil menekan angka statistik dan menyakinkan kepada Jepang bahwa Yogya merupakan daerah miskin yang hasil pertaniannya tidak dapat mencukupi kebutuhan penduduk karena wilayah Yogyakarta yang sempit dan tanah tidak subur untuk tanaman pertanian. Selanjutnya dengan dalih agar wilayahnya dapat memberikan bantuan hasil bumi kepada pemerintah militer Jepang, maka Sultan mengajukan usulan agar diberi bantuan dana untuk

membangun sarana irigasi dan menyuburkan tanah pertanian. Usulan yang diplomatis itu diterima oleh Jepang dan Sultan mendapat bantuan dana untuk membangun saluran air terutama di daerah Adikarto sebelah selatan dan Sleman ke arah timur. Saluran air itu selanjutnya dikenal dengan nama "Selokan Mataram". Dengan adanya pembangunan saluran itu, wilayah Yogyakarta berhasil meningkatkan hasil pertanian. Di samping itu, dengan adanya pembangunan saluran air, Sultan berhasil mencegah rakyat Yogya untuk menjadi romusa.⁴⁸

Catatan

1. Mandoyokusumo, *Serat Raja Putra Ngayogyakarta Hadiningrat*, Museum Kraton Ngayogyakarta Hadiningrat, 1980., hlm. 77.
2. Atmakusumah (ed), *Tahta Untuk Rakyat : Celah-celah Kehidupan Sultan Hamengku Buwono IX*, Jakarta: PT Gramedia, 1982, hlm. 21.
3. Schrieke, *Indonesia Sociological Studies*, The Hague: W. Van Hoeve, Ltd., 1955-1957, I, hlm. 13.
4. Atmakusumah, *op. cit.*, hlm. 22.
5. *Sedya-Tama*, 8 Maret 1940.
6. *Sri Sultan : Hari-hari Hamengku Buwono IX*, Sebuah Presensi Majalah Tempo, Jakarta: PT Grafiti, 1988, hlm. 17--18.
7. Atmakusumah (ed), *op. cit.*, hlm. 26.
8. Sartono Kartodirdjo, *Lembaran Sejarah*, no.1, hlm.20.
9. *Sri Sultan : Hari-hari Hamengku Buwono IX*, *op. cit.*, hlm 19.
10. *Surat pada tuan Tj. Voskuil*, tertanggal 28 September 1927.
11. *Pemandangan* No. 56, 11 Maret 1940.
12. *Sedya-Tama*, 8 Maret 1940.
13. *Pemandangan* No. 56, 11 Maret 1940
14. *Sri Sultan : Hari-hari Hamengku Buwono IX*, *op. cit.*, hlm. 23.

15. Sri Sultan : Hari-hari Hamengku Buwono IX, *op. cit.*, hlm. 24.
16. Atmakusumah (ed).. *op. cit.*, hlm. 37.
17. *Sedyo-Tama*, 22 Oktober 1939.
18. Sri Sultan : Hari-hari Hamengku Buwono IX, *op. cit.*, hlm. 25.
19. Selo Soemardjan, *Perubahan Sosial di Yogyakarta*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 1990, hlm. 18-22.
20. Suwarno, *Hamengku Buwono IX dan Sistem Birokrasi Pemerintahan Yogyakarta 1942--1947 : Sebuah Tinjauan Historis*. Yogyakarta: Kanisius, 1994., hlm. 61.
21. Soedarisman Poerwokoesoemo, *Kasultanan Yogyakarta*. Yogyakarta : Gadjah Mada University Press, 1985., hlm. 64--104.
22. *Almanak Ekonomi 1882--1951*, Yogyakarta : Djawatan Kemakmuran, 1951, hlm. 138.
23. Atmakusumah (ed).. *op. cit.*, hlm. 41.
24. Atmakusumah (ed).. *Ibid.*, hlm. 43.
25. Atmakusumah (ed).. *Ibid*
26. Wawancara dengan Sultan HB X 12 Januari 1995 di Keraton.
27. Sri Sultan: Hari-hari Hamengku Buwono IX, *op. cit.*, hlm. 27.
28. *Sedyo-Tama*, 20 Maret 1940
29. Atmakusumah (ed).. *op. cit.*, hlm. 53.
30. Sri Sultan : Hari-hari Hamengku Buwono IX, *op. cit.*, hlm. 29.
31. Atmakusumah (ed).. *op. cit.*, hlm. 57.
32. Atmakusumah (ed).. *Ibid.*, hlm. 58.
33. O.D.P. Sihombing, *Pemuda Indonesia Menentang Fasisme Jepang*. Djakarta: Sinar Djaja, 1962., hlm. 69.
34. Oendang-oendang No. 27, *Kan Po*, No.1, 25-8-2602.

35. A.H. Nasution, *Sekitar Perang Kemerdekaan Indonesia*. Bandung: Angkasa, 1977, hlm. 100.
36. *Almanak Ekonomi 1882--1951*, Yogyakarta: Djawatan Kemakmuran, 1951, hlm. 148.
37. *Jogjakarta Ko-Rei* no. 1, 3 Agustus 2602.
38. PRISMA. "Di Atas Panggung Sejarah : Dari Sultan Ke Ali Moertopo", edisi khusus 20 Tahun Prisma 1971--1991, Jakarta : LP3ES, hlm. 48.
39. Suwarno, *op. cit.*, hlm. 96--97.
40. *Sinar Baroe*, 28-4-2603.
41. Suwarno, *op. cit.*, hlm. 101.
42. Poeroebaja (ed), *Hoedyana-Wara*, 22 Mei 1941, hlm. 27--30.
43. Suwarno, *op. cit.*, hlm. 105.
44. Oendang-oendang No. 27, *Kan Po*, 25-8-2602.
45. Suwarno, *op. cit.*, hlm. 108--109
46. Suwarno, *Ibid.*, hlm. 103
47. *Dasa-Warsa Kota Pradja Jogjakarta* 7 Djuni 1947- 7 Djuni 1957., hlm. 41.
48. Atmakusumah (ed)., *op. cit.*, hlm. 60-61.

pada masa Orde Baru maka Sri Sultan menjabat sebagai Menteri Utama Ekonomi dan Keuangan. Program kabinet ini yang merupakan tuntutan politik paling diutamakan ialah perbaikan terhadap kondisi perekonomian rakyat. Dalam hubungannya dengan ini maka kedudukan Sri Sultan sebagai Menteri Utama Ekonomi dan Keuangan (Menutama Ekku) ialah sangat penting. Program ekonomi meliputi rehabilitasi dan stabilisasi perekonomian rakyat, rehabilitasi prasarana dan sarana transportasi serta komunikasi, kapasitas produksi dan sebagainya yang selama ini terlantar dan tidak dipergunakan secara maksimal.⁶

Seperti diketahui bahwa inflasi yang terjadi pada Juni 1966 ialah 650%. Angka ini merupakan jumlah yang sangat besar (*hyperinflation*) sehingga diperlukan berbagai kebijaksanaan dalam bidang ekonomi untuk menurunkannya. Kebijaksanaan yang dimaksudkan dalam hal ini ialah kebijaksanaan fiskal (APBN), moneter, ekspor dan import, investasi dalam dan luar negeri. Sebagai hasilnya maka dikeluarkan sejumlah Undang-undang dalam bidang perbankan, penanaman modal luar negeri, penanaman modal dalam negeri dan pembentukan IGGI yang terdiri dari negara Jepang, Amerika Serikat dan negara-negara Eropa Barat. Di samping itu juga diadakan berbagai perombakan terhadap kebijaksanaan dan institusi dari sistem Demokrasi Ekonomi dan Politik Terpimpin yang berlaku pada masa Orde Lama. Perombakan tersebut dilakukan dengan cara:⁷

1. De-isolasi, yaitu membuka diri dalam bidang ekonomi terhadap lalu lintas ekonomi international.
2. Depolitisasi dalam bidang ekonomi.
3. Debirokratisasi, yaitu melepaskan ekonomi dari campur tangan birokrasi.
4. Deregularisasi yang diharapkan akan dapat memberikan peluang munculnya prakarsa dari masyarakat.
5. Dekonsentrasi dan desentralisasi, yaitu negara harus memberikan keleluasaan dan wewenang terhadap daerah untuk mengembangkan ekonomi daerah.

nasib dikemudian hari. Begitu mendengar berita proklamasi kemerdekaan, Sultan segera memanggil Sri Paku Alam VIII dan KRT Honggowongso, seorang staf senior di Kepatihan. Pada waktu itu Sri Sultan minta pertimbangan, "bagaimana sikap kita sebaiknya". Oleh Paku Alam dikatakan bahwa soal kemerdekaan Indonesia memang sudah lama kita cita-citakan. Maka dari itu sebaiknya kita memberi dukungan sepenuhnya terhadap proklamasi kemerdekaan Indonesia di Jakarta. Sri Sultan kemudian berkata, "bahwa memang itulah pendirian saya".³ Untuk selanjutnya KRT Honggowongso diperintahkan mempersiapkan sebuah telegram.

Oleh sebab itu tidak mengherankan, jika sehari setelah proklamasi kemerdekaan diumumkan yaitu pada 18 Agustus 1945,⁴ Sri Sultan langsung mengirim telegram kepada Sukarno-Hatta dan KRT Rajiman Wedidiningrat mantan ketua BPUPKI. Dengan spontan Sultan mengucapkan selamat atas terbangunnya Negara Republik Indonesia dan terpilihnya kedua pemimpin itu sebagai Presiden dan Wakil Presiden. Tentu saja pengiriman telegram itu tidak diketahui oleh masyarakat luas. Barangkali terbatas pada lingkungan kecil, yaitu hanya beberapa orang yang dekat dengan Sultan. Di samping mengirim ucapan selamat ke Jakarta, Sultan menginstruksikan agar keesokan harinya pukul 09.00 semua pemimpin kelompok-kelompok pemuda berkumpul di Bangsal Kepatihan.

Pada 19 Agustus 1945 harian "Sinar Matahari" yang terbit di Yogyakarta, baru memuat berita proklamasi kemerdekaan bersama-sama Undang-Undang Dasar yang telah ditetapkan sehari sebelumnya. dengan dimuatnya berita tersebut, maka bagi masyarakat luas semakin menjadi jelas bahwa kemerdekaan Indonesia benar-benar telah diproklamasikan. Lebih jelas lagi setelah para pimpinan pemuda memenuhi panggilan Sultan guna menyambut zaman baru yakni Indonesia Merdeka. Mereka hadir mewakili golongan agama, golongan nasionalis, kelompok kepanduan dan golongan keturunan Cina yang seluruhnya berjumlah 100 orang. Dalam pertemuan itu Sultan berpidato dan memberi petunjuk mengenai arti kemerdekaan bagi suatu bangsa.

Adapun isi pidatonya antara lain sebagai berikut :

"Kita telah beratus-ratus tahun dijajah bangsa lain. Maka selama itu perasaan kita tetekan dan sekarang kita merdeka. Tentu perasaan yang lepas dari tekanan akan melonjak. Melonjaknya ini yang harus kita jaga. Biarlah melonjak setinggi-tingginya, sepuas-puasnya akan tetapi jangan sampai menyerempet-nyerempet yang tidak perlu, yang bisa menimbulkan kerugian. Menurut sejarah, dimana terjadi perubahan besar dan mendadak seperti yang terjadi di tanah air kita sekarang pemuda senantiasa memegang peranan. Oleh karena itu saudara-saudara saya minta menjaga keamanan masyarakat. Baik di kampung-kampung, di perusahaan perusahaan, di toko-toko dan lain-lain jangan sampai terjadi kerusuhan, kalau terjadi sesuatu laporkan kepada saya. Dan bertindak sebagai wakil saya dalam hubungannya dengan saudara-saudara adalah Pangeran Bintara".⁵

Untuk mengakhiri pertemuan itu, sekali lagi Sultan menegaskan kepada para pemuda untuk turut menjaga ketertiban umum. "Sanggupkah saudara-saudara sekalian?" Hadirin secara serentak menjawab : Sanggup !

Pada hari yang sama Yogyakarta *Kooti Hookookai* mengadakan sidang istimewa untuk menyambut pengumuman Kemerdekaan Indonesia. Sidang yang mengambil tempat di gedung Sono Budoyo itu telah mengambil beberapa keputusan, yaitu :

1. Melahirkan rasa gembira dan syukur dihadapan Tuhan yang Maha Esa atas lahirnya Negara Republik Indonesia.
2. Menyatakan dengan keyakinan seteguh-teguhnya kepada Pemerintah Indonesia akan mengikuti dan tunduk tiap-tiap langkah dan perintahnya:
3. Mohon kepada Illahi agar negara Indonesia berdiri kokoh teguh dan abadi.

Keesokan harinya yaitu 20 Agustus 1945, Sri Sultan Hamengku Buwana IX selaku Ketua Yogyakarta *Kooti Hookookai* untuk kedua kalinya mengirim telegram kepada Presiden dan Wakil Presiden. Dalam telegram ini ia secara tegas menyatakan "sanggup berdiri di belakang pimpinan Paduka Yang Mulia". Kedua pernyataan di atas

selalu diikuti dengan jalan yang sama dari Sri Paku Alam VIII. Tindakan tersebut menunjukkan betapa tegas dan positif sambutan Republik Indonesia. Namun demikian disadari juga bahwa pengiriman kedua telegram itu masih bersifat pribadi, belum mencerminkan aspirasi dan kehendak rakyat.

Selain itu Sultan berkenan pula memberikan sambutan tertulis, seperti dimuat dalam harian Sinar Matahari. Isinya antara lain sebagai berikut :

"Sekarang kemerdekaan telah berada ditangan kita, telah kita genggam, nasib nusa dan bangsa adalah ditangan kita pula, tergantung pada kita sendiri. Kita harus menginsyafi, bahwa lahirnya Indonesia Merdeka itu dalam masa kegentingan. Maka semua, tiada kecualinya, harus bersedia dan sanggup mengorbankan kepentingan masing-masing, untuk kepentingan kita bersama, ialah menjaga, melihara dan membela kemerdekaan nusa dan bangsa.

Sekarang bukan waktunya mengemukakan dan memperbesar segala pertentangan dan perselisihan faham. Tiap-tiap golongan harus sanggup menyampingkan kepentingannya, sanggup untuk mencapai persatuan yang baru dan kokoh sehingga bangsa Indonesia mendapatkan senjata untuk memperjuangkan kemerdekaannya, buat menyelesaikan tanggung jawabnya terhadap angkatan-angkatan Bangsa Indonesia yang akan datang dan membikin sejarah yang gemilang".⁷

Sambutan di atas secara jelas Sultan mengajak bangsa Indonesia untuk menggalang persatuan dan kesatuan, guna mempertahankan kemerdekaannya.

Sementara itu dalam upaya menindaklanjuti amanat proklamasi, pada 24 Agustus 1945 dengan dukungan Sultan dan Paku Alam, rakyat membentuk Komite Nasional Indonesia Daerah (KNID). Pembentukan itu terjadi dua hari setelah Presiden Sukarno mengeluarkan maklumat pendirian Komite Nasional Indonesia (KNI). Adapun anggota KNID diambil dari berbagai lapisan masyarakat. Oleh karena itu baik Sri Sultan maupun Paku Alam mengakui KNID sebagai badan perwakilan rakyat.

Pada awal September 1945, sesudah KNID terbentuk, Sultan mengadakan pembicaraan-pembicaraan dengan Sri Paku Alam VIII, Ki Hajar Dewantara dan beberapa tokoh lain seperti Purwokusumo. Dari hasil pembicaraan itu Sultan dapat menyimpulkan, bahwa rakyat Yogyakarta menyambut proklamasi kemerdekaan itu dengan rasa lega. Melihat kenyataan yang ada, maka atas persetujuan KNID Sri Sultan mengeluarkan Amanat 5 September 1945. Secara tegas dinyatakan bahwa daerah Kesultanan Yogyakarta adalah bagian dari Republik Indonesia dengan kedudukan Daerah Istimewa. Di bawah ini dapat kita ketahui pengakuan Sri Sultan sendiri sehubungan dengan dikeluarkannya Amanat 5 September itu :

".....baru tanggal 5 September saya berani berbicara atas nama rakyat di sini. Saya menyatakan demikian itu oleh karena perhitungan saya, dus keyakinan saya bahwa suatu waktu Belanda akan datang di Yogya. Kalau itu terjadi maka dengan pernyataan itu saya tidak bisa diadu domba dengan para intelektual, para politisi dan rakyat di Yogyakarta ini. Itu perhitungan saya, untuk menyatakan bahwa Yogya itu adalah bagian dari pada Republik Indonesia".⁸

Amanat itu secara keseluruhan memuat tiga pernyataan, yaitu :

AMANAT

Sri Paduka Ingkang Sinuwun Kanjeng Sultan Kami Hamengku Buwana IX, Sultan Negeri Ngayogyakarta Hadiningrat, menyatakan :

1. Bahwa Negeri Ngayogyakarta Hadiningrat yang bersifat Kerajaan adalah daerah istimewa dari Negara Republik Indonesia.
2. Bahwa Kami sebagai Kepala Daerah memegang segala kekuasaan dalam Negeri Ngayogyakarta Hadiningrat, dan oleh karena itu berhubungan dengan keadaan pada dewasa ini segala urusan pemerintahan dalam Negeri Ngayogyakarta Hadiningrat mulai saat ini berada ditangan Kami dan kekuasaan-kekuasaan lainnya Kami pegang seluruhnya.
3. Bahwa perhubungan antara Negeri Ngayogyakarta Hadiningrat dengan Pemerintah Pusat Negara Republik Indonesia, bersifat langsung dan Kami bertanggung jawab atas Negeri Kami langsung kepada Presiden Republik Indonesia.

Kami memerintahkan supaya segenap penduduk dalam Negeri Ngayogyakarta Hadiningrat mengindahkan Amanat Kami ini.

Ngayogyakarta Hadiningrat
28 Puasa Ehe 1876
atau 5-9-1945
Hamengku Buwono IX^o

Pada saat yang hampir bersamaan, Sri Paku Alam VIII juga mengeluarkan amanat serupa yang isi dan kata-katanya persis sama untuk Projo Pakualaman.

Keesokan harinya, 6 September 1945 Presiden Sukarno mengutus dua orang Menteri Negara yaitu Mr. Sartono dan Mr. Maramis untuk datang di Yogyakarta. Kedatangan mereka itu dalam rangka menyampaikan "Piagam Kedudukan Sri Sultan" dari Presiden Republik Indonesia. Adapun isi piagam kedudukan itu adalah sebagai berikut :

Kami, Presiden Republik Indonesia, menetapkan :

Ingkang Sinuwun Kangjeng Sultan Hamengku Buwono Senopati Ing Ngalogo, Abdulrachman Sayidin Panotogomo Kalifatullah ingkang kaping IX ing Ngayogyakarta Hadiningrat pada kedudukannya, dengan kepercayaan, bahwa Sri Paduka Kangjeng Sultan akan mencurahkan segala fikiran, tenaga, jiwa dan raga untuk keselamatan Daerah Yogyakarta sebagai bagian dari pada Republik Indonesia.

Jakarta, 19 Agustus 1945
Presiden Republik Indonesia

ttd

Ir. Soekarno¹⁶

Piagam kedudukan tersebut berisi pengakuan pemerintah kepada Kasultanan Yogyakarta sebagai bagian dari Republik Indonesia. Sekaligus memperkuat kedudukan Sultan dalam memimpin Yogyakarta. Piagam kedudukan itu sebenarnya tertanggal 19 Agustus

1945, hanya sehari setelah Sri Sultan HB IX mengirim telegram ucapan selamat kepada Presiden dan Wakil Presiden. Namun karena adanya beberapa faktor yang belum jelas, kemungkinan juga, karena faktor kepastian sikap,¹¹ barulah setelah keluar Amanat 5 September 1945, Piagam kedudukan itu disampaikan kepada Sri Sultan HB IX.

Menurut Soedarisman Poerwokoesoemo,¹² pada permulaan revolusi di seluruh Indonesia terdapat kurang lebih 250 daerah swapraja. Akan tetapi hampir semua daerah swapraja itu tergilas oleh roda revolusi, kecuali swapraja Kesultanan dan swapraja Paku Alaman. Kedua daerah tersebut dengan segera setelah Proklamasi Kemerdekaan, bersatu menyambut dan menyatakan diri sebagai bagian dari Negara Republik Indonesia, yang pada akhirnya menjadi Daerah Istimewa Yogyakarta.

Dengan demikian, lahirlah Daerah Istimewa Yogyakarta sesuai ketentuan pasal 18 UUD 1945. Dalam pasal tersebut ditegaskan bahwa :

"Pembagian daerah Indonesia atas daerah besar dan kecil, dengan bentuk susunan pemerintahannya ditetapkan dengan undang-undang, dengan memandang dan mengingat dasar permusyawaratan dalam sistem pemerintahan Negara, dan hak-hak asal-usul dalam daerah-daerah yang bersifat istimewa."¹³

Selanjutnya dalam penjelasan resmi dari pasal 18 UUD 1945 yang bertalian dengan Daerah Istimewa dinyatakan bahwa:

"Dalam teritorir negara Indonesia terdapat \pm 250 *Zelfbesturende landschappen* dan *Volksgemeenschappen* seperti desa di Jawa dan Bali, negeri di Minang Kabau, dusun dan marga di Palembang dan sebagainya. Daerah-daerah itu mempunyai susunan asli, dan oleh karenanya dapat dianggap sebagai daerah yang bersifat istimewa. Negara Republik Indonesia menghormati kedudukan daerah-daerah istimewa tersebut dan segala peraturan negara yang mengenai daerah itu akan mengingat hak asal-usul daerah tersebut".¹⁴

Bertitik tolak dari derap langkah Sri Sultan HB IX dalam menyambut dan mendukung cita-cita proklamasi 17 Agustus 1945, Amanat 5 September jelas bukan untuk kepentingan pribadinya. Kesemuanya itu

didasarkan pada nasib masa depan bagi kerajaan dan rakyat Yogyakarta. Memang sejak semula Sultan menyadari bahwa kemerdekaan itu merupakan kepentingan bangsa yang besar, bukan kepentingan daerah-daerah. Oleh sebab itu pernyataan bahwa Kesultanan Yogyakarta merupakan bagian dari RI bukan sekedar kebetulan dan juga tidak direncanakan. Dengan kata lain bahwa bergabungnya Yogyakarta dengan pemerintah RI, juga tidak didasarkan pada perhitungan "untung-rugi" secara bisnis. Akan tetapi pernyataan itu terjadi karena keikhlasan dalam perjuangan yang dilandasi oleh semangat kebangsaan.

3.2 Peranan Sultan Pada Waktu Yogya Sebagai Ibu Kota RI

Sikap dan tindakan Sri Sultan HB IX dalam mendukung pemerintah baru Republik Indonesia bukan hanya sekedar "abab" belaka. Hal itu dibuktikan, dengan kerelaannya untuk menyediakan kota Yogyakarta sebagai tempat pemerintah pusat, selama Jakarta yang menjadi ibu kota negara tidak aman dari gangguan musuh.

Baru beberapa minggu sesudah Indonesia lahir menjadi negara merdeka, datanglah tentara Sekutu yang dipimpin oleh Angkatan Perang Inggris mendarat di kota Jakarta. Kedatangan mereka membuat situasi menjadi genting, karena Sekutu menyatakan bahwa Jakarta termasuk salah satu tempat untuk pengumpulan bekas interniran dan tahanan tentara Jepang. Untuk itu diperlukan pengamanan yang memadai, sehingga di Jakarta akan ada ribuan tentara Sekutu.

Bersamaan dengan mendaratnya tentara Sekutu, turut mendarat juga tentara Belanda (NICA) yang bersikukuh ingin mengembalikan Indonesia menjadi Hindia Belanda seperti sebelum tanggal 8 Maret 1942. Oleh sebab itu mereka segera melancarkan tindakan militer, yang mengakibatkan keadaan di kota proklamasi menjadi genting. Para pemimpin negara selalu berada dibawah ancaman tentara Belanda, yang telah mendapat perintah untuk menahan dan bahkan-melenyapkannya. Dengan demikian keamanan dan keselamatan para pemimpin republik beserta keluarganya semakin tidak terjamin. Karena itulah, tidak ada pilihan lain kecuali memindahkan para pemimpin republik keluar dari Jakarta. Tetapi harus ke mana ?

Dalam situasi yang mencekam itu Sri Sultan HB IX sangat menyayangkan tindakan Belanda terhadap pemimpin-pemimpin RI di Jakarta, dan mengancam akan mengadakan pembalasan terhadap pemimpin-pemimpin Belanda yang kebetulan lewat Yogyakarta.¹⁵ Selain itu Sultan segera menawarkan Yogyakarta sebagai pusat dan tempat kedudukan pemerintahan Republik. Dengan adanya tawaran semacam itu, maka pada 3 Januari 1946 sidang kabinet memutuskan untuk memindahkan pusat pemerintahan ke Yogya.

Pada malam harinya presiden dan wakil presiden beserta beberapa orang pengawal bertolak ke Yogya dengan kereta api barang. Hal itu dimaksudkan untuk menghindari sergapan tentara Belanda yang setiap malam mengadakan patroli di jalan-jalan.

Setelah menempuh perjalanan semalam suntuk, akhirnya tanggal 4 Januari 1946 Presiden bersama rombongan tiba di stasiun Tugu dengan selamat. Kedatangan mereka di Yogyakarta disambut oleh Sri Sultan HB IX beserta segenap, lapisan masyarakat, dengan penuh kehangatan dan semangat perjuangan. Pada waktu menerima sambutan rakyat Yogyakarta, presiden menyatakan dalam amanatnya mengenai alasan kepindahan pemerintah RI, antara lain :

"Kepindahan kami ke kota Yogya adalah kepindahan sementara. Pemindahan sesuatu pemerintahan bukanlah barang aneh dipandang dari sudut politik dunia. Seperti diketahui Turki dan Rusia pun mengalami pemindahan pemerintahannya. Tetapi pemindahan kami ini tidak boleh disamakan dengan pemindahan pemerintahan Turki dan Rusia itu. Kedudukan pemerintahan Republik Indonesia tetap ada di Jakarta. Saya minta kepada seluruh rakyat Indonesia supaya jangan gugup dan jangan menganggap, bahwa pemindahan sebagian pemerintahan ini adalah akibat perubahan politik yang besar. Bukan demikian halnya. Pemindahan ini adalah sesungguhnya pemindahan sementara saja".¹⁶

Kalau kita simak isi amanat di atas, jelas bahwa pemindahan itu hanya bersifat sementara. Akan tetapi berapa lama dan sampai kapan, tiada seorangpun yang dapat memutuskannya.

Selain itu, sehubungan dengan kepindahan presiden dan wakil, presiden bersama-sama para pemimpin negara yang lain, ikut pula

pindah beberapa kementerian. Dengan demikian, maka secara positif kota Yogyakarta mendadak menjadi ibu kota sementara dari Republik Indonesia. Perubahan itu ternyata besar sekali pengaruhnya, karena dengan cara mendadak Pula, ibu kota ini telah dibanjiri penduduk. Mereka tidak saja datang dari Jakarta yang terdiri dari para pemimpin dan alat kekuasaan negara, tetapi juga penduduk dari lain daerah. Pada waktu itu Yogya telah dihuni 170.000 jiwa, tiba-tiba membengkak menjadi 600.000 jiwa.¹⁷ Oleh karenanya ibu kota itu mengalami bermacam-macam kesulitan, terutama dalam soal perumahan, baik untuk keperluan kantor kementerian-kementerian atau jawatan-jawatan maupun untuk tempat tinggal.

Melihat kenyataan yang ada, maka Sri Sultan IX segera memberikan semua fasilitas untuk kelancaran roda pemerintahan RI. Gedung-gedung milik pemerintahan kasultanan dan bagian-bagian kraton dimana perlu dapat dipergunakan. Namun demikian, Sultan tetap dengan cermat menempatkan dirinya sebagai "tuan rumah" yang tidak menonjolkan diri dalam lingkungan pemerintah pusat. Akan tetapi ia akan bekerja keras, kalau memang mendapat tugas di luar jabatan dan kedudukan sebagai kepala daerah.

Selain menghadapi bermacam-macam kesulitan, penyelenggaraan pemerintah RI pada waktu itu betul-betul masih "kacau". Secara bergurau Presiden Sukarno menceritakan kepada Cindy Adams, "bahwa pemerintahan pada waktu itu tidak punya apa-apa, tidak punya mesin-tik, tidak punya alat tulis, apalagi pesawat terbang. Satusatunya perlengkapan hanyalah pesawat radio buatan tahun 1935. Kamipun tidak punya uang. Uang Jepang yang dipakai di Indonesia nilainya sudah sangat merosot. Cara kami bekerjapun jauh dari pada suatu pemerintah yang wajar, ia lebih mirip dengan cara suatu komplotan penggarong".¹⁸

Untuk membiayai lancarnya roda pemerintahan, uangpun didapat dengan berbagai cara. Candu yang banyak terdapat di Jawa dan Madura, terpaksa diselundupkan ke luar negeri. Singapura, Bangkok, Hongkong dan Manila menjadi bandar-bandar penyelundupan yang paling baik untuk menembus blokade Belanda.

Selain penyelundupan-penyelundupan bahan-bahan mentah ke luar negeri dengan bahaya menerobos blokade Belanda, dalam negeripun diadakan pula berbagai penyelundupan. Bahkan Sri Sultan HB IX pun sempat bertugas sebagai penghubung antara Jakarta dengan ibu kota Yogyakarta. Dalam perjalanan selama 12 jam dengan kereta api ke Jakarta, Sultan sempat menawarkan berpeti-peti cerutu Yogya dengan ban mobil. Disamping itu, Sultan membuka kas kerajaannya untuk mengaji seluruh pegawai kantor dan instansi pemerintahan RI.

Menurut PJ. Suwarno,¹⁹ ada beberapa faktor yang mendorong sikap Sultan untuk berbuat demikian itu adalah :

1. Rasa malu yang disebutkan *Minderwoordogheid-Complex* terhadap anggapan para cendekiawan dan politisi bahwa raja-raja seperti Sunan, Mangku Negoro, Sultan dan Paku Alam itu antek Belanda atau Jepang. Anggapan ini mendorongnya untuk berbuat sesuatu sehingga dirinya tidak digolongkan antek Belanda atau Jepang.
2. Contoh yang diberikan oleh nenek moyangnya seperti Sultan Agung, Sultan Hamengku Buwono I, Sultan Hamengku Buwono II dan Pangeran Diponegoro yang terus menerus melawan Belanda. Dia sangat terkesan atas prakarsa Sultan Agung menyerbu Batavia pada tahun 1628;
3. Pendidikannya di tengah-tengah keluarga Belanda yang memberi kesempatan kepadanya, untuk menyaksikan bagaimana pembantu Jawa diperbudak oleh keluarga Belanda yang menjadi tuannya. Pengalaman ini diakuinya kelak menumbuhkan semangat nasionalisme pada dirinya. Kecuali itu pendidikan tinggi yang pernah dikenalnya di Leiden Negeri Belanda tentu merupakan faktor tindakan Sultan terhadap Pemerintah RI yang belum pasti masa depannya.

Dengan demikian tepatlah pilihan Presiden Sukarno atas Yogyakarta sebagai ibu kota negara RI. Hal itu disebabkan loyalitas Sultan kepada negara kebangsaan ternyata tinggi dan apa yang dikerjakan olehnya dijadikan pedoman orang-orang Yogyakarta pada umumnya.

Mengingat betapa pentingnya peranan ibu kota bagi suatu pemerintahan, terlebih lagi dalam masa perjuangan menegakkan dan mempertahankan kemerdekaan. Maka Yogyakarta sebagai ibu kota Republik Indonesia akan selalu mendapat tantangan dan gangguan dari pihak lawan. Oleh karena itu tidak mengherankan bila Belanda senantiasa berusaha untuk merebut dan bahkan menghancurkan ibu kota Republik Indonesia Yogyakarta.

3.3 Peranan Sultan Pada Waktu Perang Kemerdekaan

Usaha Belanda untuk merebut dan menduduki ibu kota Republik Indonesia Yogyakarta, ternyata benar-benar dilaksanakan. Hal itu terbukti dengan dilancarkan operasi militer pada 21 Juli 1947. Serangan itu dalam sejarah kemerdekaan Indonesia dikenal dengan Agresi Militer Belanda I. Namun, sebelum mencapai Yogya, gerakan Belanda I tersebut keburu dihentikan oleh resolusi Dewan Keamanan PBB. Walaupun demikian Belanda telah berhasil mencapai sebagian dari tujuan militernya. Melalui Jalan diplomasi, khususnya dengan ditandatanganinya Perjanjian Renville, Belanda berhasil menciptakan "Garis Van Mook". Itu berarti bahwa daerah yang semula dikuasai oleh republik, harus dikosongkan dan diserahkan kepada pemerintah kolonial Belanda.

Merasa tidak puas karena kegagalan usahanya yang pertama untuk menghancurkan republik, maka pada 19 Desember 1948 Belanda kembali melancarkan aksi militernya yang kedua. Pada kesempatan itu yang menjadi sasaran langsung penyerbuan adalah ibu kota Yogyakarta. Menurut perhitungan Belanda, kalau Yogyakarta berhasil direbut maka pemerintah Republik Indonesia akan runtuh dengan sendirinya. Langkah itu akan lebih mudah lagi kalau para pemimpin republik dapat ditangkap.

Setelah lapangan terbang Maguwo diduduki, Belanda segera menyerbu ibu kota Yogyakarta. Dengan adanya serbuan yang mendadak itu rakyat menjadi bingung, panik tidak tahu apa yang harus diperbuat. Dari kebingungannya itu banyak penduduk yang mengambil keputusan untuk pergi mengungsi ke luar kota, sedangkan yang lainnya berduyun-duyun masuk ke kraton mohon perlindungan Sri Sultan.

Pada hari itu sekitar pukul 09 00 pagi, Sri Sultan HB IX yang baru terganggu kesehatannya datang di Kepatihan untuk memberi tahu bahwa Belanda telah menyerang Yogyakarta. Kemudian memerintahkan kepada KRT Honggowongso supaya segera ke Gunung Kidul untuk menyiapkan segala sesuatunya, barangkali pemerintah pusat pindah ke sana. Selain itu, melalui saluran telepon yang masih bersambung Sultan menginstruksikan juga kepada Pamong Praja, isinya antara lain :

1. Kedua Sri Paduka Kepala dan Wakil Kepala Daerah berserta staf Jawatan Praja tetap berada di Kota Yogyakarta;
2. Pamong Praja harus berusaha jangan sampai jatuh di tangan Belanda, meskipun tempatnya diduduki.
3. Pamong Praja termasuk Pamong Desa harus tetap berada di dalam wilayahnya masing-masing memimpin dan melindungi rakyatnya;
4. Perhubungan pemimpin daerah harus selalu diadakan dan diatur secara illegal, dengan kode-kode dan sebagainya;
5. Semua instruksi dan laporan oleh kurir harus disampaikan secara mondeling, tidak boleh membawa surat;
6. Jawatan Praja merupakan sentral penghubung antara Sri Paduka Kepala Daerah dengan semua instansi sipil, militer ataupun kementerian-kementerian.²⁰

Untuk selanjutnya dinyatakan bahwa kantor pemerintah daerah di Kepatihan semua tutup, sampai ada perintah dari Sri Sultan.

Didalam situasi yang semakin tidak menentu, apalagi setelah benteng Vredenburg dibom oleh Belanda, Presiden Sukarno memerintahkan kabinet bersidang untuk menentukan apa yang harus diperbuat. Dalam sidang kabinet itu diputuskan bahwa Pemerintah RI tetap berada di dalam kota, dan memberi mandat kepada Menteri Kemakmuran Mr. Syafrudin Prawiranegara supaya membentuk Pemerintah Darurat Republik Indonesia (PDRI) di Sumatera. Di samping itu dikirim pula sebuah radiogram ke New Delhi yaitu kepada Dr. Sudarsono, Palar, dan Mr. Maramis untuk membentuk *exile government* di India, apabila usaha Syafrudin Prawiranegara tidak

berhasil.²¹ Sesudah sidang selesai Sultan pulang ke kraton untuk menenangkan orang-orang yang telah mengungsi ke sana. Kemudian kembali ke istana presiden, tetapi tentara Belanda sudah berada di muka kantor pos, maka Sultan kembali masuk kraton dan memerintahkan menutup pintu gerbangnya.

Pada malam harinya seorang kapten Belanda minta bertemu dengan Sri Sultan dan juga Sri Paku Alam, akan tetapi kedua Sri Paduka tersebut tidak bersedia menerima. Oleh sebab itu hanya menyampaikan pesan kepada pegawai penjaga pintu gerbang kraton bahwa mulai malam itu Kota Yogyakarta diadakan Jam malam dari jam 18.00 hingga jam 06.00 pagi. Lingkungan kraton Pura Paku Alaman dan Kepatihan dijadikan daerah "imun" ialah daerah yang tidak diadakan tembak menembak dan tentara Belanda dilarang masuk.²²

Untuk melaksanakan usahanya membentuk Pemerintah Pendudukan, Residen Stock dan pembantunya yaitu Purbosudibyo mencoba menarik pegawai-pegawai daerah diminta bantuannya. Akan tetapi dijawabnya bahwa sebagai pegawai Sri Sultan akan membantu siapapun apabila yang memerintahkan Sri Sultan. Selain itu Belanda berusaha untuk mencari kontak dengan rakyat, antara lain mencari ketua-ketua rukun kampung dan akan memberikan bahan pakaian maupun bahan makanan.²³ Kesemuanya itu tetap tidak berhasil.

Sementara itu tentara Belanda yang sudah sampai di muka kantor pos kemudian mengepung istana presiden. Dikarenakan kekuatan sangat tidak seimbang, maka dengan terpaksa presiden dan para pembesar-pembesar yang lainnya menyerah dan menjadi tawanan.

Pada tanggal 22 Desember 1948 Presiden Sukarno, wakil Presiden Moh. Hatta dan pembesar-pembesar lainnya yang ditangkap Belanda dibawa ke luar Yogyakarta untuk selanjutnya diasingkan ke Brastagi dan Bangka. Sedangkan Sri Sultan HB IX tidak ditangkap dan tetap tinggal di kraton Rupanya pihak Belanda mempunyai beberapa pertimbangan mengapa Sri Sultan tidak ditangkap. Pertama, Belanda mempunyai harapan dapat membujuk Sri Sultan agar mau bekerjasama dengan dijanjikan kedudukan tinggi dalam pemerintahan. Kedua, Belanda berpendapat menangkap Sri Sultan, seorang raja yang

dihormati oleh rakyatnya akan lebih mempersulit tentara pendudukan di Yogya. Ternyata ajakan Belanda agar Sri Sultan bersedia bekerjasama dengan mereka ditolak. Sri Sultan memilih ditangkap atau binasa daripada berkhianat terhadap republik. Ia tetap pada pendiriannya, "sabda pandita ratu" merupakan prinsip yang terus dipegangnya dengan teguh.²⁴

Walaupun dalam status tahanan rumah, Sri Sultan banyak sekali mengetahui tentang keadaan politik dan militer di luar kraton. Itu semua berkat peranan para kurir yang menjadi penghubung antara kraton dengan gerilyawan yang beroperasi di luar kota.

Salah satu taktik yang dijalankan oleh Sri Sultan untuk melawan Belanda adalah dengan menyebarkan berita, bahwa ia telah "meletakkan jabatan" sebagai Kepala Daerah Istimewa Yogyakarta. Kemudian cara ini diikuti pula oleh Sri Paku Alam VIII. Hal itu dimaksudkan agar keamanan wilayah Yogyakarta menjadi tanggung jawab tentara pendudukan. Dengan demikian Sri Sultan HB IX atau Paku Alam VIII tak dapat diperalat dan disuruh melakukan tindakan-tindakan yang membantu Belanda.²⁵

Suasana menjelang bulan pertama tahun 1949 semakin tidak menentu untuk kelangsungan hidup republik yang masih berusia muda itu. Yogyakarta sebagai ibu kota negara telah diduduki, sedangkan sebagian besar para pemimpin pemerintahan sudah ditawan. Keadaan di Yogya sebagai pusat perjuangan tampak lesu. Republik dalam keadaan terkurung.

Melihat kenyataan yang ada Sri Sultan merasa khawatir. Ia berpendapat kalau keadaan itu dibiarkan terus, tentu tidak akan menguntungkan bagi masa depan republik. Sri Sultan kemudian mencari akal bagaimana agar dapat mengatasi dan merubah keadaan yang seperti itu. Kebetulan sekali pada waktu itu terdengar berita bahwa persengketaan antara RI dengan Belanda akan dibicarakan dalam forum PBB pada akhir Februari 1949. Waktu itu Sri Sultan harus bertindak cepat, waktu sudah sangat mendesak.

Pada pertengahan Februari, Sri Sultan mengirim kurir untuk menghubungi Panglima Besar Sudirman ditempat persembunyiannya, meminta persetujuannya untuk melaksanakan siasat dan untuk

langsung menghubungi komandan gerilya.²⁶ Ternyata pada waktu itu Sri Sultan berhasil mendatangkan komandan gerilya Letnan Kolonel Suharto.

Menurut Kustiniyati Mochtar, dalam pertemuan yang berlangsung pada pertengahan Februari 1949 itu, Sri Sultan menanyakan kesanggupan Letkol Suharto untuk mempersiapkan suatu serangan umum dalam waktu dua minggu. Dan komandan gerilya itu menyatakan kesanggupannya. Hanya sekali itu saja pertemuan diantara kedua tokoh ini dalam kaitan dengan rencana serangan umum 1 Maret 1949. Kontak-kontak selanjutnya dilakukan melalui perantara kurir. Melalui kurir pula, pada sore hari tanggal 1 Maret itu Sri Sultan memberitahukan kepada Letkol Suharto bahwa pendudukan Yogya oleh gerilya dianggap sudah cukup. Seluruh gerakan persiapan untuk melakukan penyerangan berlangsung selama sembilan jam, yaitu mulai pukul 06.00 sampai 15.00. Akan tetapi secara efektif Yogyakarta diduduki oleh gerilya selama enam jam. Oleh sebab itu serangan ini lebih dikenal dengan sebutan "enam jam di Yogya".

Berkat usaha dari radio AURI PC2 yang berada di Playen, Gunung Kidul, berita Serangan Umum 1 Maret itu disiarkan ke Bukit Tinggi. Melalui Bukit Tinggi berita itu diteruskan ke India dan akhirnya sampai ke PBB. Memang pada waktu itu propaganda Belanda mengatakan bahwa Republik Indonesia sudah tidak ada, TNI telah hancur. Akan tetapi dengan adanya Serangan Umum 1 Maret itu ternyata TNI masih hidup republik masih tegak berdiri. Berdasarkan kenyataan itu maka propaganda Belanda di Dewan Keamanan dapat digagalkan.

Akibat keagalannya itu, tiada jalan lain bagi Belanda selain menerima resolusi Dewan Keamanan PBB tanggal 28 Januari 1949. Untuk dapat melaksanakan resolusi tersebut maka pada 14 April 1949 diadakanlah perundingan antara Mr. Moh. Roem dan Dr. Van-Royen dibawah pimpinan Cockran anggota Komisi PBB untuk masalah Indonesia.

Pada 7 Mei 1949 Persetujuan Roem Royen ditandatangani. isinya antara lain memuat :

1. Penghentian tembak-menembak.
2. Penarikan mundur Belanda dari Yogyakarta.
3. Pemimpin-pemimpin Republik dibebaskan dan kembali ke Yogyakarta.
4. Syarat-syarat dan waktu diadakan KMB (Konferensi Meja Bundar).²⁸

Dengan adanya persetujuan itu, maka Sri Sultan segera mengadakan rencana persiapan pengunduran tentara Belanda dari Yogyakarta. Pada tanggal 16 Mei 1949, Komisi Indonesia Belanda datang di Yogyakarta dan berunding di Kapatihan untuk membicarakan segala sesuatu mengenai rencana yang telah ditetapkan.

Untuk menerima kembali Yogyakarta dari tangan Belanda Sri Sultan HB IX diberi kekuasaan penuh oleh pemerintah dengan Penetapan Presiden tanggal 1 Mei 1949 yang berbunyi sebagai berikut :

"Kami, Presiden, Panglima Tertinggi Angkatan Perang Republik Indonesia, memberi tugas kewajiban kepada yang Mulia Hamengku Buwana IX, Menteri Negara dan Koordinator Keamanan, disamping pekerjaan sekarang, untuk menerima kembali kekuasaan sepenuhnya baik sipil maupun militer, atas Daerah Istimewa Yogyakarta dari tangan Belanda dan mengatur pengembalian Pemerintah RI ke Yogyakarta. Untuk menyelenggarakan pekerjaan itu beliau kami beri kuasa sepenuhnya untuk mempergunakan segala alat pemerintahan yaitu misalnya tentara, polisi negara, pamong praja dan lain-lain pegawai yang sudah berada dan akan datang di Daerah Istimewa Yogyakarta".

Pada 24 Juni 1949 Sri Sultan bersama-sama Sri Paku Alam dan beberapa pembesar pemerintah daerah, disertai wakil PBB terbang ke Gunung Kidul untuk menentukan cara-cara penarikan mundur tentara Belanda. Mulai hari itu hingga 29 Juni 1949 secara bertahap tentara Belanda ditarik mundur dari seluruh wilayah Yogyakarta. Sesudah itu TNI, Polisi, gerilyawan, Pamong Praja dan rakyat yang dulu mengungsi ke luar masuk ke dalam kota Yogyakarta.

Dengan mundurnya tentara Belanda dari kota Yogyakarta dan keamanan di kota itu sudah dapat dijamin, maka Pemerintah Pusat Republik Indonesia kembali ke Yogyakarta. Pada tanggal 6 Juli 1949 Presiden Sukarno, Wakil Presiden Moh. Hatta dan pembesar Indonesia lainnya tiba kembali di Yogyakarta. Kedatangan mereka disambut oleh Sri Sultan HB IX beserta seluruh lapisan masyarakat. Beberapa hari kemudian Syafrudin Prawiranegara yang memimpin Pemerintah Darurat RI di Sumatera juga kembali ke Yogya. Ketika pemerintah ini sudah kembali ke Yogyakarta, Panglima Besar Jenderal Sudirman belum juga turun ke kota dari tempat bergerilya. Namun setelah ada surat dari Sri Sultan HB IX yang ditujukan kepadanya, barulah Jenderal Sudirman kembali ke kota Yogyakarta.

Setelah semua pemegang kekuasaan tiba di Yogyakarta, pada tanggal 13 Juli 1949 diadakan sidang kabinet. Dalam sidang kabinet itu antara lain memutuskan dan mengangkat Sultan HB IX sebagai Menteri Pertahanan dan sekaligus menjalankan pekerjaan perdana menteri, karena Moh. Hatta akan memimpin delegasi ke KMB di Negeri Belanda.³⁰

Dalam perkembangan selanjutnya, apalagi setelah melewati berbagai peristiwa seperti pembentukan kabinet baru di bawah pimpinan Moh. Hatta, diteruskan dengan adanya Konferensi Meja Bundar serta terbentuknya Pemerintah Republik Indonesia Serikat (RIS), maka pada 27 Desember 1949 diadakan upacara penandatanganan naskah "penyerahan" kedaulatan. Upacara "penyerahan" kedaulatan itu dilaksanakan di dua tempat, yaitu di Amsterdam dari Pemerintah Belanda kepada Pemerintah RIS yang diwakili oleh Perdana Menteri Moh. Hatta. Di Jakarta kekuasaan Belanda dari AHJ. Lovink diserahkan kepada Sri Sultan HB IX sebagai wakil dari Indonesia. Oleh sebab itu maka secara formal Belanda mengakui Kemerdekaan Indonesia dan mengakui kedaulatan penuh negara Indonesia di seluruh bekas wilayah Hindia Belanda, kecuali Irian Jaya.³¹ Di sinilah diplomasi Indonesia menunjukkan keberhasilannya.

3.4 Peranan Sultan Dalam Bidang Sosial dan Ekonomi

Pada dasarnya sebelum Belanda menyerang dan menduduki kota Yogyakarta, keadaan ekonomi di daerah pedalaman ini memang sudah lama mengalami kekeringan. Hal itu disebabkan oleh akal Belanda untuk menggencet segala perhubungan ekonomi agar Republik Indonesia jatuh. Kejatuhan itu tidak saja dikarenakan oleh tekanan-tekanan politik dan militer, tetapi juga tekanan ekonomi yang langsung menjadi kebutuhan rakyat. Pada waktu itu beras yang merupakan kebutuhan pokok rakyat sudah mulai sulit didapat di dalam kota. Rakyat kadang-kadang hanya makan jagung, ketela dan lain-lain sebagai pengganti beras. Semua bahan makanan harganya membubung tinggi. Uang yang bernilai seratus rupiah ORI (Oeang Republik Indonesia) tidak cukup untuk menghidupi satu keluarga biasa selama tiga hari³²

Seminggu setelah Belanda berhasil menduduki kota Yogyakarta, persediaan bahan makanan rakyat sudah tidak ada, habis sama sekali. Sejak saat itu penduduk dalam kota sudah mulai penderita kelaparan. Di samping itu pihak Belanda memaksa penduduk untuk menggunakan uang federal sebagai alat pembayaran yang baru. Pada awalnya rakyat merasa ragu-ragu dan takut untuk menerimanya, karena mengandung resiko dan dapat dianggap membantu stabilitas pendudukan Belanda. Akan tetapi akibat adanya tekanan-tekanan psikologis dan ekonomi dari Belanda, akhirnya rakyat menerimanya di samping masih menggunakan uang ORI sebagai alat pembayaran yang sah.³³

Sri Sultan Hamengku Buwana IX yang melihat kenyataan akan penderitaan banyak orang di sekelilingnya tidak tinggal diam. Ia membuktikan dan menunjukkan sikap konsekuen terhadap anjurannya sendiri, agar setiap orang rela berkorban demi keselamatan dan masa depan Republik.

Ternyata peranan aktif Sri Sultan HB IX terhadap perjuangan Republik itu tidak terbatas pada tindakan dan langkah politik saja. Kekayaannya pun disumbangkan kepada Republik, yaitu ketika pada tahun 1949 Republik ini sedang menghadapi krisis politik dan perekonomian. Keadaan semacam itu lebih diperparah lagi dengan meletusnya pemberontakan PKI di Madiun. Pada waktu itu keuangan

negara dalam keadaan kosong. Jangankan untuk membiayai pembangunan, untuk menjamin agar pemerintah berjalan dengan lancar pun biaya tidak tersedia. Dalam situasi seperti itu adalah Sri Sultan lagi yang turun tangan merogoh kantongnya.³⁴

Kekayaan yang berupa uang itu adalah merupakan tabungan Kesultanan sendiri, yang dengan cermat "diamankan" ketika bala tentara Jepang menduduki Indonesia. Dari sebagian uang tabungan itulah yang dikeluarkan untuk membiayai kelangsungan hidup Republik. Di samping itu Sultan juga memberikan "sumbangan belanja" kepada keluarga para pemimpin yang ditawan di Bangka.

Diperkirakan tidak kurang lima juta gulden "kerincing"³⁵ simpanan perbendaharaan kesultanan dibagikan oleh Sultan untuk menunjang kehidupan keluarga para pemimpin, maupun pegawai pemerintah yang selama beberapa bulan terpaksa tidak menerima gaji. Dengan adanya sumbangan semacam itu, Sultan dapat mencegah kepada para pegawai agar mereka tidak terjerat oleh bujukan penjajah Belanda. Di antara para penerima yang mendapat bantuan keuangan dari Sri Sultan adalah Nyonya Rahmi Hatta. Beliau menceritakan bagaimana dalam keadaan ekonomi yang begitu sulit, Sri Sultan memberi bantuan keuangan untuk kelangsungan hidup bagi keluarganya. Sampai sekarang Nyonya Rahmi Hatta masih menyimpan beberapa gulden dari uang pemberian Sri Sultan sebagai tanda kenang-kenangan.³⁶ Selain itu, sumbangan yang diberikan oleh Sri Sultan tidak hanya terbatas kepada kepentingan perseorangan, tetapi juga keperluan dan kepentingan pasukan gerilya dibiayai dengan uang miliknya.

Sri Sultan Hamengku Buwana IX adalah raja yang selalu memihak kepada kepentingan rakyat dan perjuangan kemerdekaan. Secara ikhlas, tidak hanya mempersembahkan harta kekayaannya demi kemerdekaan rakyat, akan tetapi Sultan sebenarnya telah mempertaruhkan visi dan jalan hidupnya sebagai anak zaman yang penuh resiko. Kemerdekaan bangsa dan kebebasan rakyat dari kebodohan dan kemiskinan yang harus diperjuangkan, rupanya tak terhalang oleh kedudukannya yang tinggi sebagai raja. Malahan, keinginan Hamengku Buwana IX dalam membantu Republik untuk mencerdaskan kehidupan bangsa, rupanya merupakan salah satu

komitmen batinnya yang paling dalam. Ia membiarkan rakyat mendirikan rumah dan hidup di dalam tembok kraton secara "magersari". Selain itu Sultan juga mendorong berdirinya Universitas Gadjah Mada (UGM). Mengenai tempat universitas itu bukan di luar kota, tetapi di dalam tembok kraton, bahkan tepat di bagian depan istananya yaitu Pagelaran.

Bersamaan dengan naiknya peranan Yogyakarta sebagai ibu kota Republik Indonesia, pada 3 Maret 1946 di kota ini didirikan "Balai Perguruan Tinggi Gadjah Mada", yang ketika itu masih merupakan lembaga pendidikan tinggi partikelir. Yayasan pendidikan tinggi tersebut antara lain dibentuk oleh Prof. Priyono, Prof. Dr. Sardjito, Prof. Mr. Jakosutona, Prof. Mr. Kertanegoro dan Prof. Mr. Notonagoro.³⁷ Gedung yang dipergunakan untuk tempat belajar adalah Pagelaran dan Sitihiinggil, yaitu bagian dari kraton Yogyakarta yang dipinjamkan oleh Sri Sultan Hamengku Buwana IX. Pada waktu berdiri, Balai Perguruan Tinggi Gadjah Mada baru memiliki Fakultas Hukum dan Fakultas Sastra.³⁸

Dalam perkembangan selanjutnya, pada 7 Desember 1949 fakultas-fakultas yang tergabung dalam Balai Perguruan Tinggi tersebut oleh yayasan diserahkan kepada pemerintah. Sebagai tindak lanjut, dengan Peraturan Pemerintah No. 23 tahun 1949 semua perguruan tinggi negeri yang ada di Yogyakarta kemudian ditetapkan untuk digabungkan menjadi satu universitas.³⁹

Pada 19 Desember 1949, Balai Perguruan Tinggi Gadjah Mada dengan segera dinyatakan sebagai universitas negeri pertama di Indonesia dengan nama "Universitas Negeri Gadjah Mada". Hari itu ditetapkan juga adanya Senat Universitas dengan ketua Prof. Dr. Sardjito, sedangkan Sri Sultan Hamengku Buwana diangkat sebagai Ketua Kehormatan. Setelah dinyatakan sebagai universitas negeri, maka Gadjah Mada memiliki beberapa fakultas, yaitu Fakultas Sastra, Hukum, Teknik, Kedokteran, Kedokteran Gigi dan Farmasi, Pertanian dan Kedokteran Hewan.

Adapun prakarsa pendirian Universitas Negeri Gadjah Mada itu boleh dikatakan "hanya" bermodalkan surat Keputusan (SK). Tetapi untuk tempat kuliah dan fasilitas-fasilitas lain, sebetulnya belum ada

Nah, disinilah Sultan kembali berperan, menyediakan dan mempersilahkan rumah mana saja yang kosong untuk dipergunakan tanpa ketentuan ataupun persyaratan tertentu. Apalagi uang sewa.

Setelah Pagelaran, Sitihianggil dan ruang-ruang di sekitarnya, maka bangsal Mangkubumen, Pugeran, Mangkuwilayan, Wijilan dan berbagai tempat lain disediakan untuk perkuliahan dan kepentingan Gadjah Mada.

Menginjak usianya yang keenam, Universitas Negeri Gadjah Mada sejak 11 Juli 1955 diganti namanya menjadi "Universitas Gadjah Mada."⁴⁰ Nama itu lebih dikenal dengan sebutan "UGM" atau "Gama".

Beberapa tahun kemudian, ketika UGM telah memikirkan pemekaran dan harus mencari tempat di luar tembok kraton, Sultan dengan tanpa diminta telah menunjuk tanah di Bulaksumur sebagai lokasi kampus. Di samping itu, dalam usaha pengembangan pendidikan Sultan tidak hanya menyediakan fasilitas bangunan serta tanah milik kraton, tetapi juga merintis pembangunan asrama-asrama mahasiswa di Yogyakarta.

Catatan

1. Badan Musyawarah Musea Daerah Istimewa Yogyakarta Perwakilan Jakarta, *Sejarah Perjuangan Yogya Benteng Proklamasi* (Jakarta: Barahmus, 1985) , hal. 48.
2. *Ibid.* 43
3. Sri Paku Alam VIII, "Proses Penggabungan Yogyakarta Dengan RI", *Ceramah Tentang Makna Kepahlawanan Sri Sultan HB IX*. Di Depan Mahasiswa Universitas Widya Mataram pada 16 Nopember 1990. (Makalah), hal. 8.
4. Kustiniyati Mochtar dalam Atmakusumah, penyunting, *Tahta Untuk Rakyat Celah-celah Kehidupan Sultan Hamengku Buwana IX* (Jakarta: Gramedia, 1982), hal. 64.
5. Badan Musyawarah Musea Daerah Istimewa Yogyakarta Perwakilan Jakarta, *op.cit.*, hal. 48--49, Indonesia;
6. *Republik Indonesia Daerah Istimewa Jogjakarta* (Kementerian Penerangan, 1953), hal. 35--36.
7. *Ibid.*, hal. 35 4
8. *Ceramah* Sultan Hamengku Buwana IX dihadapan generasi muda, pada 18 Agustus 1986 di THR Yogyakarta.
9. Republik Indonesia Daerah Istimewa Jogjakarta, *Op.cit.*, hal. 36.

10. *Ibid*.
11. G. Moedjanto, "Pahlawan Nasional Sri Sultan Hamengku Buwana IX", dalam harian *Suara Merdeka*, 8 Nopember 1990.
12. Soedarisman Poerwokoesoemo, Daerah Istimewa Yogyakarta (Yogyakarta : Gadjah mada University Press, 1984), hal. 3, 14.
13. Lihat *UUD 1945*.
14. Lihat *Penjelasan Resmi UUD 1945*.
15. P.J. Suwarno, "Yogyakarta Ayunan Negara Kebangsaan Indonesia", dalam harian *Kompas*, 4 Januari 1995.
16. Oesman Raliby, *Documenta Historica* (Djakarta: Bulan Bintang, 1952), hal. 188.
17. *Sejarah Daerah Istimewa Yogyakarta*, Proyek Penelitian dan Pencatatan Kebudayaan Daerah (Depdikbud 1976/1977), hal. 319.
18. *Harian Kedaulatan Rakyat*, 8 Oktober 1988.
19. P.J. Suwarno, *Situasi Yogyakarta Sebagai Pusat Pemerintahan RI Periode 1946 -- 1949*, Ceramah di Museum Benteng Yogyakarta, 1994. (Makalah), hal. 8.
20. *Republik Indonesia Daerah Istimewa Yogyakarta* (Kementrian Penerangan, 1953), hal 95.
21. Samawi, *25 Tahun Merdeka* (Jogjakarta: Kedaulatan Rakjat, 1970), hal. 89--90.
22. Atmakusumah, penyunting, *Tahta Untuk Rakyat Celah-celah Kehidupan Sultan Hamengku Buwana IX* (Jakarta: Gramedia, 1982), hal. 73.
23. *Buku Dasa-Warsa Kotapradja Jogjakarta 7 Djuni 1947 - 7 Djuni 1957* (Jogjakarta: Pemerintah Kota Jogjakarta, 1957), hal. 67.
24. *Sri Sultan : Hari-hari Hamengku Buwana IX* (Jakarta: Pustaka Utama Grafiti, 1988), hal. 37.
25. Atmakusumah, *Op. cit.*, hal 74.

26. *Ibid.*, hal. 79-80.
27. *Ibid.*
28. Samawi, *Op.cit.*, hal 93 Sartono Kartodirdjo, *Sejarah Nasional Indonesia, Jilid VI* (Jakarta Balai Pustaka, 1977), hal. 70.
29. Badan Musyawarah Musea Daerah Istimewa Yogyakarta Perwakilan Jakarta: *Sejarah Perjuangan Yogya Benteng Proklamasi* (Jakarta : Barahmus, 1985), hal. 152.
30. Sartono Kartodirdjo, *op.cit.*, hal. 70.
31. *Ibid.*, hal. 72.
32. *Buku Dasa Warsa Kotapraja Jogjakarta 7 Djuni 1947 - 7 Djuni 1957* (Jogjakarta: pemerintah Kota Jogjakarta, 1957), hal. 68.
33. *Ibid.*, hal. 70.
34. *Sri Sultan : Hari-hari Hamengku Buwana IX* (Jakarta: Pustaka Utama Grafiti, 1988), hal. 42.
35. Atmakusumah, penyunting, *Tahta Untuk Rakyat Celah-celah Kehidupan Sultan Hamengku Buwana IX* (Jakarta: Gramedia, 1982), hal. 77--78.
36. *Ibid.*, hal. 213
37. *30 Tahun Indonesia Merdeka 1945--1949* (Jakarta : Tira Pustaka, 1980), hal. 88
38. *Kota Jogjakarta 200 Tahun 7 Oktober 1756 -- 7 Oktober 1956* (Jogjakarta: Panitia Peringatan Kota Jogjakarta 200 tahun, 1956), hal. 102.
39. *30 Tahun Indonesia Merdeka 1945--1949, loc.cit.*
40. *Kota Jogjakarta 200 Tahun 7 Oktober 1756 -- 7 Oktober 1956, op. cit.*, hal. 107.

BAB IV

PERANAN KEHIDUPAN SULTAN PADA TAHUN 1950-AN SAMPAI TAHUN 1965

4.1 Peranan Sultan Dalam Bidang Kemiliteran dan Pemerintahan RI

Sejak awal revolusi, Sultan selalu dekat dan dipercaya oleh Tentara Nasional Indonesia (TNI). Dalam rapat pertama pengorganisasian tentara, Sri Sultan terpilih menjadi Menteri Pertahanan.¹ Dengan adanya pemilihan itu berarti semakin mempererat hubungannya dengan tentara dan masalah-masalah militer di Indonesia. Namun demikian, terpilihnya Sri Sultan itu tidak disetujui oleh pemerintah pusat, yang pada waktu itu lebih menginginkan Amir Syarifudin untuk menjabat kedudukan itu.

Para tokoh militer berpendapat, bahwa ternyata perjuangan yang dilakukan melalui meja perundingan oleh politisi sipil lebih banyak merugikan kedudukan negara daripada menguntungkannya. Para pemimpin militer mempunyai rasa kesal terhadap sikap politisi yang dianggapnya selalu lunak dalam menghadapi Belanda. Di tengah suasana perbedaan paham antara militer-sipil itu rupanya Sri Sultan merupakan orang sipil yang dipercayai oleh pihak tentara. Keberhasilannya "menjinakkan" Belanda pada waktu pendudukan, ternyata telah dapat mempertinggi gengsi Sri Sultan di kalangan militer.²

Selain persoalan di atas, Sri Sultan juga mempunyai andil yang cukup besar dalam mencari penyelesaian teknis dan administratif pengintegrasian bekas tentara KNIL ke dalam TNI. Pada Konferensi Antar-Indonesia yang diselenggarakan di Yogyakarta, dapat dihasilkan persetujuan mengenai hal-hal yang bertalian dengan masalah-masalah kemiliteran. Salah satu keputusannya adalah pembentukan angkatan perang RIS. Angkatan Perang RIS akan dibentuk oleh pemerintah RIS dengan inti angkatan perang RI ((TNI), bersama-sama dengan orang Indonesia yang ada di dalam KNIL.³ Pada hal para bekas KNIL itu umumnya masih memusuhi republik. Melihat kenyataan yang ada, Sri Sultan yang pada waktu itu sebagai Menteri Pertahanan dan AH. Nasution sebagai pimpinan tentara menghadapi persoalan yang sangat pelik, dan masalah seperti ini harus segera dicari jalan keluarnya.

Di dalam mencari jalan keluar dari permasalahan itu, timbul lagi beberapa kesukaran baru. Masalah yang pertama agar kelangsungan republik dapat terus terjamin, adalah mengusahakan agar disetiap wilayah negara pimpinan tentara tidak jatuh ke tangan para bekas KNIL, tetapi ketangan perwira-perwira TNI. Masalah yang kedua adalah mengusahakan agar tokoh-tokoh TNI itu dapat diterima di setiap wilayah.

Untuk maksud itu, AH. Nasution bersama dengan Sri Sultan pada tahun 1950 mengadakan perjalanan keliling ke seluruh wilayah Indonesia. Menurut Nasution,⁴ berkat keahlian Sri Sultan berdiplomasi itulah keduanya berhasil menempatkan orang-orang pusat di setiap pucuk pimpinan tentara di daerah. Dalam perjalanan keliling itu Nasution juga menyaksikan bagaimana Sri Sultan telah menjelma sebagai tokoh nasional yang dicintai rakyat. Di tempat-tempat yang didatanginya beliau selalu disambut oleh masyarakat yang mengeluk-elukan.

Pada tahun 1949 ketika Kabinet Republik Indonesia Serikat di bawah Bung Hatta terbentuk, Sri Sultan HB IX menduduki jabatan sebagai Menteri Pertahanan. Melihat kenyataan itu Belanda sangat kecewa, karena Sultan Hamid II sebenarnya yang dijagokan untuk menduduki jabatan itu. Menurut rencana mereka, apabila Sultan

Hamid II yang menduduki jabatan Menteri Pertahanan, bekas tentara KNIL akan menjadi inti dari TNI, dan bukan sebaliknya.

Karena kekecewaannya itu, maka Belanda pada 29 Februari 1950 lewat Sultan Hamid II merencanakan akan menawan dan membunuh beberapa pimpinan terkemuka dalam Kabinet Hatta, termasuk Bung Hatta dan Sri Sultan HB IX.⁵ Namun sebelum rencana itu terlaksana, keburu bocor. Dengan adanya peristiwa itu, maka Sri Sultan sebagai Menteri Pertahanan ikut secara aktif dalam membongkar komplotan itu, dan sekaligus menahan Sultan Hamid II yang menjadi tokoh utamanya.

Dalam perkembangan selanjutnya, yaitu dari tahun ketahun, Sri Sultan terus menduduki kursi Menteri Pertahanan sampai tahun 1952. Setelah peristiwa 17 Oktober 1952, beliau mengundurkan diri dari kedudukannya itu. Peristiwa itu terjadi disebabkan oleh ketidakpuasan beberapa tokoh militer terhadap sikap Bung Karno dalam program reorganisasi tentara.

Kalangan militer merasa tidak puas atas dukungan Bung Karno kepada Kolonel Bambang Supeno yang menentang reorganisasi. Selain itu malah tersebar berita bahwa Bung Karno menyetujui pengangkatan Kolonel Bambang Supeno sebagai pengganti Kolonel AH. Nasution untuk Kepala Staf Angkatan Darat. Mulai saat itu terjadilah perbedaan antara Menteri Pertahanan Sultan HB IX dan AH. Nasution di satu pihak dan Bung Karno dipihak lain.

Sebagai akibat dari perbedaan pendapat itu terjadilah Peristiwa 17 Oktober yang pada dasarnya merupakan reaksi emosional tentara atas perlakuan politisi sipil.⁶ Pada perkembangan selanjutnya tersebar isu bahwa peristiwa itu merupakan suatu usaha kudeta. Untuk menangkis isu tersebut Sri Sultan HB IX segera membisikkan kepada Bung Karno, bahwa apa-apa yang dilakukan oleh tentara itu bukanlah suatu kedeta, melainkan semacam ungkapan protes saja. Tetapi kemudian Sri Sultan sendiri dianggap sebagai salah satu anggota "Kelompok 17 Oktober", padahal mereka tidak pernah membuat organisasi atau mengelompokkan diri.⁷ Oleh sebab itu Sri Sultan mengundurkan diri. Mulai saat itu Sri Sultan seolah-olah tenggelam dalam kaneah percaturan politik Indonesia.

Setelah tidak memegang jabatan apapun di lingkungan pemerintah pusat, maka Sultan kembali ke Yogyakarta. Kedatangannya disambut dengan gembira, karena Sri Sultan akan aktif kembali memegang jabatannya sebagai kepala daerah. Namun demikian, walaupun Sultan tak ikut lagi dalam kabinet, hubungannya dengan Bung Karno tetap masih saling menghormati pendirian masing-masing.

4.2 Peranan Sultan Dalam Bidang Sosial dan Ekonomi.

Sri Sultan Hamengku Buwana IX sejak awal memang berpikir dan berbuat untuk mengurangi penderitaan rakyat, kalau tidak dapat menaikkan kesejahteraan mereka. Usaha Sri Sultan dalam upaya untuk menaikkan kesejahteraan rakyatnya telah ditempuh dengan berbagai cara. Antara lain melalui pertanian dan perkebunan.

Oleh sebab itu, apalagi dengan adanya pengakuan kedaulatan oleh Belanda pada 27 Desember 1949, maka berangsur-angsur jalannya roda perekonomian ditata sejalan dengan penataan itu, pada tahun 1954 Sri Sultan HB IX mendirikan sebuah organisasi tani yang diberi nama Yayasan Kredit Tani (Yakti). Organisasi ini berusaha dalam bidang penanaman tembakau virginia dan berfungsi sebagai penyalur kredit bagi petani-petani.⁶ Pada tahun berikutnya Yakti bermaksud memperluas usahanya untuk menanam tebu dan mendirikan pabrik gula. Namun disayangkan, belum genap satu tahun berdiri organisasi tersebut terpaksa dibubarkan. Pembubaran itu disebabkan oleh adanya penyelewengan-penyelewengan dalam tubuh organisasi, khususnya yang berkaitan dengan masalah keuangan.

Walaupun pada kenyataannya Yakti telah dibubarkan, Sri Sultan HB IX tetap menghendaki usaha penanaman tebu dan rencana mendirikan pabrik gula tetap terus berjalan. Dengan dibangunnya pabrik gula baru itu nanti dimaksudkan untuk mengganti sebagian dari 17 pabrik gula Belanda yang telah dihancurkan pada waktu Agresi Belanda II. Adapun maksud Sri Sultan yang lain adalah dengan dibangunnya pabrik gula baru diharapkan dapat menampung ribuan buruh gula non aktif, buruh tani maupun orang-orang yang memerlukan pekerjaan.

Ketika rencana itu oleh Panitia Pendiri Pabrik Gula (PPPG) disampaikan kepada DPR Daerah Istimewa Yogyakarta, partai-partai politik mulai memperdebatkan soal tempat di mana pabrik akan dibangun. Masing-masing partai menghendaki agar pabrik gula baru nanti dibangun di daerah yang banyak pengikutnya.⁹ Pertentangan antar partai semakin hari semakin serius, sehingga kemungkinan dapat mengancam rencana pembangunannya. Namun semuanya dapat teratasi, setelah Sri Sultan HB IX memutuskan bahwa penanganan dan pengawasan pembangunannya langsung dibawah wewenang pemerintah pusat. Kemudian untuk lokasinya diusulkan bekas Pabrik Gula Podakan dan bekas Pabrik Gula Gesikan, dengan berbagai macam pertimbangan. Akhirnya oleh Sri Sultan ditentukan bahwa pendirian pabrik gula baru itu dibangun dibekas pabrik Podakan atas pertimbangan praktis, dengan nama "Pabrik Gula Madukismo".

Berhubung pada waktu itu sulit mendapatkan kredit lunak dari luar negeri dan hanya Republik Jerman Timur satu-satunya negara yang bersedia memberi pinjaman, maka pada tahun 1955 pemerintah membeli mesin pabrik dari negara tersebut.

Pembangunan Pabrik Gula Madukismo yang dibiayai dengan dana dari pemerintah pusat sebesar 200 juta rupiah itu, akhirnya dapat diselesaikan pada 31 Maret 1958, dengan ditandai perletakan batu terakhir oleh Sri Sultan Hamengku Buwana IX. Dua bulan kemudian tepatnya 29 Mei 1958 secara resmi dibuka oleh Presiden Sukarno. Sebelum Presiden Sukarno menyampaikan pidato peresmianya terlebih dahulu Sri Sultan Hamengku Buwana selaku Presiden Direktur Pabrik Gula Madu Baru di dalam pidato pembukaannya menerangkan :

" ... bahwa biaya pendirian pabrik tersebut dipinjam dari pemerintah pusat. Bila uang pinjaman itu nanti dikembalikan, lalu dipinjamkan lagi kepada pemerintah daerah untuk mendirikan perusahaan-perusahaan lain yang penting. Dengan demikian, maka modal itu merupakan modal pokok untuk membangun industri di daerah Yogyakarta".¹⁰

Untuk selanjutnya Sri Sultan menyampaikan terimakasihnya kepada ahli teknik dari Jerman Timur yang telah memberikan pekerjaan pendirian Pabrik Gula Madukismo. Di samping itu, usaha Sri Sultan

selanjutnya adalah mencari modal kepada pemerintah pusat Untuk mengadakan Pekan Raya Kerajinan Nasional (PRKN) yang akan diadakan di Yogyakarta. Dana yang diperlukan sekitar 500 ribu rupiah, antara lain untuk sewa tanah. Adapun maksud diadakannya Pekan Raya itu untuk mendorong perkembangan kerajinan dan industri rakyat dengan bahan-bahan yang ada dan terdapat di dalam negeri. Selain itu Pekan Raya tersebut diadakan untuk memperingati dua windu atau 16 tahun kemerdekaan RI. Rencana pelaksanaan Pekan Raya itu selama 45 hari, yaitu mulai dari 29 Juni 1961 sampai 17 Agustus 1961.

Selain masalah-masalah ekonomi, masalah sosialpun tak luput dari perhatian Sri Sultan. Pada 11 Februari 1954 Sri Sultan berpendapat, di samping sumbangan uang, pakaian dan barang-barang lainnya keperluan sehari-hari untuk para korban Merapi yang diberikan oleh rakyat pada umumnya, ada yang lebih penting lagi yaitu adanya bantuan darah. Dengan adanya bantuan darah itu besar kemungkinannya para korban yang mendapat luka-luka dan kekurangan darah dapat segera tertolong. Untuk itu maka diperlukan donor sebanyak-banyaknya. Dalam kesempatan itu Sri Sultan sanggup menyumbangkan darahnya, tentu dengan pemeriksaan dokter.¹¹

4.3 Peranan Sultan dalam Bidang Agama dan Budaya

Kendati Sri Sultan HB IX adalah seorang muslim dan bergelar *Khalifatullah* dan *Panetep Panatagama*, beliau tidak pernah membedakan agama di dalam pergaulan dengan masyarakat. Semua umat beragama mereka terima dan mendapat perhatian yang sama dari tokoh yang amat bijaksana itu.

Menurut H. Mu'in Umar,¹² Sultan sangat berjasa dalam menyemarakkan syiar Islam khususnya di Yogyakarta dan sekitarnya. Hal tersebut dapat dilihat dari kelangsungan tradisi sekaten, yang pada prinsipnya merupakan sarana dakwah Islam sejak zaman Sunan Kalijaga. Selain itu bahwa manifestasi gelar sultan sebagai *Panetep Panatagama*, antara lain dengan mengangkat penghulu kraton, mendirikan masjid Sulthoni di empat penjuru wilayah Yogyakarta serta menempatkan takmir masjid yang masih termasuk kerabat kraton.

Namun demikian, Sultan tetap memberikan tempat yang leluasa bagi perkembangan agama-agama lain. Sebagai seorang raja yang bijaksana, beliau tidak pernah membedakan agama dalam pergaulan. Atas sikapnya yang demikian itu, menjadikan Sultan figur pujaan bagi umat beragama.

Menurut Simuh,¹³ gelar *Panetep Panatagama* dan *Khalifatullah* memang dalam konteks Islam. Dengan gelar tersebut, Sri Sultan berusaha mengembangkan agama Islam di wilayahnya. Namun demikian, selaku seorang raja yang amat bijaksana ia merangkul pula pemeluk agama-agama yang lain. Memang demikian semestinya, pemeluk agama yang baik. Dalam Islam, toleransi terhadap umat lain agama juga diajarkan. Dan ternyata Sri Sultan mampu menetralkannya dengan baik, sehingga seluruh umat beragama merasa mendapat perhatian dari beliau.

Menurut Romo Sandiwanbroto,¹⁴ Sri Sultan merupakan sosok pemimpin yang tak membedakan agama. Walaupun Sri Sultan mendapat julukan *Panetep Panatogomo*, dan beragama Islam, namun agama-agama lain mendapat kesempatan dan perhatian yang sama. "Kita tak pernah mendapat rintangan dalam menjalankan ibadah". Demikian pula dalam pembangunan tempat-tempat peribadatan berupa kapel maupun gereja-gereja selalu tidak mendapat rintangan.

Dalam bidang budayapun, Sri Sultan Hamengku Buwana termasuk salah seorang raja pecinta seni yang kreatif. Tentang kreatifitas Sri Sultan dapat dibuktikan dengan karya-karya tari yang pernah diciptakan. Karya-karya itu antara lain *Bedhaya Sapta*, *Bedhaya Wiwaha Sang Askara*, *Bedhaya Damarwulan* dan *Tari Golek Menak*.¹⁵

Tari Golek Menak diciptakan oleh Sri Sultan HB IX pada tahun 1941. Karya itu muncul setelah melihat pertunjukan *Wayang Golek Menak* yang dilakukan oleh seorang dalang dari Bagelen, daerah Kedu.¹⁶ Pertunjukan tersebut dilaksanakan di *Tratag Bangsal Kencana* selama dua hari. Atas dasar hal tersebut, Sri Sultan segera memanggil para tokoh pakar tari, karawitan dan tembang dari kraion Yogyakarta.

Untuk melaksanakan gagasan tersebut, Sri Sultan mewujudkan Karya *Tari Golek Menak*, dengan pesan antara lain karya tari harus

mudah dimengerti oleh masyarakat. Menurut Dinusatomo,¹⁷ antara tahun 1945--1950 proses penggarapan Tari Golek Menak mengalami hambatan, karena situasi negara RI yang pada waktu itu sedang mengalami perang kemerdekaan. Namun pada prinsipnya dasar gerak tarinya telah disetujui Sultan HB IX. Konsep pemikiran tim tari Golek Menak berdasarkan atas kaidah-kaidah penjiwaan Tari Klasik gaya Yogyakarta atau "Joged Mataram" yang terdiri atas 4 unsur yakni sawiji, greget, sengguh dan ora mingkuh.¹⁸

Selain itu, di Yogyakarta juga berkembang Tari Golek Menak berupa tari dagelan, yang berbeda dengan prinsip-prinsip hasil ciptaan Tari Golek Menak yang diciptakan oleh Sri Sultan HB IX.

Catatan

1. A.H. Nasution, *Sekitar Perang Kemerdekaan Indonesia*, jilid 2 (Bandung: Angkasa, 1979), hal. 277.
2. *Sri Sultan: Hari-hari Hamengku Buwana IX* (Jakarta: Pustaka Utama Grafiti, 1988), hal. 45.
3. Sartono Kartodirdjo, *Sejarah Nasional Indonesia Jilid VI* (Jakarta: Balai Pustaka, 1977), hal. 71.
4. Sri Sultan : Hari-hari Hamengku Buwana IX, *op.cit.*, hal. 46.
5. *Riwayat Hidup Sri Paduka Kangjeng Sultan Hamengku Buwana di Yogyakarta* (Widya Budaya Karaton Ngayogyakarta), ketikan, hal. 15.
6. Sri Sultan : Hari-hari Hamengku Buwana IX, *op. cit.*, hal. 47.
7. *Ibid*
8. Selo Soemardjan, *Perubahan Sosial Di Yogyakarta* (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 1981), hal. 237--238.
9. *Ibid.*, hal 240--241.
10. *Harian Kedaulatan Rakyat*, 30 Mei 1958
11. *Riwayat Hidup Sri Paduka Kangjeng Sultan Hamengku Buwana IX di Yogyakarta*, *op. cit.*, hal. 17.

12. *Wawancara* Kedaulatan Rakyat dengan H. Mu'in Umar dan dimuat harian ini pada 16 Oktober 1988.
13. *Wawancara* Kedaulatan Rakyat dengan Simuh dan dimuat harian ini pada 16 Oktober 1988.
14. *Wawancara* Kedaulatan Rakyat dengan Romo Sandiwanbroto dan dimuat harian ini pada 16 Oktober 1988.
15. Soedarsono, dkk. *Sultan Hamengku Buwana Pengembang Dan Pembaharu Tari Jawa Gaya Yogyakarta* (Yogyakarta Pemerintah Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, 1989). hal. 36.
16. *Harian Kedaulatan Rakyat*, 10 Nopember 1988.
17. *Ibid*
18. *Ibid*.

BAB V

PERANAN SRI SULTAN HAMENGKU BUWONO IX PADA MASA ORDE BARU

5.1 Lahirnya Orde Baru

Seperti yang telah diuraikan di dalam tulisan pada bab-bab sebelumnya mengenai peranan dan tempat Sri Sultan dalam sejarah Republik Indonesia maka terbukti bahwa peranan dan tempatnya sangat istimewa. Penentuan pilihan pada 18 Agustus 1945 terhadap Republik Indonesia menunjukkan sikap politiknya yang jelas dan tanpa keraguan. Berdasarkan hal ini maka pemindahan ibukota ke Yogyakarta pada 5 Januari 1946 merupakan bukti dari ketegasan komitmennya tersebut. Demikianlah maka pada saat-saat yang kritis dari Republik Indonesia Sri Sultan selalu memainkan peranan yang penting. Peranan tersebut tidak hanya berhenti di sini melainkan masih akan terjadi beberapa kali di dalam sejarah Republik Indonesia. Dalam hal ini sangatlah beralasan pertanyaan yang dilontarkan oleh Mohammad Roem, yaitu bahwa bagaimanakah nasib republik ini apabila Sri Sultan tidak ada.

Pada waktu penumbangan Orde Lama peranan Sri Sultan juga sangat besar. Seperti diketahui setelah menjabat sebagai Menteri Pertahanan di dalam Kabinet Wilopo sejak 3 April 1952 sampai dengan 30 Juli 1953 maka seolah-olah Sri Sultan mengundurkan diri dari kegiatan politik. Akan tetapi pada masa Demokrasi Terpimpin

sesungguhnya tidak mengundurkan diri sama sekali dari dunia politik oleh karena tugas-tugas kenegaraan seperti Ketua Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), Ketua KONI, Pramuka dan Pariwisata masih menjadi tanggung jawabnya. Salah satu alasan yang seringkali dikatakan sehubungan dengan ketidakmunculannya di panggung politik ialah oleh karena Sri Sultan melihat suatu "monster verbon" antara Bung Karno dan Partai Komunis Indonesia.² Dalam posisi yang tampaknya menjauhi dunia politik ini ditafsirkan sebagian orang dengan perumpamaan tidak ikut berbuat sesuatu itu sama dengan berbuat sesuatu pula.³ Sikap ini merupakan kelebihanannya, yaitu sikap di dalam bahasa Jawanya "kulino meneng" sehingga diberi gelar "Sphink" dari Jawa. Hal ini dapat dipahami bahwa memang dalam tradisi politik Jawa maka sikap diam adalah merupakan sikap vokal tersendiri.

Pada masa pergolakan Gestapu PKI maka sekali lagi terbukti peranannya sebagai seorang pemimpin bangsa. Setelah masa kritis ini berhasil diatasi dan Presiden Sukarno mengeluarkan Surat Perintah Sebelas Maret (Supersemar) maka dimulailah suatu usaha untuk memulihkan keadaan politik dan ekonomi nasional. Di dalam periode ini terdapat beberapa fase transisional yang penting yaitu fase pertarungan yang dimulai pada Oktober 1965 sampai dengan Maret 1966, fase konsolidasi sampai dengan Maret 1967 dan yang terakhir ialah fase rehabilitasi dan stabilisasi dari kepercayaan di dalam negeri dan dari luar negeri. Pada periode ini maka peranan *triumvirat* yang terdiri atas Soeharto sebagai Waperdam Pertahanan dan Keamanan, Sri Sultan sebagai Waperdam bidang Ekuin dan Adam Malik sebagai Waperdam bidang Sosial Politik/Menteri Luar Negeri sangat besar.⁴

Salah satu alasan penting penonjolan *triumvirat* ini ialah untuk menghilangkan kesan militerisme di dalam kepemimpinan Orde Baru. Isu ini berkembang di dalam negeri dan luar negeri.

Seperti yang sudah disebutkan di atas mengenai usaha pemulihan keadaan politik dan ekonomi nasional pada masa awal Orde Baru maka fase pertama merupakan tahap yang sangat menentukan. Fase ini disebut fase pertarungan fisik yang berlangsung dari Oktober 1965 sampai dengan Maret 1966. Penumpasan pemberontakan PKI yang dilakukan sesudah mereka melakukan aksinya pada tanggal

30 September 1985 ialah merupakan usaha pertama yang dilakukan untuk memulihkan situasi politik dan ekonomi nasional. Usaha ini memerlukan kerjasama dari berbagai pihak oleh karena penyusupan PKI ke dalam struktur birokrasi pemerintahan sudah sedemikian dalam.⁵ Hal ini dapat dilihat dari peranan mereka di dalam jajaran ABRI, aparatur negara, partai politik dan organisasi massa. Untuk menghadapinya maka kelompok yang tetap setia terhadap Pancasila adalah merupakan pendukung ABRI di dalam menyusun kekuatan Orde Baru. Dalam situasi seperti ini maka kedudukan, wibawa dan integritas Sri Sultan merupakan modal yang utama. Pada fase ini Presiden Sukarno tetap dipertahankan sebagai presiden oleh karena dukungan yang masih kuat terhadapnya. Kenyataan ini dapat diketahui dari berbagai peristiwa yang terjadi pada Februari 1966 di mana masa ini disebut dengan periode anti klimaks. Disebut dengan periode anti klimaks oleh karena terjadinya berbagai demonstrasi dari para mahasiswa dan pendukung Presiden Sukarno (Barisan Sukarno).

Fase kedua dari pemulihan situasi politik dan ekonomi ialah periode konsolidasi. Peranan Sri Sultan pada masa ini tampak lebih ke permukaan oleh karena kedudukannya sebagai Waperdam bidang Ekuin. Periode konsolidasi ini dimulai sejak dikeluarkannya Surat Perintah Sebelas Maret pada 11 Maret 1966 yang pada pokoknya memutuskan Letnan Jendral Suharto sebagai Menteri Panglima Angkatan Darat untuk mengambil segala tindakan yang perlu bagi terwujudnya stabilitas nasional. Kemudian segera diadakan beberapa kebijaksanaan di bidang politik dan ekonomi. Tahap ini berakhir dengan dilangsungkannya Sidang Umum Luar Biasa MPRS pada Juni 1966. Keputusan yang dihasilkan dari sidang ini ialah ditunjuknya Suharto sebagai pejabat Presiden dengan segala kekuasaan pemerintahan di samping Presiden Sukarno. Dengan demikian dimulailah suatu periode yang disebut dengan tahap konsolidasi kedua sampai dengan dilangsungkannya Sidang Umum MPRS pada Maret 1967.

5.2 Peranan Dalam Bidang Politik dan Ekonomi

Di dalam susunan Kabinet Ampera yang disusun setelah pengangkatan Suharto sebagai Pejabat Presiden atau kabinet pertama

pada masa Orde Baru maka Sri Sultan menjabat sebagai Menteri Utama Ekonomi dan Keuangan. Program kabinet ini yang merupakan tuntutan politik paling diutamakan ialah perbaikan terhadap kondisi perekonomian rakyat. Dalam hubungannya dengan ini maka kedudukan Sri Sultan sebagai Menteri Utama Ekonomi dan Keuangan (Menutama Ekku) ialah sangat penting. Program ekonomi meliputi rehabilitasi dan stabilisasi perekonomian rakyat, rehabilitasi prasarana dan sarana transportasi serta komunikasi, kapasitas produksi dan sebagainya yang selama ini terlantar dan tidak dipergunakan secara maksimal.⁶

Seperti diketahui bahwa inflasi yang terjadi pada Juni 1966 ialah 650%. Angka ini merupakan jumlah yang sangat besar (*hyperinflation*) sehingga diperlukan berbagai kebijaksanaan dalam bidang ekonomi untuk menurunkannya. Kebijaksanaan yang dimaksudkan dalam hal ini ialah kebijaksanaan fiskal (APBN), moneter, ekspor dan import, investasi dalam dan luar negeri. Sebagai hasilnya maka dikeluarkan sejumlah Undang-undang dalam bidang perbankan, penanaman modal luar negeri, penanaman modal dalam negeri dan pembentukan IGGI yang terdiri dari negara Jepang, Amerika Serikat dan negara-negara Eropa Barat. Di samping itu juga diadakan berbagai perombakan terhadap kebijaksanaan dan institusi dari sistem Demokrasi Ekonomi dan Politik Terpimpin yang berlaku pada masa Orde Lama. Perombakan tersebut dilakukan dengan cara:⁷

1. De-isolasi, yaitu membuka diri dalam bidang ekonomi terhadap lalu lintas ekonomi internasional.
2. Depolitisasi dalam bidang ekonomi.
3. Debirokratisasi, yaitu melepaskan ekonomi dari campur tangan birokrasi.
4. Deregularisasi yang diharapkan akan dapat memberikan peluang munculnya prakarsa dari masyarakat.
5. Dekonsentrasi dan desentralisasi, yaitu negara harus memberikan keleluasaan dan wewenang terhadap daerah untuk mengembangkan ekonomi daerah.

Berbagai macam cara tersebut dilakukan dalam rangka memperoleh kembali kepercayaan masyarakat dan dari negara-negara lainnya.

Koordinasi rehabilitasi dan stabilisasi daerah (Korested) ialah merupakan salah satu wujud nyata dari program desentralisasi ekonomi. Di samping itu koordinasi ini juga berhubungan dengan kelancaran pemerintahan di daerah setingkat provinsi. Sistem Panca Tunggal yang berlaku pada masa ini diharapkan berjalan dengan peran Gubernur sebagai pimpinan tunggal di daerah. Sejalan dengan hal ini maka dalam rangka dekonsentrasi juga dilakukan usaha-usaha untuk meng-sipilkan berbagai bidang yang belama itu dikuasai oleh militer. Bidang-bidang tersebut antara lain sektor perhubungan darat, laut dan udara.

Di samping usaha rehabilitasi dan stabilitasi ekonomi di dalam negeri yang sudah diuraikan di atas maka usaha tersebut juga dilakukan di luar negeri. Di dalam paket kebijaksanaan ekonomi Kabinet Ampera maka pemulihan kepercayaan dari luar negeri ini sangat dipentingkan.

Peranan dari *Triumvirat* yang sudah disinggung di atas kambali menunjukkan hasilnya. Dalam hal ini Presiden memberikan tugas kepada Adam Malik untuk mengembalikan posisi Indonesia di dalam Persatuan Bangsa-Bangsa (PBB) dan kepada Sri Sultan untuk membawa kembali Indonesia menjadi negara anggota Bank Dunia dan Dana Moneter Internasional.⁸ Perjalanan Sri Sultan dan rombongannya ke beberapa negara di Eropa, Jepang dan Amerika Serikat tersebut oleh karena pentingnya misi yang dibawa maka oleh negara-negara yang dikunjungi mendapat sebutan sirkusnya Sri Sultan. Sebagai hasil dari misi Sri Sultan ini antara lain ialah penanggungan pembayaran hutang Indonesia kepada Jepang, banyaknya negara yang berniat melakukan investasi di Indonesia dan memberikan kredit baru serta dibentuknya negara-negara donor yang tergabung di dalam IGGI (*Inter-Governmental Group on Indonesia*).⁹

Keberhasilan ini menunjukkan bahwa kepercayaan dari dalam dan luar negeri terhadap program yang dilakukan oleh pemerintah sangat besar. Di samping itu juga kepercayaan terhadap orang yang memimpin program merupakan modal utama sehingga dalam hal ini

pengangkatan Sri Sultan menjadi Menutama Ekku sangat tepat. Lebih lanjut maka keberhasilan program rehabilitasi, dan stabilisasi ini merupakan modal dasar bagi negara untuk memulai program pembangunan nasional atau yang dikenal dengan Pembangunan Lima Tahun I (Pelita I) pada tahun 1969.

Di samping usaha rehabilitasi dan stabilisasi ekonomi serta membawa kembali ekonomi Indonesia ke dalam proses pembangunan melalui Program Pelita maka dalam bidang politik juga dilakukan hal yang sama. Strategi politik Orde Baru ditempuh melalui empat tahap, yaitu penghancuran Partai Komunis Indonesia, konsolidasi pemerintahan dan pemurnian Pancasila dan UUD 1945, menghapuskan dualisme dalam kepemimpinan nasional antara Presiden Sukarno dan Pejabat Presiden Suharto dan mengembalikan kestabilan politik serta merencanakan pembangunan.¹⁰ Tahap pertama dan kedua sudah terlaksana dengan penggantian Kabinet Dwikora dan dibentuknya Kabinet Ampera, sedangkan tahap ketiga dan keempat dilakukan dengan Sidang Umum MPRS V pada 27 Maret 1968. Dalam sidang ini di samping mengangkat Pejabat Presiden Suharto menjadi Presiden juga sudah menetapkan tugas pokok Kabinet Pembangunan yang kemudian dikenal dengan nama Panca Krida. Dengan dasar ini pulalah mulai dilaksanakan program Pembangunan Lima Tahun I (Pelita I) pada April 1969.¹¹

Pembangunan politik yang menjadi prioritas pada masa ini ialah sesuai dengan kebutuhan negara yang paling penting, yaitu strukturisasi lembaga-lembaga politik (infra struktur politik). Dalam hal ini maka Pemilihan Umum (Pemilu) menjadi perhatian yang utama sebab wakil-wakil rakyat yang menduduki lembaga perwakilan rakyat belum didasarkan pada pemilihan oleh rakyat akan tetapi oleh presiden. Rencana penyelenggaraan Pemilu ini masih terbentur dengan belum adanya Undang-undang Pemilu yang sesuai dengan keadaan masyarakat pada masa itu. Sesudah melalui proses selama kurang lebih dua tahun maka pada tahun 1971 baru dapat dilaksanakan Pemilu.

Pada pesta demokrasi atau Pemilu yang sudah lama ditunggu oleh rakyat ini maka Golongan Karya (Golkar) mengumpulkan suara terbanyak dari 9 Partai Politik lainnya. Kemudian sebagai hasil Pemilu ini ialah dibentuknya Kabinet Pembangunan II, di mana Sri Sultan

dipercaya untuk menduduki jabatan sebagai Wakil Presiden. Jabatan ini secara resmi dilaksanakan sejak 24 Maret 1973. Kemunculan Golongan Karya ini tidak terjadi secara tiba-tiba melainkan sudah dirintis sejak 20 Oktober 1964 dengan nama Sekretariat Bersama Golongan Karya (Sekbergolkar).¹² Di dalam Sekbergolkar ini maka Sri Sultan yang sebelumnya dikenal sebagai tokoh politik nasional non partai menjadi salah seorang pembinanya.¹³ Seperti diketahui bahwa organisasi ini menghimpun kurang lebih 300 buah organisasi fungsional-non politis yang tidak berorientasi politik dengan SOKSI, MKGR dan KOSGORO sebagai organisasi yang menjadi tulang punggungnya.

Kehadiran Golongan Karya pada masa Orde Baru dan kemudian menjadi semakin kuat setelah Pemilu I dapat dipandang sebagai realisasi dari keinginan para elit politik yang terdiri dari ABRI dan golongan teknokrat dalam rangka pembaharuan politik. Dalam hal ini Sri Sultan yang sebelumnya sudah berperan di dalam Sekbergolkar kemudian secara resmi diangkat sebagai salah satu anggota Dewan Pembina Golongan Karya Pusat.¹⁴

Salah satu yang menjadi cita-cita Sri Sultan pada waktu menjabat sebagai Wakil Presiden ialah pembangunan demokrasi. Pembangunan demokrasi ini harus dilakukan seawal mungkin bersamaan dengan pembangunan ekonomi. Hal ini dimaksudkan untuk menghindari terjadinya distorsi persepsi dan partisipasi masyarakat di mana apabila ini terjadi maka dapat mengganggu jalannya program-program yang telah direncanakan oleh pemerintah. Apa yang dikhawatirkan oleh Sri Sultan ini kemudian menjadi kenyataan, yaitu bahwa pembangunan demokrasi yang belum sepenuhnya dilaksanakan mengakibatkan munculnya berbagai kritik dari masyarakat. Kritik-kritik yang agak gencar mulai muncul sekitar tahun 1973 dan mencapai puncaknya pada peristiwa Malapetaka Lima belas Januari 1974 (Malari). Pergolakan politik yang dimotori oleh para mahasiswa ini berlangsung sampai dengan tahun 1978.¹⁵

Sesudah memegang jabatan sebagai Wakil Presiden selama kurang lebih lima tahun maka secara resmi pada 23 Maret 1978 mengundurkan diri dari jabatannya dan tidak bersedia untuk

dicalonkan kembali pada masa selanjutnya. Sebagai alasan pengunduran dirinya ini ialah berhubungan dengan kesehatan terutama matanya yang secara periodik harus diperiksa di luar negeri.¹⁶ Di samping itu juga ingin beristirahat dari kesibukannya di bidang politik dan kenegaraan. Hal ini cukup beralasan oleh karena memang sudah selama 32 tahun secara terus menerus mengabdikan dirinya pada negara dengan jabatan-jabatan resmi sebagai Menteri Negara, Menteri Pertahanan, Wakil Perdana Menteri, Ketua BPK, Menteri Koordinator, Menteri Utama dan Wakil Presiden. Walaupun demikian Sri Sultan masih secara resmi menduduki satu jabatan politis, yaitu sebagai Gubernur Kepala Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta yang dijabat sejak tahun 1945.

Satu samudera kehidupan yang amat luas sudah diarunginya, pahit getir dan manisnya kehidupan politik dalam proses perkembangan negara sudah dirasakan oleh Sri Sultan. Dalam posisi dan peranannya ini maka oleh berbagai kalangan disejajarkan dengan pemimpin bangsa seperti halnya Soekarno, Mohammad Hatta dan Sutan Syahrir sebagai tokoh pembawa suara hati bangsa Indonesia.¹⁷ Sri Sultan patut dikenang di dalam sejarah Indonesia sebagai seorang Pejuang yang moralitas politiknya sangat tinggi dan setia terhadap nilai-nilai bangsa dan budayanya. Kemudian sikap hidup yang selalu dipegangnya dalam kehidupan politik dan kenegaraan yang menjadikan Sri Sultan seorang tokoh yang berbeda dari tokoh-tokoh lainnya ialah sikap hidup yang berlandaskan pada falsafah Jawa: "sepi ing pamrih".

Kepala Daerah Istimewa Yogyakarta

Sejarah dijadikannya Yogyakarta sebagai suatu Daerah Istimewa dalam Negara Republik Indonesia berhubungan erat dengan peranan Sri Sultan pada masa awal berdirinya Negara Republik Indonesia. Pilihan politik untuk memihak kepada Republik Indonesia pada 18 Agustus 1945 dan kesediaan Yogyakarta menjadi Ibukota sementara pada 5 Januari 1946 merupakan modal dasar Sri Sultan di dalam proses perjuangan dan pembangunan negara.

Dalam Amanat yang dikeluarkan oleh Sri Sultan dan disetujui oleh Komite Nasional Indonesia Yogyakarta pada 5 September 1945 dengan jelas ditegaskan mengenai kedudukan Yogyakarta di dalam

negara Republik Indonesia. Selain itu juga pelaksanaan tugas sebagai kepala daerah bersama-sama dengan K.G.P.A.A. Paku Alam VIII bertanggung jawab langsung kepada presiden.¹⁸ Kedudukan ini kemudian disahkan dengan Undang-Undang No. 3 tahun 1950 oleh pemerintah pusat. Dengan demikian Daerah Istimewa Yogyakarta merupakan kelanjutan dari Kasultanan, sehingga secara otomatis Sri Sultan dan Sri Paku Alam menjadi Gubernur dan wakil Gubernur untuk waktu yang tidak terbatas.¹⁹ Pada perkembangannya maka hal tersebut dikukuhkan dengan Undang-Undang No. 5 tahun 1974 mengenai pokok-pokok pemerintahan di Daerah. Dalam undang-undang ini disebutkan bahwa kedudukan Sri Sultan dari Sri Paku Alam sebagai Gubernur dan Wakil Gubernur ialah tidak terikat oleh masa jabatan dan syarat tata cara pengangkatan. Sebagai pemegang kekuasaan pelaksana harian oleh karena kesibukan Sri Sultan di luar Yogyakarta maka dilakukan oleh Sri Paku Alam VIII.

Berbagai program yang dilaksanakan oleh Sri Sultan sebagai Kepala Daerah meliputi pembangunan bidang ekonomi, sosial, budaya, dan pendidikan. Di dalam pembangunan ekonomi daerah maka Sri Sultan sudah merintisnya sejak jaman Jepang dengan jalan sering melakukan kunjungan ke daerah-daerah di Yogyakarta. Hal ini yang pada nantinya mengilhami dibentuknya Yayasan Kredit Tani Indonesia (Yakti) di Yogyakarta. Dalam bidang pendidikan maka sifat kolonial dari pendidikan dihapuskan sehingga tujuan pendidikan ialah mendidik kesederhanaan, hemat, bertanggung jawab, mandiri dan menanamkan rasa kebangsaan dan kebudayaan serta kesenian.²⁰

Dalam perkembangannya maka Propinsi DIY mengalami kemajuan yang sangat pesat terutama dalam bidang ekonomi. Pada tahun 1980-an propinsi ini merupakan propinsi yang kemakmurannya nomor tiga setelah DKI Jakarta dan Sumatera Barat.²¹ Apakah yang menjadi penyebab dari tingginya angka kemajuan tersebut, di satu sisi propinsi ini berpenduduk padat dan secara teori dapat dikategorikan sebagai daerah miskin dengan kekayaan alam. Kunci dari semuanya ini ialah terletak pada faktor kepemimpinan Sri Sultan di dalam menjalankan program-program pembangunan daerah. Program yang berhasil tersebut antara lain meliputi pembangunan pertanian dan pedesaan. Pembangunan pertanian dan pedesaan ini berdasarkan efisiensi dari potensi daerah yang sudah ada. Hal ini disebut dengan

ciri pembangunan yang desentralistik dimana pola umum pembangunan nasional tidak sepenuhnya diikuti.²²

Model pembangunan yang diterapkan di DIY, ini misalnya dapat dilihat dari pembangunan sosial terlebih dahulu sebelum pembangunan ekonomi, pembangunan yang tidak mendorong timbulnya arus urbanisasi dan pembangunan yang mengandalkan pengembangan sumber daya manusia. Tujuan dari pembangunan tersebut ialah mengutamakan pembangunan manusia seutuhnya dengan memacu status kesehatan dan pendidikan yang baik. Berkat kepemimpinan Sri Sultan dan Sri Paku Alam VIII yang berwibawa maka partisipasi masyarakat dalam pembangunan daerah sangat besar. Pemberian otonomi yang besar terhadap daerah ini pada akhirnya merupakan faktor yang juga berperan terhadap pembangunan daerah "istimewa" ini.

Kenyataan sejarah membuktikan bahwa segala sesuatu yang dimulai di Yogyakarta selalu membuahkan hasil. Sejak perjuangan sebelum kemerdekaan dan sesudah kemerdekaan maka Yogyakarta di bawah kepemimpinan Sri Sultan tidak pernah berhenti dari perjuangan. Kelebihannya di dalam menatap masa depan terbukti dengan pengembangan pendidikan, yaitu didirikannya Universitas Gadjah Mada yang menjadi tonggak sebutan kota pelajar dan mahasiswa bagi Yogyakarta. Dengan status sebagai kota pendidikan maka diharapkan nantinya para pemimpin bangsa akan muncul dari sini.²³ Sampai sekarang masih banyak tanah milik kraton yang dipergunakan untuk pendirian sekolah-sekolah. Hal ini merupakan bukti dari sikap Sri Sultan yang selalu konsisten dan setia terhadap segala hal yang menjadi keyakinannya. Di samping sebutan sebagai kota pendidikan dan perjuangan maka sebutan sebagai kota kebudayaan dan pariwisata merupakan hasil dari kepemimpinan Sri Sultan.

5.3 Peranan Dalam Bidang Sosial, Budaya dan Keagamaan

5.3.1 Peranan Dalam Bidang Sosial : Olah Raga

Di samping peranan Sri Sultan dalam bidang politik juga peranan dan jasanya dibidang sosial seperti olah raga, kepramukaan dan

kepariwisataan sangat besar. Untuk peranannya dibidang sosial ini dilakukan bersamaan dengan kesibukannya sebagai negarawan dan secara lebih intensif dilakukan sesudah Sri Sultan mengundurkan diri dari jabatan Wakil Presiden sejak 23 Maret 1978.

Kecintaan Sri Sultan terhadap dunia olah raga sebenarnya sudah berlangsung sejak lama, yaitu sejak masa kanak-kanak. Pada masa itu G.R.M. Dorodjatun seringkali mengumpulkan para abdi dalem kraton untuk bersama-sama berlatih sepak bola di Alun-alun selatan. Posisi yang selalu dipilihnya ialah sebagai penjaga gawang.²⁴ Kebiasaan ini terus berlanjut pada masa studi di negeri Belanda. Sri Sultan terdaftar sebagai anggota Klub Sepakbola H.F.C. Haarlem di kota Haarlem.²⁵ Dari pengalamannya ini maka menyebabkan pengetahuan mengenai dunia persepakbolaannya bertambah luas, terutama dalam hal pembinaan sepak bola yang baik.

Sri Sultan dan dunia olahraga sepertinya kemudian menjadi tidak terpisahkan lagi. Sebagai pusat bagi olahraga nasional yang pertama kali dibentuk pada tahun 1947 ialah Persatuan Olahraga Republik Indonesia (PORI) yang dipimpin Oleh Sri Sultan. Adapun untuk kepentingan di tingkat internasional juga dibentuk Komite Olimpiade Republik Indonesia (KORI) pada tahun yang sama dengan ketua Mr. Widodo Sastrodiningrat. Sebagai program pertama ialah mengikuti Olimpiade di London. Rencana ini tidak terlaksana oleh karena beberapa kendala, yaitu keberadaan KORI tidak diakui oleh karena dunia internasional belum mengakui kedaulatan Negara Republik Indonesia akan tetapi apabila KORI berada di bawah Bendera Belanda maka diperbolehkan ikut serta. Kendala lainnya ialah terjadinya Agresi Militer I Belanda pada 21 Juli 1947. Dengan demikian persiapan KORI menjadi batal dan keikutsertaan di Olimpiade London tinggal menjadi keinginan saja.²⁶

Kekecewaan untuk mengikuti Olimpiade London segera dapat diobati dengan keputusan untuk mengadakan Pekan Olahraga Republik Indonesia I (PORI I) di Yogyakarta pada tahun 1948. Walaupun secara resmi diputuskan untuk dilaksanakan di Yogyakarta akan tetapi oleh karena fasilitas olahraga yang lengkap berada di Surakarta, terutama stadion Sriwedari maka pelaksanaan Pekan Olahraga tersebut

dipindahkan ke Surakarta.²⁷ Acara pembukaan Pekan Olahraga yang diketuai oleh Sri Sultan ini dihadiri oleh Presiden Soekarno, Mohammad Hatta, Jendral Sudirman dan pimpinan negara lainnya. Secara umum oleh karena situasi negara yang masih belum sepenuhnya tenang maka Pekan Olahraga ini berlangsung dengan sederhana dan penuh warna perjuangan.

Setelah berhasil menyelenggarakan Pekan Olahraga di Surakarta maka peranan Sri Sultan kembali tampak dengan persiapan Indonesia untuk menyelenggarakan Asian Games IV di Jakarta. Pada masa itu Sri Sultan juga menjabat sebagai ketua Federasi Asian Games (AGF) yang berdasarkan sidangnya di Tokyo pada 23 Mei 1958 menetapkan Indonesia sebagai penyelenggara Asian Games IV. Seperti diketahui bahwa sebelum penyelenggaraannya maka sempat tersendat-sendat oleh karena kasus keikutsertaan Israel dan Taiwan yang tidak mempunyai hubungan diplomatik dengan Republik Indonesia.²⁸ Pada akhirnya berkat sikap tegas Sri Sultan maka penyelenggaraan Asian Games IV yang bertempat di Stadion Istora Senayan dapat berlangsung dengan baik.

Kehidupan Sri Sultan yang sudah tidak dapat dipisahkan dari dunia olahraga ini menjadi semakin semarak dengan peranan yang dijalankannya baik di dunia olahraga dalam negeri maupun di kalangan internasional. Sejak didirikannya Komite Olah Raga Nasional (KONI) pada tahun 1967 jabatan sebagai ketua umum selalu dipercayakan kepada Sri Sultan sampai dengan tahun 1986.²⁹ Kedudukan sebagai anggota kehormatan Federasi Asian Games selalu disandangnya sejak Asian Games IV di Jakarta pada tahun 1958 sampai dengan Asian Games di New Delhi pada tahun 1982. Hal ini membuktikan bahwa kualitas Sri Sultan pada forum tersebut sangat tinggi sehingga sangat pantas apabila disebut sebagai Bapak Olahraga Indonesia.³⁰ Keberhasilan kontingen Indonesia menjadi juara umum SEA Games empat kali berturut-turut membuktikan bahwa pembinaan yang dilakukannya berhasil.

5.3.2 Peranan Dalam Bidang Sosial : Kepramukaan

Keberadaan Sri Sultan memang seakan-akan menyusup di segala macam kegiatan masyarakat. Tidak hanya dalam bidang politik dan

olahraga akan tetapi juga di bidang gerakan Pramuka. Di bidang ini peranan Sri Sultan sebagai peletak tonggak-tonggak penting di sepanjang sejarah kepramukaan di Indonesia sangat besar. Tonggak-tonggak sejarah tersebut ialah semangat demokrasi, pengindonesiaan kepanduan yang disesuaikan dengan nafas Bangsa Indonesia, penggunaan panggilan "kak" bagi para pembina pramuka untuk mengakrabkan suasana, mempopulerkan "Salam Pramuka" dan sebagainya.³¹

Jabatan sebagai Ketua Kwartir Nasional Gerakan Pramuka yang diemban sejak tahun 1968 merupakan tugas Sri Sultan setelah berhasil menggabungkan sekitar 70 organisasi kepanduan yang tersebar di seluruh daerah di Indonesia. Jabatan ini diembannya sampai dengan tahun 1974 atau setelah mengabdikan dirinya selama 15 tahun. Dalam rentang waktu tersebut maka tonggak yang ditancapkan seperti yang telah disebutkan di atas pada intinya ialah berusaha untuk mempopulerkan gerakan pramuka di tingkat nasional maupun internasional.

Di tingkat nasional oleh karena peranan yang besar dalam Bidang Kepramukaan ini maka pada tahun 1961 memperoleh penghargaan dari Presiden Soekarno selaku Ketua Majelis Pembimbing Nasional Gerakan Pramuka diangkat menjadi Pembina Pramuka Ahli bersama-sama dengan Aziz Saleh dan H. Muttahar. Demikian juga pada tahun 1984 mendapat anugerah lencana Tunas Kencana oleh Presiden Soeharto. Di tingkat Internasional maka Sri Sultan juga pernah memperoleh penghargaan tertinggi dalam dunia kepramukaan, yaitu dengan *Bronze Wolf award* dan *Boy Scout of America*. Di samping penghargaan tersebut maka Sri Sultan juga ikut berperan di dalam organisasi kepramukaan dunia yang disebut dengan nama *World Organization of Scout Movement* dan diketuai oleh Raja Swedia.³²

Usaha-usaha Sri Sultan untuk memberikan nilai lebih terhadap gerakan Pramuka ialah dengan mengaktifkan nafas gerakan Pramuka. Pramuka bukanlah sekedar sarana untuk bermain-main akan tetapi juga berfungsi sebagai tempat untuk memperoleh ketangkasan, pembentukan watak dan kekuatan fisik. Di dalam kegiatan pramuka juga seharusnya terbina sikap bakti terhadap orang tua, bangsa dan

negara. Bakti tersebut harus berwujud nyata dan hal ini direalisasikan dalam bentuk *Committe Development Project* di daerah Cibeureum Jawa Barat. Di tempat ini maka anak didik untuk memiliki ketrampilan untuk dibaktikan kepada masyarakat. Gagasan ini jelas merupakan usaha untuk mendinamisasikan gerakan Pramuka untuk sesuai dengan kebutuhan masyarakat.

5.3.3 *Peranan Dalam Bidang Pengembangan Budaya*

Peranan Sri Sultan dalam bidang ini tidak dapat dilepaskan dari kedudukannya sebagai seorang Raja sehingga secara otomatis sebagai pelindung Budaya Jawa. Secara lebih terperinci maka Budaya Jawa tersebut ialah adat istiadat Kraton Yogyakarta, kesenian dan kesusasteraan. Kukuh dan langgengnya budaya dan adat-istiadat Kraton Yogyakarta memang merupakan jasa dari raja-raja yaitu sejak Sultan Hamengku Buwono I hingga Sultan Hamengku Buwono IX. Budaya dan Adat-istiadat Kraton tersebut tidak hanya kukuh dan langgeng dalam arti statis melainkan mengalami perkembangan juga, yaitu munculnya suatu yang baru. Hal ini terutama dapat dilihat dari penciptaan suatu jenis tari baru yang sebelumnya tidak ada atau dari sedikit perubahan teknis suatu upacara tradisional tanpa menghilangkan makna isi dan keagungannya.

Pada pokoknya peranan Sri Sultan dalam pengembangan budaya khususnya Budaya Jawa meliputi berbagai fungsi yang terdapat di dalamnya. Hal ini misalnya dapat dilihat dalam kesenian, Sri Sultan mempunyai peranan dalam fungsinya sebagai pelaku seni, pembina seni, pencipta seni dan pemikir seni.³³ Kemampuannya ini tidak mengherankan apabila dirunut dari latar belakang kehidupannya, dalam hal ini Sri Sultan mewarisi darah seniman dari ayahnya yaitu Sultan Hamengku Buwono VIII yang dikenal seorang seniman besar. Selain itu juga sejak masa kecilnya Sri Sultan sudah memperoleh pendidikan dan pengajaran seni di dalam Kraton. Dengan demikian darah seniman yang diwarisinya dari ayahnya diperkuat dengan faktor lingkungan sehingga di dalam diri Sri Sultan terbentuk jiwa seni yang besar.

Sebagai seorang pelaku seni maka Sri Sultan sejak masa kecilnya sudah menerima pendidikan dan pengajaran Seni Jawa Tradisional

antara lain ialah Seni Tari Jawa. Dalam menarikan suatu jenis tarian maka biasanya Sri Sultan berperan sebagai Gatotkaca.³⁴ Sebagai penari Gatotkaca termasuk lumayan bagus, akan tetapi oleh karena kesibukannya pada masa itu untuk bersekolah sehingga kesenangan untuk menari menjadi semakin berkurang. Akan tetapi bagaimanapun juga Sri Sultan memang dapat disebut sebagai penari atau dalam hal ini ialah sebagai seorang pelaku seni.

Sebagai seorang pembina seni oleh karena sesudah bertahta menjadi seorang Raja maka fungsi sebagai pembina seni tersebut merupakan suatu kewajiban. Memang dalam hal ini Sri Sultan tidaklah sebesar ayahnya dalam membina Seni Jawa Tradisional. Hal ini berhubungan erat dengan pandangan dan sikap hidupnya yang lebih sederhana di samping itu juga situasi dan kondisi masyarakat dan negara sangat berbeda dengan situasi dan kondisi pada masa ayahnya bertahta. Sebagai hasilnya ialah adanya kecenderungan untuk penyederhanaan berbagai hal dalam bidang kesenian.

Sebagai seorang pencipta seni maka Sri Sultan mempunyai peranan yang penting walaupun seperti sudah disebutkan di atas terdapat kecenderungan untuk penyederhanaan, ini tidak berarti memundurkan kualitas pengembangan seni di Kraton Yogyakarta. Sri Sultan dalam hal ini tercatat sebagai pencipta dari beberapa tarian, antara lain ialah "Bedoyo Manten" dan "Bekso Golek Menak" yang kemunculan idenya dipengaruhi oleh Wayang Golek Menak. Penggarapan teknis kedua tarian ini dilakukan pada tahun 1941 dengan dibantu oleh beberapa seniman istana seperti Kuswadi Kawindrasusanta dan sebagainya. Penciptaan "Bekso Golek Menak" ini adalah sesuatu yang baru dalam arti sebelumnya belum pernah ada baik di dalam maupun di luar Kraton. Diakui oleh Sri Sultan walaupun tarian ini sesuatu yang baru akan tetapi tetap berlandaskan pada prinsip dan orientasi "Joged Mataram" yang sebelumnya sudah dikenal.³⁵ Memang sudah menjadi suatu tradisi bahwa setiap Raja Jawa bertahta tentu akan menghasilkan karya seni. Karya tersebut ada yang berbentuk sastra, kerawitan, seni rupa dan seni tari. Dalam hal ini terbukti bahwa Sri Sultan sudah memenuhi kebiasaan tradisi tersebut dan memilih seni tari sebagai hasil karyanya.

Peranan sebagai seorang pencipta seni sekaligus memberikan bukti bahwa Sri Sultan tidak hanya berstatus sebagai pembina seni yang statis melainkan seorang Pembina Seni yang dinamis. Hal ini membuktikan bahwa di dalam fungsinya ini Sri Sultan menunjukkan kemampuan kreatifnya. Sebagai landasan dari terciptanya kemampuan kreatif ini ialah adanya keberanian dan rasa ketidakpuasan, kepekaan terhadap lingkungan dan sebagainya.

Dalam kedudukannya sebagai seorang pemikir seni maka Sri Sultan memang selalu mempunyai ide dan gagasan yang baru. Hal ini tampak dengan ketidakpuasannya terhadap tari "Bekso Golek Menak" yang dianggap belum sempurna, terutama yang berkaitan dengan tipologi karakter tokoh wayang golek. Hal ini membuktikan bahwa Sri Sultan berhati jujur dan tidak sombong (*amalap asor*) dalam berolah seni.³⁶ Untuk menyempurnakan tarian ciptaannya tersebut maka diundangnya para seniman, ahli tari, kerawitan, ahli sastra Jawa. Sebagai hasilnya ialah tarian "Beksa Rara Ruruh", "Rara Banyak", "Prabot Dusun", "Umarmoyo Umarmadi" dan "Beksa Cinten".³⁷

Penampilan kelompok tari Jawa "Siswo Among Bekso" dan Pusat Pelatihan Tari Bagong Kussudiardjo di beberapa negara memperoleh ijin dan restu dari Sri Sultan. Hal ini dimaksudkan sebagai duta seni yang mewakili kepentingan nasional. Sebagai duta seni ini tidak hanya kelompok tari saja akan tetapi juga seni-seni lainnya seperti seni kerawitan, seni rupa dan sebagainya.

Dalam hal seni kerawitan maka perhatian Sri Sultan sangat besar. Kraton Yogyakarta dalam hal ini mempunyai suatu lembaga pendidikan yang diberi nama "Habiranda" untuk mendidik para dalang wayang kulit. Dalam pendidikan pedalangan ini di dalamnya juga termasuk unsur-unsur seni tari, seni suara, sastra dan filsafat. Lembaga pendidikan ini sudah banyak menghasilkan dalang terkenal di Yogyakarta dan di luar Yogyakarta.³⁸

Dalam bidang seni ukir dan berbagai macam pakaian adat yang merupakan, karya seni rupa dari Kraton Yogyakarta sampai dengan sekarang masih tetap terpelihara dan berkembang. Hal ini seringkali mengilhami munculnya kreasi-kreasi baru dalam dunia mode dan interior. Di kalangan masyarakat pecinta seni rupa maka nama Sri Sultan selalu melekat oleh karena perhatian dan bimbingan yang besar

terhadap dunia seni rupa. Peranannya dalam bidang ini bisa dilihat dari trophi bergilir Sri Sultan yang diperebutkan dalam kejuaraan seni rupa setiap tahunnya.³⁹

5.3.4 Peranan Dalam Bidang Pengembangan Keagamaan

Walaupun Sri Sultan adalah seorang muslim dan penyanggah gelar "Khalifatullah" dan "Panetep Panatagama" akan tetapi tidak pernah membedakan agama di dalam kehidupannya baik sebagai Negarawan, Raja dan Warga Negara Indonesia. Hal ini dapat dilihat dari luasnya pergaulan dan persahabatannya dari segala golongan dan lapisan masyarakat.

Dalam kedudukannya sebagai seorang Raja maka Sri Sultan sangat berperan di dalam menyemarakkan syiar Islam khususnya di Yogyakarta dan sekitarnya. Hal ini dapat dilihat dari kelangsungan tradisi "sekaten" yang pada prinsipnya merupakan sarana dakwah Islam sejak masa Sunan Kalijaga. Selain itu juga dalam manifestasinya bergelar "Panetep Panatagama" ialah dengan pengangkatan penghulu Kraton, mendirikan Masjid Sulthani di empat penjuru wilayah Yogyakarta serta menempatkan takmir masjid yang masih termasuk kerabat kraton di masing-masing masjid tersebut.⁴⁰ Gelar "Panetep Panatagama" dan "Khalifatullah" tersebut memang suatu konsep Islam di dalam pengembangan agama Islam di wilayah kerajaan Yogyakarta. Akan tetapi walaupun demikian sebagai seorang Raja yang bijaksana maka pandangannya tidak menjadi sempit oleh karena juga harus melindungi rakyatnya yang memeluk agama selain agama Islam. Toleransi agama ini dilaksanakan oleh Sri Sultan dengan baik sehingga semua rakyatnya merasa mendapat perhatian yang sama dari Sri Sultan.

Catatan

1. Mohammad Roem, "Apa yang akan terjadi dengan Republik jika tidak ada Hamengku Buwono IX", Atmakusumah (Penyunting). *Tahta Untuk Ralyat : Celah-celah Kehidupan Sultan Hamengku Buwono IX*. Jakarta : Gramedia, 1982, hlm. 133.
2. Frans Seda, "Peran Sri Sultan Hamengku Buwono IX dalam Melaksanakan dan Mempertahankan Stabilitas Nasional", *Makalah Seminar*, Nopember 1990, hlm. 2.
3. *Ibid.*
4. Dr. Soedjatmiko, "*Seorang Raja yang Demokratis*", Dr. Soedjatmiko, *Kompas* 4 Oktober 1988, hlm. 1.
5. Sekretariat Negara Republik Indonesia, *Gerakan 30 September : Pemberontakan Partai Komunis Indonesia: Latar belakang Aksi dan Penumpasannya*. Sekneg RI, 1994.
6. Frans Seda, *ibid*, hlm. 4
7. Redaksi Kompas, "Presiden Merasa Kehilangan Salah Satu Pemimpin Bangsa", *Kompas*, 4 Oktober 1988, hlm. 1.
8. *Ibid.*
9. Redaksi Kompas, "Pendapat Ahli-ahli Amerika: Sikap Sri Sultan Mendorong Integrasi dan Stabilitas", *Kompas*, 10 Oktober 1988, hlm. 8.

10. Ali Moertopo, *Strategi Politik Nasional* Jakarta: CSIS, 1974, hlm. 14.
11. *Ibid.*
12. M. Rusli Karim, *Perjalanan Partai Politik di Indonesia : Sebuah potret pasang surut*. Jakarta : CV. Rajawali, 1983, hlm. 160.
13. P.J. Suwarno, *Hamengku Buwono IX dan Sistem Birokrasi Pemerintahan Yogyakarta 1942--1974: Sebuah tinjauan historis*. Disertasi Universitas Gadjah Mada Yogyakarta 1993, hlm. 592.
14. *Ibid.*
15. Frans Seda, *ibid*, hlm. 6. Lihat Juga dalam Frans Seda, "Negarawan Berwibawa tanpa Pamrih", dalam Atmakusumah (Peny.), *ibid.*
16. Kustiniyati Mochtar, "Pak Sultan Dari Masa ke Masa", dalam Atmakusumah (Peny.), *Ibid.*, hlm. 19.
17. Dr. Soedjatmiko, "Seorang Raja Yang Demokratis", *Kompas*, 4 Oktober 1988, hlm. 1.
18. Redaksi Kedaulatan Rakyat, "Setelah Sri Sultan Wafat DIY Kehilangan Tiga Ciri Istimewa", *Kedaulatan Rakyat*, 5 Oktober 1988, hlm. 16.
19. Sri Paku Alam VIII, "Kontak dan Kerjasama Erat Menyatukan Kesultanan dengan Pakualaman", Atmakusumah (Peny.), *Ibid.*, hlm. 270.
20. P.J. Suwarno, *op. cit.*, hlm. 154.
21. Mubyarto, "Kepemimpinan Sri Sultan bawa Kemakmuran Yogya", *Kedaulatan Rakyat*, 15 Oktober 1988, hlm. 8.
22. *Ibid.*
23. Sunardian Wirodono, "Yogyakarta Pasca Sri Sultan HB IX dan Tantangan Perubahan", *Kedaulatan Rakyat*, 7 Oktober 1988, hlm. 7.
24. Wawancara Kedaulatan Rakyat dengan Noordi Pakoeningrat, "Rahasia mengapa Sri Sultan Pilih sebagai Penjaga Gawang", *Kedaulatan Rakyat*, 5 Oktober 1988, hlm. 13.

25. *Ibid.*
26. Jimmy S. Harianto, "Kenangan Sri Sultan dan Olahraga", *Kompas*, 6 Oktober 1988, hlm. 7
27. *Ibid*
28. *Ibid.*
29. "Di Mata Masyarakat : Sri Sultan juga Bapak Olahraga", Buana Minggu, 7 Oktober 1988, hlm. 1. Lihat juga dalam D. Suprayogi, "Pecinta Olahraga Yang gemar makan di pinggir Jalan", *Atmakusumah* (Peny). *op. cit.*, hlm. 263.
30. Di Mata Masyarakat *op. cit.*
31. "Sri Sultan, Bapak Pramuka", *Kompas*, 8 Oktober 1988, hlm. 1.
32. *Ibid*
33. Handung Kus Sudyareana, "Sri Sultan Hamengku Buwono IX sebagai Seniman dan Pemikir Seni", *Kedaulatan Rakyat*, 18 Oktober 1988, hlm. 6.
34. *Ibid.*
35. *Ibid.* Lihat juga dalam Bagong Kussudiardja, "Sri Sultan Sebagai Pengembang Kebudayaan", dalam *Atmakusumah* (Peny.), *op. cit.*, hlm. 267.
36. Handung Kus Sudyarsana, *op. cit.* Lihat juga dalam Ki Hadisuprpto, "Keindonesiaan dan Tradisi dalam Kemitraan Yang Selaras", *Kedaulatan Rakyat*, 19 Oktober 1988, hlm. 6.
37. "Sri Sultan : Hati-hati Lho Gong", *Kedaulatan Rakyat*, 6 Oktober 1988, hlm. 12.
38. Bagong Kussudiardja, *op. cit.*
39. Agus Dermawan, "Sri Sultan dan Seni Rupa", *Kompas*, 5 Oktober 1988, hlm: 1.
40. "Sri Sultan Banyak Berjasa dalam Pengembangan Agama", *Kedaulatan Rakyat*, 16 Oktober 1988, hlm. 12.

BAB VI

FALSAFAH HIDUP DAN SUMBANGAN PEMIKIRAN SRI SULTAN HAMENGKU BUWONO IX

6.1 Kehidupan Sebagai Seorang Raja

Sri Sultan Hamengku Buwono IX Yang mempunyai nama kecil G.R.M. Dorodjatun secara resmi dinobatkan sebagai Sultan pada 18 Maret 1940. Sebagai seorang raja yang berusia relatif masih muda, yaitu menjelang 28 tahun maka banyak pihak yang menaruh harapan terhadap munculnya suatu fajar baru di dalam keraton Yogyakarta. Sebelum penobatannya sudah terbukti bagaimana keuletan dan ketabahannya di dalam menghadapi perundingan dengan Gubernur Dr. Lucien Adam mengenai kontrak politik antara Kesultanan dengan-pemerintah Belanda. Setelah peristiwa ini maka masih banyak lagi keputusan yang harus diambil oleh Sri Sultan yang berhubungan dengan kedudukannya sebagai seorang raja.

Pemahaman yang mendalam terhadap hakekat kekuasaannya menjadi salah satu ciri Sri Sultan yang membedakannya dengan raja-raja lainnya khususnya di Jawa dan yang hidup sejaman dengannya. Pembaharuan yang dilakukannya ialah memberikan bentuk dan eksistensi baru terhadap kekuasaannya yang secara tradisional memperoleh legitimasi dari falsafah leluhur yang penuh mistik. Sebagai hasilnya ialah kekuasaan yang berpola feodalistis dengan corak demokratis sehingga Sri Sultan disebut sebagai seorang arsitek

kekuasaan yang berhasil.¹ Hal ini sudah dikemukakan di dalam pidato penobatannya yang antara lain ingin mempertemukan jiwa Barat dan Timur agar dapat bekerja sama dalam suasana yang harmonis tanpa yang Timur kehilangan kepribadiannya.²

Kekuasaan sebagai seorang Raja tidak menjadikannya jauh dari rakyat oleh karena pada hakekatnya di dalam konsep Jawa maka seorang Raja harus selalu memperhatikan rakyatnya. Prinsip "Rajagung binathara mbaudhendba nyakrawati" yang kurang lebih berarti bahwa Raja berkuasa seperti Dewa yang bertugas untuk mempertahankan hukum dan menguasai dunia. Kemudian prinsip yang kedua ialah "bebudi bawalaksana", "ambekadil paramarta" yang berarti bahwa Raja di samping mempunyai kekuasaan juga mengutamakan keadilan dan memperhatikan kesejahteraan rakyatnya. Prinsip ketiga yang tidak kurang pentingnya ialah "ngaja tata titi tentraming projo", yaitu bahwa raja berperan sebagai penjaga dan pemelihara ketertiban dan kesejahteraan rakyatnya.³ Ketiga prinsip ini terutama prinsip pertama apabila hanya dipahami secara terpisah akan mengilhami seorang raja bertindak sewenang-wenang, akan tetapi dengan memperhatikan prinsip kedua dan ketiga akan memberikan pedoman di dalam menjalankan kekuasaan sesuai dengan kepentingan rakyat.

Pada kenyataannya ketiga prinsip tersebut di atas sudah dijalankan dengan baik oleh Sri Sultan. Bahkan sepertinya dapat dilihat bahwa figur Sri Sultan ialah seorang raja yang jiwa kerakyatannya jauh lebih merakyat dari pada rakyat biasa. Sebagai manifestasi dari prinsipnya tersebut maka tidaklah mengherankan apabila Sri Sultan mengabdikan dan mempertaruhkan tahtanya untuk rakyat. Dalam kehidupan sehari-hari memang tampaknya Sri Sultan hidup dalam dua dunia yang berbeda. Dunia pertama seperti yang telah disinggung di atas ialah kehidupan di dalam kraton dengan segala tradisi yang berlaku. Sebagai seorang raja dalam arti kata yang sebenarnya maka Sri Sultan ialah penerus tahta di dalam deretan silsilah gemilang raja-raja Mataram.⁴ Dalam dunia ini Sri Sultan ialah kepala dari segenap kerabat berdarah biru yang disembah oleh para "kawulanya". Dengan wajah angker dalam pakaian kebesaran Sultan maka beliau "bersinewaka" di atas singgasananya, atau duduk dalam Kereta Kencana kirab keliling kota. Dialah Baginda Raja yang penuh

wibawa. Di dunia yang kedua maka Sri Sultan tampak biasa sebagaimana rakyat kebanyakan. Dalam berpakaian biasanya mengenakan pakaian model safari atau berkemeja batik lengan panjang dengan celana panjang berwarna gelap pada acara setengah resmi. Penampilannya di dunia yang kedua ini tampak lebih santai dan bebas.

Di samping beberapa prinsip kekuasaan menurut tradisi Jawa yang selalu dipegang oleh Sri Sultan seperti yang sudah diuraikan di atas, maka kedudukan kraton sendiri merupakan pusat kebudayaan dengan konsep filsafatnya yang terkandung di dalamnya. Konsep filsafat tersebut berhubungan dengan hakekat Raja dalam hubungannya dengan rakyat, dengan Tuhan dan sebagainya.⁷ Konsep filsafati tersebut biasanya berupa lambang-lambang tradisi yang terdapat pada seni bangunan dan arsitektur Kraton Yogyakarta. Arsitektur Jawa pada prinsipnya ialah simbolisasi dari konsep Budaya Jawa. Demikian juga halnya dengan susunan bangunan Kraton yang mengandung falsafah hidup manusia sebagai ciptaan Tuhan di samping mengandung tuntutan segi-segi keindahan. Sri Sultan di samping ditempa oleh Tradisi Jawa juga berpendidikan modern sehingga dengan bekal tersebut mampu menerjemahkan lambang-lambang tradisi itu secara aktual dan relevan. Sebagai hasilnya maka Sri Sultan dikenal sebagai seorang Raja yang mempunyai kepribadian dan integritas yang tinggi, selalu konsisten dengan sikapnya dan yang terpenting ialah mempunyai sifat yang sangat manusiawi.

Prinsip hidup Kawula Gusti yang terdapat di dalam buku Sastra Gending yang ditulis oleh Sultan Agung Hanyokrokusumo merupakan suatu tuntunan bagi raja-raja di Yogyakarta di dalam melakukan tugasnya memimpin rakyat untuk mencapai kemakmuran kerajaan. Inti ajaran Sultan Agung tersebut ialah "tidak ada sastra tanpa gending dan tidak ada gending tanpa sastra".⁸ Dengan demikian kedua unsur tersebut merupakan personifikasi dari "Kawula" dan "Gusti", yaitu Kawula atau dalam hal ini rakyat menyatu (*manunggal*) dengan Gusti atau Rajanya. Dalam arti lain bisa juga diterjemahkan sebagai hubungan vertikal antara manusia dengan Tuhannya. Hal ini menunjukkan betapa dalamnya prinsip atau falsafah hidup ini. Sri Sultan menerjemahkan prinsip ini dengan pengertian bahwa Raja bukanlah seorang penguasa, melainkan seseorang yang mengabdikan

kepada rakyatnya. Sebagai hasilnya ialah Sri Sultan dikenal sebagai seorang Raja yang merakyat dan demokratis, selalu menjadi pengayom bagi rakyatnya.

Sifat sebagai pengayom bagi rakyat ini dapat dilihat dari berbagai kebijaksanaan yang diambil dalam rangka menyejahterakan rakyatnya. Penggunaan gedung-gedung kraton untuk Universitas Gadjah Mada dan sekolah-sekolah lainnya, penggunaan tanah-tanah kraton untuk kepentingan rakyat seperti "magersari", yaitu rakyat diperbolehkan untuk tinggal di lingkungan dalam benteng kraton dan sebagainya adalah merupakan bukti terhadap sifat Sri Sultan seperti yang sudah disebutkan di atas. Selain itu maka prinsip "Sabda Pandita Ratu" tidak dipraktekkan oleh Sri Sultan sebagaimana arti harafiahnya yaitu bahwa setiap perintahnya harus dilaksanakan oleh rakyatnya melainkan setiap perkataan atau tindakannya harus tetap selalu dipegang sebagai sesuatu yang tidak boleh ditarik kembali.

6.2 Kehidupan Sebagai Negarawan

Keterlibatan Sri Sultan di pentas politik nasional dapat dikatakan sejak berdirinya Republik Indonesia sampai dengan pengunduran dirinya dari jabatan Wakil Presiden pada tahun 1978. Secara resmi memang peranannya di dalam pemerintahan sudah berakhir, akan tetapi di dalam kenyataannya Sri Sultan masih tetap sebagai Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta yang merupakan jabatan politik. Di samping itu perhatiannya terhadap negara tetap masih besar. Hal ini dapat dilihat dari berbagai jabatan di luar kedudukannya sebagai pejabat pemerintah pusat. Jabatan-jabatan tersebut antara lain Ketua Umum Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI), Ketua Kwartir Gerakan Pramuka, Ketua Dewan Pembimbing Lembaga Pariwisata Indonesia, Ketua Dewan Perniagaan dan Perusahaan dan mengetuai berbagai tugas ke luar negeri dan sebagainya. Dalam Kedudukannya sebagai pemimpin informal ini maka peranan Sri Sultan tetap masih diperhitungkan oleh berbagai kalangan. Hal ini merupakan kewajiban sebab sebelumnya dalam kedudukannya sebagai pemimpin formal sudah terbiasa untuk bekerja secara informal.⁹

Sebagai negarawan Sri Sultan merupakan figur yang lain daripada lainnya, yaitu dikenal sebagai tokoh independen dalam arti tidak memihak kepada suatu kelompok politik tertentu (*non partizan*) dan mempunyai komitmen yang kuat terhadap sesuatu yang dianggap baik dan benar untuk kepentingan bangsa dan negara. Dalam hal ini Sri Sultan mengetahui kapan dan mengapa harus terus maju demikian juga sebaliknya kapan dan mengapa harus mundur.¹⁰ Sebagai figur yang unik ini dapat dimengerti apabila diketahui falsafah hidupnya yang menjadi dasar dari segala tindakan yang dilakukannya. Falsafah hidup Sri Sultan yang dijadikan pedoman di dalam kedudukannya sebagai negarawan ialah tanpa pamrih dan tanpa ambisi serta setia terhadap prinsipnya.

Tanpa Pamrih dan Tidak Ambisius

Falsafah hidup tanpa pamrih dan tidak ambisius ini sangat dijaga oleh Sri Sultan sehingga sepanjang kariernya sebagai negarawan memperoleh berbagai sebutan sesuai dengan apa yang menjadi falsafah hidupnya. Sebutan tersebut antara lain ialah sebagai nasionalis sejati, patriot teladan, demokrat sejati, negarawan berwibawa tanpa pamrih, pemimpin bangsa dan sebagainya.¹¹ Kenyataan ini menunjukkan integritas dan kapasitas pribadi Sri Sultan di dalam melaksanakan tugas-tugas negara yang menjadi tanggung jawabnya.

Sikap tanpa pamrih dan tidak ambisius ini sudah melekat pada Sri Sultan sejak sebelum menjadi negarawan atau sebelum Proklamasi Kemerdekaan. Sebagai contoh ialah terlihat pada masa perundingan yang dilakukannya dengan Gubernur Dr. Lucien Adam pada tahun 1939 sampai dengan tahun 1940. Perundingan yang menyangkut masa depan Kraton Yogyakarta berlangsung lama oleh karena kedua belah pihak saling tidak mau mengalah. Seperti diketahui bahwa pada masa perundingan ini dilaksanakan Sri Sultan belum diangkat secara resmi sebagai Raja padahal Dr. Lucien Adam bertindak sebagai wakil pemerintah kolonial yang berperan di dalam pengangkatan raja di Yogyakarta.¹²

Dari peristiwa tersebut dapat diketahui bahwa sikap tanpa pamrih dan tidak ambisius itu memang tetap dipegang oleh Sri Sultan yang tidak merasa khawatir atau takut dengan lawan perundingannya yang

notabene orang yang menentukan di dalam pengangkatan Sultan nantinya. Apabila Sri Sultan mempunyai pamrih untuk menjadi Raja sudah barang tentu akan menyetujui usul-usul yang diajukan oleh pihak Belanda dengan segera menanda tangani kontrak politik tersebut.

Pada saat Sri Sultan mengirimkan telegram kepada Presiden Soekarno sehari setelah Proklamasi Kemerdekaan yang berisi mengenai dukungannya terhadap Republik maka tidak ada istilah lain untuk melukiskan sikap Sri Sultan tersebut selain sebagai seorang tanpa pamrih. Mengapa demikian? Jawabannya sangat mudah yaitu bahwa memilih berpihak kepada Republik berarti menolak tawaran Belanda untuk menjadi sekutunya dengan imbalan kedudukan dan materi yang sangat berlimpah, sedangkan menjadi sekutu Republik yang baru berusia beberapa hari tidak bisa mengharapkan apapun juga.¹³ Sikap memilih kepada Republik ini dilakukan secara sadar dan tulus sehingga secara spontan menawarkan Yogyakarta sebagai ibukota negara oleh karena situasi yang tidak menentu dan tidak memungkinkan untuk mempertahankan Jakarta sebagai ibukota. Tawaran tersebut akhirnya diterima sehingga sejak 5 Januari 1946 sampai dengan Desember 1949 Yogyakarta menjadi ibukota Republik Indonesia.

Selama Yogyakarta menjadi ibukota maka dengan tanpa rasa pamrih Sri Sultan mengorbankan segala harta bendanya untuk mempertahankan jalannya roda pemerintahan. Sebagian kantor dari beberapa departemen menggunakan gedung-gedung milik Sri Sultan, bahkan selama beberapa kali pembayaran gaji pegawai pemerintah pusat ditanggung oleh Sri Sultan.¹⁴ Ini semua dilakukan oleh Sri Sultan tanpa memikirkan ganti kerugian maupun balas jasa sehingga terasa sangat tepat ucapan Mohammad Roem pada saat diminta pendapatnya tentang Sri Sultan, yaitu "Apa yang akan terjadi dengan Republik jika tidak ada Hamengku Buwono IX".¹⁵ Ucapan singkat ini seakan-akan sudah tidak perlu dijawab dengan kemungkinan-kemungkinan yang bermacam-macam oleh karena Sri Sultan selamanya tetap seorang yang mengabdikan kepada Revolusi Kemerdekaan, pembangunan politik dan pembangunan ekonomi Indonesia.

Dalam perkembangan negara selanjutnya maka banyak contoh-contoh tindakan yang diambil oleh Sri Sultan yang mencerminkan falsafah hidupnya tersebut. Seperti diketahui Sri Sultan merupakan orang yang paling sering duduk di dalam Kabinet sepanjang sejarah pemerintahan negara sampai dengan tahun 1978. Dalam kedudukannya sebagai Menteri Pertahanan, Menteri Ekkuin dan Wakil Presiden selalu dijalankannya dengan penuh pengabdian dan tanpa pamrih. Di dalam kedudukannya sebagai Menteri Pertahanan tercatat pengabdiannya yang besar di dalam pembentukan dan perkembangan Tentara Nasional Indonesia yang di dalamnya penuh dengan pergolakan antara bekas KNIL, PETA, Lasykar Rakyat dan sebagainya. Selain itu juga di dalam pergolakan di dalam tubuh TNI selama periode demokrasi liberal, pembentukan jati diri mengusahakan kemandirian secara organisatoris dan politis serta pergolakan di dalam memilih pemimpin.¹⁶

Dalam kedudukannya sebagai Menteri Ekkuin maka pengabdian Sri Sultan juga tidak kurang besarnya, terutama di dalam proses rehabilitasi dan stabilisasi perekonomian nasional untuk memperoleh kepercayaan dari dalam negeri dan dunia internasional. (Secara lebih lengkap dan terperinci sudah diuraikan di dalam bagian peranan Sri Sultan dalam bidang politik dan ekonomi).

Sebagai Wakil Presiden sebenarnya juga banyak sumbangan pemikiran yang sudah diberikannya. Pertama ialah mengenai Pembangunan Demokrasi yang menurutnya harus dilakukan secara bersama-sama dengan Pembangunan Ekonomi. Hal ini dimaksudkan untuk menghindari timbulnya distorsi dan persepsi rakyat yang dapat mengganggu jalannya pembangunan nasional.¹⁷ Kedua ialah pendapat Sri Sultan bahwa jabatan Wakil Presiden sebaiknya ialah untuk dipersiapkan sebagai Presiden atau semacam kedudukan sebagai "putra mahkota". Hal ini dapat dilakukan dengan prosedur konstitusional dan dipilih oleh rakyat melalui Majelis Permusyawaratan Rakyat.¹⁸

Sebagai kesimpulannya maka sebagai implementasi dari falsafah pengabdian tanpa pamrih ini ialah Sri Sultan sebagai negarawan merupakan personifikasi dari suatu integritas, baik dalam urusan yang

berhubungan dengan proses kekuasaan maupun tata nilai politik. Di samping itu Sri Sultan juga dikenal sebagai pembawa moralitas atau kepatutan dalam tingkah laku politik yang menjadi dari kewibawaannya sebagai negarawan. Negaran yang "sepi ing pamrih".

6.3 *Kehidupan Kemanusiaan*

6.3.1 *Falsafah Satria Pandita*

Di dalam kehidupan sehari-harinya maka Sri Sultan dikenal sebagai seorang yang berwatak pendiam, sederhana dan berani di dalam mempertahankan kebenaran. Hal ini dapat dipahami apabila ditelusuri latar belakang yang membentuk sikap seperti tersebut di atas. Salah seorang tokoh yang dikagumi oleh Sri Sultan tidak lain ialah nenek moyangnya sendiri yaitu Sultan Agung Hanyokrokusumo yang disebut merupakan sumber inspirasi di dalam mengambil keputusan-keputusan politik yang selama ini dikenal tegas dan konsisten. Hal ini beralasan oleh karena Sultan Agung tidak hanya dikenal oleh karena tindakan-tindakan politiknya saja melainkan karyanya di bidang kesusasteraan yang berupa buku Sastra Gending. Dalam buku ini terkandung banyak ajaran-ajaran falsafah hidup yang dapat menuntun kehidupan manusia ke arah yang baik dan berguna.¹⁹ Salah satu ajaran dari Sastra Gending yang dihayati oleh Sri Sultan ialah konsep Satria Pandita.

Secara sederhana konsep tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut : Satria Pandita melambangkan seorang Satria pembela kebenaran yang masuk dan menjelma (*ngrasuk*) menjadi Pandita, sedangkan Pandita pembina keadilan masuk (*manjing*) kedalam jiwa Satria.²⁰ Sebagai hasilnya ialah terjalinnnya dua bentuk kedalam satu sifat yang menjadi sintesanya yaitu pembela kebenaran dan keadilan. Sebagai implementasinya ialah dapat dilihat di dalam sejarah pengabdian Sri Sultan kepada negara, bangsa dan rakyatnya. Seperti yang sudah diterangkan di atas mengena contoh-contoh tindakan Sri Sultan dalam mempraktekkan falsafah hidupnya di dalam kedudukannya sebagai negarawan maka peristiwa-peristiwa seperti perundingan dengan Belanda, sikap memihak terhadap Republik dan keikhlasan untuk dijakikannya Yogyakarta sebagai ibukota juga mencerminkan falsafah Satria Pandita ini.

Kesan yang paling cepat terlontarkan terhadap Sri Sultan dalam kehidupannya sebagai apapun juga ialah kesederhanaan sikap, tingkah laku yang demokratis dan sederhana. Hal ini tampak sekali apabila Sri Sultan tampil dalam dunia di luar kedudukannya sebagai Raja yang tidak pernah menunjukkan kesan resmi atau formal. Ketenangan sikapnya di dalam menghadapi berbagai macam situasi terlihat dari tindakan yang lebih banyak berdiam diri. Dengan sikapnya ini oleh kalangan tertentu dianggap sebagai tidak pernah mengambil keputusan. Pendapat ini tentu saja tidak benar dan tidak beralasan sama sekali dan sejarah telah mencatat berbagai keputusan yang diambil oleh Sri Sultan terutama pada masa-masa negara dalam keadaan kritis. Walaupun sikap diam ini dalam berbagai hal lebih menguntungkan akan tetapi tampaknya Sri Sultan menyadari sisi lemah dari sikapnya ini. Hal ini terbukti dari nasehat yang diberikan kepada putra-putranya yang menekankan untuk berani mengatakan "ya" apabila benar dan "tidak" jika hal itu memang salah dan janganlah hanya diam seperti Sri Sultan oleh karena sikap seperti ini ternyata sering merugikan rakyat.²¹

6.3.2 Sikap Rendah Hati (*Andhap Asor*)

Kesederhanaan Sri Sultan adalah merupakan sikap yang paling menonjol dalam kehidupan sehari-harinya. Kesederhanaan dalam hal ini lebih diartikan dalam hal pemikiran yang selalu mencari keseimbangan antara kehidupan jasmani dan rohani, antara kehidupan dunia dan akherat. Dalam kehidupan ini orang harus memilih antara menjadi orang yang "mulyo" atau "mukti". Ketetapan di dalam memilih pilihan hidup ini akan menentukan kualitas hidup seseorang.²² Sikap rendah hati juga hendaknya harus tetap dimiliki oleh seseorang. Dengan demikian maka seseorang yang mempunyai kekuasaan akan selalu ingat terhadap rakyatnya. Sikap rendah hati ini bukanlah merupakan suatu sikap yang berarti negatif apabila dijalankan dengan benar bahkan orang akan lebih menghargai sikap ini daripada sikap "adigang adigung adiguna".

Di luar kehidupannya sebagai seorang raja maka implementasi dari sikap rendah hati Sri Sultan dapat dilihat dengan jelas. Sebagai seorang negarawan Sri Sultan tidak pernah membedakan antara

pegawai rendah dan pegawai tinggi, rakyat biasa dan keturunan bangsawan, orang Jawa dan luar Jawa bahkan antara orang yang senang dan tidak senang dengan dirinya. Semuanya mempunyai kedudukan yang sama dan mendapat pengayoman dari Sri Sultan.²³ Sebagai ilustrasi dalam hal ini ialah suatu peristiwa yang terjadi di tahun 1946, diceritakan mengenai seorang wanita penjual sayur mayur di Pasar Kraggan yang memperoleh tumpangan kendaraan dari Sri Sultan pada waktu ia sedang menunggu kendaraan. Setelah mengetahui bahwa kendaraan yang ditumpangnya tersebut adalah kendaraan Sri Sultan, wanita penjual sayur itu jatuh pingsan.²⁴ Kemudian masih banyak lagi peristiwa yang mencerminkan sikap rendah hati dari Sri Sultan seperti misalnya kebiasaannya untuk makan di warung-warung kecil dan sebagainya.²⁵

Pada waktu aktif di dalam kegiatan kepramukaan maka Sri Sultan berusaha untuk menghilangkan jarak di antara anggotanya dengan mempopulerkan sebutan "Kak" untuk memanggil para pembinanya. Kemudian berusaha untuk mengembalikan kesan kepramukaan kepada ide aslinya, yaitu bersifat demokratis dan tidak hanya berseragam pramuka saja melainkan bukti yang nyata di dalam masyarakat. Hal ini dimaksudkan untuk menghidupkan kembali romantika kepramukaan yang sudah memudar.²⁶

Lepas dari semuanya itu maka sikap rendah hati Sri Sultan ini memang sudah menjadi semacam pegangan hidupnya. Hal ini tidak hanya secara verbal saja akan tetapi sejarah telah mencatat bahwa pidato penobatannya sebagai Raja pada tahun 1940 menegaskan sikap rendah hatinya ini, "walaupun berpendidikan Barat tetap sebagai orang Jawa."

6.3.3 Pejuang Perdamaian

Menelaah kembali kehidupan Sri Sultan adalah seolah-olah seperti halnya menguras Samudera. Walaupun berbagai segi di dalam perjalanan hidupnya sudah banyak diungkapkan akan tetapi tetap selalu muncul segi-segi kehidupan lain yang belum terungkapkan. Dalam hal ini yang dimaksudkan ialah usahanya untuk memperjuangkan dan menjaga perdamaian di dalam negeri dan di

dunia Internasional. Di dalam negeri maka peranan Sri Sultan pada masa sebelum dan sesudah kemerdekaan Indonesia selalu bernafaskan perdamaian. Hal ini dapat dilihat dari tindakan-tindakan yang diambilnya di dalam menghadapi dan menyelesaikan suatu situasi. Pengambilan keputusan selalu dilakukan berdasarkan pertimbangan yang matang dan dengan kepala dingin. Strategi konfrontatif di dalam menghadapi lawan-lawannya tidak pernah diterapkan, kecuali dalam mempertahankan dan memperjuangkan prinsip-prinsip hidup yang diyakininya.²⁷

Di dalam memperjuangkan perdamaian di dalam negeri Sri Sultan selalu mendasarkan pada prinsip-prinsip demokrasi. Hal ini sangat jelas terlihat dalam perjuangannya di dalam menentang penjajahan Belanda pada masa perjuangan kemerdekaan Indonesia. Pada masa kemudian perjuangannya ini terus dilaksanakan sampai pada masa Orde Baru melalui bidang politik, ekonomi, sosial dan kebudayaan. Dalam dua bidang yang disebut terakhir ini tampak bahwa Sri Sultan benar-benar tampil sebagai figur pembawa perdamaian.

Berbagai macam kunjungan dan lawatan ke luar negeri yang dilakukan oleh Sri Sultan baik dalam kedudukannya sebagai duta politik dan duta olahraga maupun duta budaya dan seni selalu di dalamnya mengandung misi menggalang perdamaian dunia. Dunia Internasional mengakui bahwa peranan Indonesia di dalam menciptakan perdamaian dan kesejahteraan di Kawasan Asia Tenggara sangat besar. Berdasarkan penilaian tersebut maka Sri Sultan mendapat Hadiah Perdamaian *Kajima* (*Peace Award Kajima*), yaitu hadiah perdamaian Internasional versi Kajima Jepang. Hadiah Perdamaian Kajima ini mempunyai kedudukan yang sejajar dengan Hadiah Nobel, perbedaannya apabila Hadiah Nobel biasanya diberikan kepada orang-orang Eropa dan Amerika maka Hadiah Kajima ini dimaksudkan untuk orang-orang di Asia dan Afrika. Walaupun demikian keduanya tidak menutup kemungkinan adanya penerima hadiah dari bangsa lain di luar yang telah disebutkan di atas. Para penerima hadiah ini pada masa sebelumnya ialah secara berturut-turut C. Counnhove Kalergi seorang negarawan Austria, Ny. Kaoru Hatoyama dari Jepang, Hubert Horatio

Humphrey bekas wakil presiden Amerika Serikat, William Benton senator Amerika Serikat dan Naotake Sato bekas menteri luar negeri Jepang.²⁸

Sri Sultan merasakan bahwa pemberian hadiah perdamaian tersebut bukan semata-mata untuk dirinya sendiri melainkan untuk rakyat Indonesia. Lebih lanjut Sri Sultan menjelaskan bahwa yang dimaksudkan sebagai perdamaian ialah :²⁹

"Damai yang saya maksudkan bukan damai paksaan dari pihak-pihak tertentu seperti terjadi pada abad-abad lalu, tetapi damai yang merefleksikan martabat yang tinggi manusia yang hidup dalam keselarasan dengan lingkungan alam dan tetangganya. Karena itu saya dan bangsa Indonesia akan berusaha sekeras tenaga mengupayakan perdamaian sebagai silih atas penghargaan yang tidak ternilai ini. Dan karya besar ini sangat erat berkaitan dengan pengembangan bangsa manusia yang berdasar kemanusiaan. Dasar inilah yang merupakan penyangga perdamaian di bumi ini. Sebab pada dasarnya kemanusiaan merupakan petunjuk utama menuju perdamaian abadi."

Tindakan Sri Sultan di dalam memadukan antara tradisi lama dengan hal yang baik dari alam demokrasi dari suatu masyarakat akan membentuk dasar yang kuat bagi persatuan dan kesatuan serta stabilitas di dalam negeri, juga di masing-masing negara yang menerapkannya. Hal ini pada akhirnya akan mewujudkan suatu perdamaian Internasional.

Catatan

1. Kustiniyati Mochtar, "Pak Sultan dari Masa ke Masa dalam Atmakusumah (Penyunting) *Tahta untuk Rakyat* : Celah-celah kehidupan Sultan Hamengku Buwono IX. (Jakarta : PT Gramedia, 1982) hlm. 20
2. *Ibid.*, hlm. 53
3. "Pemahaman Kekuasaan yang utuh lahirkan Jiwa merakyat Sultan", *Kedaulatan Rakyat*, 7 Oktober 1988, hlm.12.
4. Kustiniyati Mochtar, *op. cit.*, hlm.18.
5. *Ibid.*
6. *Ibid.*, hlm.19
7. Sunardian Wirodono, "Di balik Kepribadian Sri Sultan HB IX: Kraton tempat Raja-raja belajar untuk Wicaksana dan Waskita", *Kedaulatan Rakyat*, 16 Oktober 1988, hlm.2.
8. Sarino Mangunpranoto, "Antara hidup Jasmani dan Rohani mencari keseimbangan", dalam Atmakusumah, *op cit.*, hlm.219.
9. Frans Seda, "Peran Sri Sultan Hamengku Buwono IX dalam Melaksanakan dan Mempertahankan Stabilitas Nasional", *Makalah pada Seminar di Universitas Widya Mataram*, Nopember 1990, hlm.1.

10. *Ibid.* Juga dalam Adam Malik, "Sekelumit kata untuk Sri Sultan Hamengku Buwono IX", Atmakusumah, *op.cit.*, Bab Pendahuluan, hlm. 7--10.
11. *Wawancara* dengan Sri Sultan Hamengku Buwono X (dahulu KGPH. H. Mangkubumi S.H.) di Kraton Kilen Kraton Yogyakarta pada tanggal 12 Januari 1995.
12. Kustiniyati Mochtar, *op.cit.*, hlm. 41--63.
13. T.K. Critchley, "Pangeran di sebuah Republik Seorang Patriot Yang unik dalam Atmakusumah (Peny.), *op. cit.*, hlm. 156.
14. Ny. R. Mohammad Hatta, "Uang Belanja pemberian Sri Sultan masih tersimpan sebagai kenangan", Atmakusumah (Peny.), *Ibid.*, hlm. 213. Juga *Wawancara* dengan Sri Sultan Hamengku Buwono X, *op. cit.*
15. Mohammad Roem, "Apa yang akan terjadi dengan Republik jika tidak ada Hamengku Buwono IX", Atmakusumah, *op. cit.*, hlm. 133.
16. T.B. Simatupang, "Bagaimana seorang Sultan bisa berperan penting dalam republik yang dilahirkan revolusi kerakyatan ?". Atmakusumah, *Ibid.*, hlm. 142--152.
17. Frans Seda, *op. cit.*, hlm.6.
18. *Ibid.*
19. Sarino Mangunpranoto, "Antara hidup jasmani dan rohani mencari keseimbangan", Atmakusumah, *op. cit.*, hlm. 218--219.
20. *Ibid.*
21. *Wawancara* dengan Sri Sultan Hamengku Buwono X, *op. cit.*
22. *Ibid.*
23. *Ibid.*
24. Kustiniyati Mochtar, *op. cit.*, hlm. 99.
25. D. Suprayogi, "Pecinta Olahraga yang gemar makan di tepi jalan", dalam Atmakusumah (Peny.), *op. cit.*, hlm. 264.

26. Kustiniyati Mochtar, *op. cit.*, hlm. 128.
27. Sarino Mangunpranoto, *op. cit.*, hlm. 220.
28. Sugeng Wiyono, "Sri Sultan HB IX : Penerima Peace Award Kajima satu satunya dari Kawasan Asia Tenggara", *Kedaulatan Rakyat*, 11 Oktober 1988, hlm. 6.
29. *Ibid.*

BAB VII

PENUTUP

Dari uraian Biografi Pahlawan Nasional Sri Sultan Hamengku Buwana IX, dapatlah dipetik pelajaran dan beberapa suri-tauladan yang amat berguna bagi generasi penerus bangsa Indonesia. Meskipun ia seorang anak raja, sejak mudanya ia merakyat, bergaul dengan masyarakat luas, sehingga ia benar-benar mengenal kehidupan masyarakat sekitarnya. Walau pun ia belajar di kalangan sekolah dan keluarga Belanda, namun ia tetap menjadi pewaris dan penjaga Kebudayaan Jawa, serta berjiwa patriotik untuk membela tanah air tercinta Indonesia.

Sri Sultan Hamengku Buwana IX sebagai Raja Ngayogyakarta Hadiningrat, bergelar lengkap Sri Sultan Hamengku Buwana Ngabdurahman Sayidin Panata Gama Khalifatullah ingkang kaping Sanga ing Ngayogyakarta, adalah seorang pemimpin yang dapat "Mengayomi, melindungi, merengkuh, dan sekaligus melayani rakyat", sehingga "Tahta Untuk Rakyat". Sri Sultan Hamengku Buwana IX, kepemimpinan dan kewibawaannya tidak hanya dirasakan untuk masyarakat lingkungan Daerah Istimewa Yogyakarta, namun lebih luas lagi, yaitu dirasakan seluruh rakyat Negara Republik Indonesia, bahkan sebagaian masyarakat dunia pun mengakui kepemimpinannya. Dunia Internasional mengakui Peranan Sri Sultan Hamengku Buwana IX sebagai pencipta perdamaian dan kesejahteraan di Asia Tenggara sangat besar, sehingga ia menerima "*KAJIMA*

PEACE AWARD", yaitu hadiah perdamaian dari Kajima. Ketika menerima hadiah itu, Sri Sultan Hamengku Buwana IX menyatakan, bahwa pemberian hadiah perdamaian itu semata-mata bukan untuk dirinya, namun untuk seluruh rakyat Indonesia yang cinta damai.

Sri Sultan Hamengku Buwana IX adalah Tokoh Daerah sekaligus Tokoh Nasional, dan Tokoh Dunia. Sebagai Tokoh Daerah, ia memperhatikan pembangunan, serta pengembangan daerahnya serta kesejahteraan rakyatnya. Ssbagai Tokoh Nasional, ia berkiprah di bidang ekonomi-sosial-politik-kebudayaan sampai pada bidang olah raga. Dalam bidang-bidang itulah, ia ikut membangun Negara Republik Indonesia, dan berhasil dengan baik. Karier puncaknya di Indonesia sebagai Wakil Presiden RI pada tahun 1972--1978. Sebagai Tokoh Dunia, ia diakui sebagai tokoh perdamaian di Asia Tenggara, dan baru satu-satunya warga Asia Tenggara yang dapat hadiah tersebut.

Demikianlah kisah kehidupan dan perjuangan Sri Sultan Hamengku Buwana IX, salah seorang Pahlawan Nasional Republik Indonesia, yang hampir seluruh kehidupannya digunakan untuk rakyat, Bangsa dan Negara Republik Indonesia. Meskipun Sri Sultan Hamengku Buwana IX sudah tiada, hamun cita-cita perjuangan, ketauladanannya, serta semangat juangnya tetap jadi penghuni hati seluruh rakyat dan Bangsa Indonesia.

DAFTAR PUSTAKA

Buku-buku

- Atmakusumah, penyunting. *Tahta Untuk Rakyat Celah-celah Kehidupan Sultan Hamengku Buwana IX*. Jakarta : Gramedia, 1982.
- Badan Musyawarah Musea Daerah Istimewa Yogyakarta Perwakilan Jakarta. *Sejarah Perjuangan Yogya Benteng Proklamasi*. Jakarta : Barahmus, 1985.
- Buku Dasa Warsa Kotapraja Jogjakarta 7 Djuni 1947 -- 7 Djuni 1957*. Jogjakarta: Pemerintah Kota Jogjakarta, 1957.
- Kota Jogjakarta 200 Tahun 7 Oktober 1756 -- 7 Oktober 1956*. Jogjakarta: Panitia Peringatan Kota Jogjakarta 200 tahun, 1956.
- Oesman Raliby. *Documenta Historica*. Djakarta : Bulan Bintang, 1952.
- Republik Indonesia Daerah Istimewa Jogjakarta*. Kementerian Penerangan, 1953.
- Samawi. *25 Tahun Merdeka*. Jogjakarta : Kedaulatan Rakyat, 1970.
- Sartono Kartodirdjo. *Sejarah Nasional Indonesia, jilid VI*. Jakarta : Balai Pustaka, 1977.

Selo Soemardjan. *Perubahan Sosial di Yogyakarta*. Yogyakarta : Gadjah Mada University Press, 1981.

Soedarisman Poerwokoesoemo. *Daerah Istimewa Yogyakarta*. Yogyakarta : Gadjah Mada University Press, 1984.

Soedarsono. *Sultan Hamengku Buwana IX Pengembang dan Pembaharu Tari Jawa Gaya Yogyakarta*. Yogyakarta : Pemerintah Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, 1989.

Sri Sultan : Hari-hari Hamengku Buwana IX. Jakarta : Pustaka Utama Grafiti, 1988.

30 Tahun Indonesia Merdeka 1945--1949. Jakarta : Tira Pustaka, 1980.

Makalah/Ceramah

PJ. Suwarno. *Situasi Yogyakarta Sebagai Pusat Pemerintahan RI Periode 1946--1949*. Ceramah di Museum Benteng, Yogyakarta. 1994.

Sri Paku Alam VIII. "Proses Penggabungan Yogyakarta Dengan RI". *Ceramah Tentang Makna Kepahlawanan Sri Sultan HB IX*. Di depan Mahasiswa Universitas Widya Mataram, tanggal 16 Nopember 1990.

Sri Sultan Hamengku Buwana IX. Ceramah dihadapan generasi muda pada tanggal 18 Agustus 1986 di THR Yogyakarta. Tanpa makalah.

Koran Harian :

Kedaulatan Rakyat, 8 Oktober 1988.

Suara Merdeka, 8 November 1990.

Kompas, 4 Januari 1995.

Lampiran

PRESIDEN
REPUBLIC INDONESIA
KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 053/TK/TAHUN 1990
TENTANG
PENGANUGERAHAN GELAR PAHLAWAN NASIONAL
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

- Membaca** : Surat Menteri Sosial selaku Ketua Umum Badan Pembina Pahlawan Pusat Nomor A/07-111-90/MS tanggal 31 Maret 1990, perihal usul penganugerahan Gelar Pahlawan untuk Almarhum Saudara SRI SULTAN HAMENGKU BUWONO IX;
- Meninbang** : 1. bahwa Almarhum Saudara SRI SULTAN HAMENGKU BUWONO IX, semasa hidupnya berjuang melawan penjajah Pemerintah Kolonial Belanda dan Pemerintah Pendudukan Jepang secara terus-menerus;
2. bahwa untuk menghargai jasa-jasanya yang sangat luar biasa dalam perjuangan melawan penjajahan pada umumnya, khususnya dalam peluang mempertahankan dan mengisi kemerdekaan, perlu menganugerahkan Gelar Pahlawan Nasional;
3. bahwa tindak kepahlawanan yang demikian itu penting untuk menjadi teladan bagi setiap Warga negara Indonesia;
- Mengingat** : 1. Pasal 15 Undang-Undang Dasar 1945;
2. Undang-Undang Nomor 4 Drt. Tahuri 1959 (Lembaran Negara Tahun 1959 Nomor 44) jo Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1961 (Lembaran Negara Tahun 1961 Nomor 3);
3. Undang-Undang Nomor 33 Prps Tahun 1964 (Lembaran Negara Tahun 1964 Nomor 111) jo Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1969 Nomor 36).
- Mendengar** : Pertimbangan Dewan Tanda-Tanda Kehormatan Republik Indonesia.

M E M U T U S K A N :

Menetapkan : Menganugerahkan Gelar "PAHLAWAN NASIONAL" kepada Almarhum Saudara SRI SULTAN HAMENGKU BUWONO IX, mantan Gubernur Kepala Daerah) Istimewa Yogyakarta (1945-1988)/mantan Wakil.

Presiden RI (1973-1978), sebagai penghargaan atas jasa-jasanya yang sangat luar biasa dan tindak kepahlawanannya dalam perjuangan melawan penjajah Pemerintah Kolonial Belanda dan Pemerintah Pendudukan Jepang pada umumnya, dan dalam perjuangan mempertahankan dan mengisi kemerdekaan pada khususnya, sehingga tindak kepahlawanan yang demikian itu dapat dijadikan teladan bagi setiap Warga Negara Indonesia.

Dengan ketentuan, bahwa apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini, akan diadakan pembetulan seperlunya.

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Menteri Sosial Republik Indonesia;
2. Menteri/Sekretaris Negara Republik Indonesia.
3. Ketua Dewan Tanda-tanda Kehormatan Republik Indonesia.

PETIKAN Keputusan ini disampaikan kepada ahliwaris yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Disalin sesuai aslinya oleh
SEKRETARIS MILITER
PRESIDEN

Ditetapkan di : Jakarta
Pada tanggal : 30 Juli 1990
PRESIDEN REPUBLIK
INDONESIA,

ttd.

ttd.

SYAUKAT
MAYOR JENDERAL TNI

S O E H A R T O

